

Katalog: 3308003

STATISTIK MODAL SOSIAL

2021



BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTIK MODAL SOSIAL

2021

www.bps.go.id



STATISTIK MODAL SOSIAL 2021

ISSN/ISBN: -

No. Publikasi: 04300.2210

Katalog: 3308003

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman: xviii + 139 halaman

Naskah:

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Penyunting:

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Desain Kover oleh:

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Penerbit:

© Badan Pusat Statistik RI

Sumber Ilustrasi:

freepik.com, storyset.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Dr. Ateng Hartono, SE, M.Si
Dr. Nurma Midayanti, S.Si., M.Env.Sc.

Editor:

Tri Windiarso, S.Si, M.Si
Tanno Kamila Helaw, ST, M.Sos

Penulis:

Tri Windiarso, S.Si, M.Si
Tanno Kamila Helaw, ST, M.Sos
Wahyu Pratama Satria Nugraha, SST
I Kadek Dede Dwipayana, S.Tr.Stat
Suci Ayu Lestari, S.Tr.Stat
Akhmad Hadi, S.Si

Pengolah Data:

Tanno Kamila Helaw, ST, M.Sos
Wahyu Pratama Satria Nugraha, SST
I Kadek Dede Dwipayana, S.Tr.Stat
Suci Ayu Lestari, S.Tr.Stat

Desain Kulit dan Tata Letak:

I Kadek Dede Dwipayana, S.Tr.Stat



KATA PENGANTAR

Modal sosial yang menyoroti hubungan antar manusia, memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah dapat menciptakan kemudahan-kemudahan untuk masyarakat mengakses sumber daya sehingga mampu meningkatkan ekonomi dan melaksanakan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Salah satu wujud manfaat dari keberadaan modal sosial di Indonesia terlihat jelas saat terjadi musibah yang menimpa negeri ini, masyarakat dari berbagai kelompok dan golongan serentak memberikan bantuan berupa penggalangan dana hingga membantu proses evakuasi.

Informasi terkait statistik modal sosial yang terdapat dalam masyarakat masih sangat terbatas. Publikasi Statistik Modal Sosial 2021 berusaha memberikan informasi besaran modal sosial dalam masyarakat Indonesia dalam tiga kelompok dimensi, yaitu 1) rasa saling percaya, 2) partisipasi sosial, serta 3) toleransi. Sumber data yang digunakan merupakan hasil Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan Tahun 2021.

Publikasi ini diharapkan dapat memberikan perspektif tentang pentingnya modal sosial dalam pembangunan. Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai pengambil kebijakan dapat memanfaatkan publikasi ini sebagai salah satu input dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program pembangunan. Publikasi ini dapat direalisasikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Kepada mereka yang telah memberikan kontribusi positif, baik secara individu maupun lembaga, kami sampaikan penghargaan yang tulus. Kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang sangat diharapkan.

Jakarta, Desember 2022
Direktur Statistik Ketahanan Sosial



Nurma Midayanti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Kilas Balik Pengukuran Modal Sosial.....	7
BAB II METODOLOGI.....	13
2.1. Kajian Teoritis Modal Sosial.....	15
2.2. Rumusan Pengukuran Modal Sosial Tahun 2021.....	17
2.3. Kerangka Kerja Modal Sosial Tahun 2021.....	21
2.4. Keterbatasan.....	24
2.5. Karakteristik Responden.....	26
BAB III RASA PERCAYA.....	31
3.1. Pengantar.....	35
3.2. Potret Rasa Percaya pada Ranah Kewargaan (Lokal).....	37
3.3. Potret Rasa Percaya pada Ranah Institusional (Global).....	46
BAB IV PARTISIPASI SOSIAL.....	61
4.1. Pengantar.....	65
4.2. Partisipasi Sosial di Ranah Kewargaan (Lokal).....	67
4.3. Partisipasi Sosial di Ranah Institusional (Global).....	75
BAB V TOLERANSI.....	85
5.1. Pengantar.....	89
5.2. Persepsi Terhadap Pembatasan Pelaksanaan Ajaran Agama Orang Lain yang Minoritas.....	91
5.3. Persepsi Terhadap Pembangunan Sewajarnya Berpihak pada Kelompok Agama Mayoritas.....	93
5.4. Persepsi Cenderung Hanya Berteman Baik dengan Orang yang Satu Suku ..	95

5.5.	Persepsi Terhadap Pembangunan Sewajarnya Berpihak pada Masyarakat Pribumi.....	97
5.6.	Persepsi Terhadap Kecenderungan Tidak Suka pada Orang yang Membantah Pendapat Responden.....	99

BAB VI. MODAL SOSIAL PENDUDUK INDONESIA..... 101

6.1.	Indeks Modal Sosial Indonesia menurut Beberapa Karakteristik.....	103
6.2.	Kontribusi Indikator Penyusun Indeks Modal Sosial	108

DAFTAR PUSTAKA	111
----------------------	-----

LAMPIRAN	115
----------------	-----

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Aspek dan Pertanyaan Dimensi Rasa Percaya.....	36
Tabel 4.1.	Aspek dan Pertanyaan Dimensi Partisipasi Sosial.....	66
Tabel 5.1.	Parameter Pengukuran untuk Dimensi Toleransi.....	90
Tabel 6.1.	Besaran Kontribusi Indikator Terhadap Indeks Modal Sosial 2021.....	108

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Astagra Wawasan Nusantara	22
Gambar 2.2.	Dimensi Ketahanan Wilayah	23
Gambar 2.3.	Dimensi Modal Sosial	23
Gambar 2.4.	Kerangka Kerja Pengukuran Modal Sosial.....	24
Gambar 2.5.	Karakteristik Responden menurut Kelompok Umur.....	26
Gambar 2.6.	Karakteristik Responden menurut Tingkat Pendidikan	26
Gambar 2.7.	Tempat Tinggal Responden berdasarkan Kesamaan Agama/ Keyakinan	27
Gambar 2.8.	Tempat Tinggal Responden berdasarkan Kesamaan Suku	28
Gambar 2.9.	Tempat Tinggal Responden berdasarkan Keberadaan Tetangga yang Masih Ada Hubungan Keperabatan.....	28
Gambar 3.1.	Rasa Percaya Terhadap Tetangga Akan Membantu Jika Terkena Musibah menurut Klasifikasi Wilayah.....	38
Gambar 3.2.	Rasa Percaya Terhadap Tetangga Akan Membantu Jika Terkena Musibah menurut Keberagaman Tetangga	38
Gambar 3.3.	Rasa Percaya Terhadap Tetangga Akan Membantu Jika Rumah Kosong menurut Kelompok Umur.....	39
Gambar 3.4.	Rasa Percaya Terhadap Tetangga Akan Membantu Jika Rumah Kosong menurut Keberagaman Tetangga.....	40
Gambar 3.5.	Rasa Percaya Terhadap Pengurus RT/Ketua Lingkungan Setempat menurut Kelompok Umur	41
Gambar 3.6.	Rasa Percaya Terhadap Pengurus RT/Ketua Lingkungan Setempat menurut Keberagaman Tetangga	42
Gambar 3.7.	Rasa Percaya Terhadap Aparat Desa/Kelurahan menurut Klasifikasi Wilayah.....	43
Gambar 3.8.	Rasa Percaya Terhadap Aparat Desa/Kelurahan menurut Keberagaman Tetangga.....	44
Gambar 3.9.	Rasa Percaya Terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	45
Gambar 3.10.	Rasa Percaya Terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota menurut Keberagaman Tetangga.....	46

Gambar 3.11.	Rasa Percaya Terhadap Pemerintah Provinsi menurut Provinsi	47
Gambar 3.12.	Rasa Percaya Terhadap Pemerintah Provinsi menurut Klasifikasi Wilayah.....	47
Gambar 3.13.	Rasa Percaya Terhadap Pemerintah Provinsi menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	48
Gambar 3.14.	Rasa Percaya Terhadap Pemerintah Provinsi menurut Keberagaman Tetangga	48
Gambar 3.15.	Rasa Percaya Terhadap Pemerintah Pusat menurut Provinsi	49
Gambar 3.16.	Rasa Percaya Terhadap Pemerintah Pusat menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	50
Gambar 3.17.	Rasa Percaya Terhadap Pemerintah Pusat menurut Pendapatan Rumah Tangga.....	50
Gambar 3.18.	Rasa Percaya Terhadap Pemerintah Pusat menurut Keberagaman Tetangga	51
Gambar 3.19.	Rasa Percaya Terhadap Proses Pemilu menurut Provinsi.....	52
Gambar 3.20.	Rasa Percaya Terhadap Proses Pemilu menurut Klasifikasi Wilayah.....	52
Gambar 3.21.	Rasa Percaya Terhadap Proses Pemilu menurut Pendapatan Rumah Tangga	53
Gambar 3.22.	Rasa Percaya Terhadap Proses Pemilu menurut Keberagaman Tetangga	53
Gambar 3.23.	Rasa Percaya Terhadap Pejabat Terpilih Hasil Pemilu menurut Provinsi.....	54
Gambar 3.24.	Rasa Percaya Terhadap Pejabat Terpilih Hasil Pemilu menurut Klasifikasi Wilayah.....	55
Gambar 3.25.	Rasa Percaya Terhadap Pejabat Terpilih Hasil Pemilu menurut Pendapatan Rumah Tangga	55
Gambar 3.26.	Rasa Percaya Terhadap Pejabat Terpilih Hasil Pemilu menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	56
Gambar 3.27.	Rasa Percaya Terhadap Pejabat Terpilih Hasil Pemilu menurut Keberagaman Tetangga.....	56
Gambar 3.28.	Rasa Percaya Terhadap Aparat Penegak Hukum (Polri) menurut Provinsi.....	57
Gambar 3.29.	Rasa Percaya Terhadap Aparat Penegak Hukum (Polri) menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	57

Gambar 3.30.	Rasa Percaya Terhadap Aparat Penegak Hukum (Polri) menurut Pendapatan Rumah Tangga	58
Gambar 3.31.	Rasa Percaya Terhadap Aparat Penegak Hukum (Polri) menurut Keberagaman Tetangga.....	58
Gambar 4.1.	Partisipasi Sosial dalam Aktivitas Kerja Bakti/Gotong Royong menurut Klasifikasi Wilayah	67
Gambar 4.2.	Partisipasi Sosial dalam Aktivitas Kerja Bakti/Gotong Royong menurut Keberagaman Tetangga	68
Gambar 4.3.	Partisipasi Sosial saat Ada Kejadian Kematian menurut Kelompok Umur	69
Gambar 4.4.	Partisipasi Sosial saat Ada Kejadian Kematian menurut Keberagaman Tetangga.....	70
Gambar 4.5.	Partisipasi Sosial dalam Pertemuan Warga menurut Jenis Kelamin.....	71
Gambar 4.6.	Partisipasi Sosial dalam Pertemuan Warga menurut Keberagaman Tetangga	72
Gambar 4.7.	Partisipasi Sosial dalam Kepanitiaan Acara menurut Status Perkawinan.....	73
Gambar 4.8.	Partisipasi Sosial dalam Kepanitiaan Acara menurut Keberagaman Tetangga	73
Gambar 4.9.	Partisipasi Sosial dalam Menghormati Hasil Musyawarah menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	74
Gambar 4.10.	Partisipasi Sosial dalam Menghormati Hasil Musyawarah menurut Keberagaman Tetangga.....	75
Gambar 4.11.	Partisipasi Sosial dalam Kegiatan Penggalangan Dana untuk Korban Bencana Alam menurut Pendapatan Rumah Tangga.....	76
Gambar 4.12.	Partisipasi Sosial dalam Kegiatan Penggalangan Dana untuk Korban Bencana Alam menurut Keberagaman Tetangga	77
Gambar 4.13.	Partisipasi Sosial sebagai Responden dalam Sebuah Survei Pemerintah menurut Klasifikasi Wilayah.....	78
Gambar 4.14.	Partisipasi Sosial sebagai Responden dalam Sebuah Survei Pemerintah menurut Keberagaman Tetangga.....	79
Gambar 4.15.	Partisipasi Sosial Terhadap Aksi Solidaritas untuk Kepentingan Publik menurut Klasifikasi Wilayah.....	80

Gambar 4.16.	Partisipasi Sosial Terhadap Aksi Solidaritas untuk Kepentingan Publik menurut Keberagaman Tetangga	81
Gambar 4.17.	Partisipasi Sosial dalam Kegiatan Pemilu/Pilkada menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	82
Gambar 4.18.	Partisipasi Sosial dalam Kegiatan Pemilu/Pilkada menurut Keberagaman Tetangga.....	82
Gambar 4.19.	Partisipasi Sosial Terhadap Program Nasional Vaksinasi Covid-19 menurut Klasifikasi Wilayah	83
Gambar 4.20.	Partisipasi Sosial Terhadap Program Nasional Vaksinasi Covid-19 menurut Keberagaman Tetangga	84
Gambar 5.1.	Persepsi Terhadap Pembatasan Pelaksanaan Ajaran Agama Orang Lain yang Minoritas menurut Klasifikasi Wilayah	91
Gambar 5.2.	Persepsi Terhadap Pembatasan Pelaksanaan Ajaran Agama Orang Lain yang Minoritas menurut Keberagaman Tetangga.....	92
Gambar 5.3.	Persepsi Terhadap Pembangunan Sewajarnya Berpihak pada Kelompok Agama Mayoritas menurut Klasifikasi Wilayah.....	93
Gambar 5.4.	Persepsi Terhadap Pembangunan Sewajarnya Berpihak pada Kelompok Agama Mayoritas menurut Keberagaman Tetangga	94
Gambar 5.5.	Persepsi Cenderung Hanya Berteman Baik dengan Orang yang Satu Suku menurut Klasifikasi Wilayah.....	95
Gambar 5.6.	Persepsi Cenderung Hanya Berteman Baik dengan Orang yang Satu Suku menurut Keberagaman Tetangga.....	96
Gambar 5.7.	Persepsi Terhadap Pembangunan Sewajarnya Berpihak pada Masyarakat Pribumi menurut Klasifikasi Wilayah.....	97
Gambar 5.8.	Persepsi Terhadap Pembangunan Sewajarnya Berpihak pada Masyarakat Pribumi menurut Keberagaman Tetangga.....	98
Gambar 5.9.	Persepsi Terhadap Kecenderungan Tidak Suka pada Orang yang Membantah Pendapat Responden menurut Klasifikasi Wilayah.....	99
Gambar 5.10.	Persepsi Terhadap Kecenderungan Tidak Suka pada Orang yang Membantah Pendapat Responden menurut Keberagaman Tetangga	100
Gambar 6.1.	Indeks Modal Sosial menurut Dimensi	103
Gambar 6.2.	Indeks Modal Sosial menurut Klasifikasi Wilayah.....	104
Gambar 6.3.	Indeks Modal Sosial menurut Jenis Kelamin	104
Gambar 6.4.	Indeks Modal Sosial menurut Status Perkawinan.....	105

Gambar 6.5.	Indeks Modal Sosial menurut Kelompok Umur	106
Gambar 6.6.	Indeks Modal Sosial menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	107
Gambar 6.7.	Indeks Modal Sosial menurut Pendapatan Rumah Tangga.....	107

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Indikator Rasa Saling Percaya di Ranah Kewargaan (Lokal) menurut Karakteristik, 2021	117
Lampiran 2.	Indikator Rasa Saling Percaya di Ranah Instiusional (Global) menurut Karakteristik, 2021	118
Lampiran 3.	Indikator Rasa Saling Percaya di Ranah Kewargaan (Lokal) menurut Karakteristik, 2021 (lanjutan)	119
Lampiran 4.	Indikator Rasa Saling Percaya di Ranah Instiusional (Global) menurut Karakteristik, 2021 (lanjutan).....	119
Lampiran 5.	Indikator Partisipasi Sosial di Ranah Kewargaan (Lokal) menurut Karakteristik, 2021	120
Lampiran 6.	Indikator Partisipasi Sosial di Ranah Instiusional (Global) menurut Karakteristik, 2021	121
Lampiran 7.	Indikator Partisipasi Sosial di Ranah Kewargaan (Lokal) menurut Karakteristik, 2021 (lanjutan)	122
Lampiran 8.	Indikator Partisipasi Sosial di Ranah Instiusional (Global) menurut Karakteristik, 2021 (lanjutan)	122
Lampiran 9.	Indikator Toleransi menurut Karakteristik, 2021.....	123
Lampiran 10.	Indikator Rasa Saling Percaya di Ranah Kewargaan (Lokal) menurut Provinsi, 2021.....	125
Lampiran 11.	Indikator Rasa Saling Percaya di Ranah Instiusional (Global) menurut Provinsi, 2021	126
Lampiran 12.	Indikator Partisipasi Sosial di Ranah Kewargaan (Lokal) menurut Provinsi, 2021.....	127
Lampiran 13.	Indikator Partisipasi Sosial di Ranah Instiusional (Global) menurut Provinsi, 2021.....	128
Lampiran 14.	Indikator Toleransi menurut Provinsi, 2021.....	129
Lampiran 15.	Indeks Modal Sosial dan Indeks Dimensi Penyusun Indeks Modal Sosial menurut Karakteristik, 2021	130
Lampiran 16.	Indeks Modal Sosial dan Indeks Dimensi Penyusun Indeks Modal Sosial menurut Provinsi, 2021	131
Lampiran 17.	Perkiraan Kesalahan Sampling Indeks Modal Sosial menurut Provinsi, 2021.....	132



Lampiran 18.	Perkiraan Kesalahan Sampling Indeks Dimensi Rasa Percaya menurut Provinsi, 2021	133
Lampiran 19.	Perkiraan Kesalahan Sampling Indeks Dimensi Partisipasi Sosial menurut Provinsi, 2021	134
Lampiran 20.	Perkiraan Kesalahan Sampling Indeks Dimensi Toleransi menurut Provinsi, 2021	135
Lampiran 21.	Perkiraan Kesalahan Sampling Indeks Modal Sosial menurut Karakteristik, 2021.....	136
Lampiran 22.	Perkiraan Kesalahan Sampling Indeks Dimensi Rasa Percaya menurut Karakteristik, 2021	137
Lampiran 23.	Perkiraan Kesalahan Sampling Indeks Dimensi Partisipasi Sosial menurut Karakteristik, 2021	138
Lampiran 24.	Perkiraan Kesalahan Sampling Indeks Dimensi Toleransi menurut Karakteristik, 2021.....	139

<https://www.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

<https://www.bps.go.id>



Modal Sosial

Apa itu Modal Sosial??



Konsep Modal Sosial

Modal sosial didefinisikan sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk mencapai kesejahteraan bersama (Cox, 1995). Tidak hanya itu, Fukuyama (1995; 2003) menekankan modal sosial pada dimensi yang lebih luas, yaitu segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, dan di dalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi.

Bagaimana Mengukur Modal Sosial?

Pengukuran Indeks Modal Sosial sudah dilakukan sejak 2007 hingga 2021 dengan dimensi yang bervariasi. Pada tahun 2021, Indeks Modal Sosial diukur dari tiga dimensi yaitu rasa percaya, partisipasi sosial, dan toleransi menggunakan data Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2021.

Dimensi Penyusun Indeks Modal Sosial



Rasa percaya



Partisipasi sosial



Toleransi

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 1600 an, ahli ekonomi-politik Inggris William Petty melakukan survei pertama mengenai kesejahteraan nasional dengan menganalisis secara sistematis nilai tanah taklukan Oliver Cromwell di Irlandia. Selama bertahun-tahun Petty bekerja merancang rumus matematis untuk mengukur bukan hanya nilai tanah tetapi sekaligus juga tenaga kerja. Ia bermaksud menciptakan sistem penghitungan yang bisa digunakan pemerintah seraya memperkuat pertumbuhan ekonomi Inggris modern¹. Inilah cikal-bakal pengukuran Produk Domestik Bruto (PDB) yang hingga saat ini menjadi salah satu indikator kesejahteraan dan kemajuan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Adam Smith dalam karya terkenalnya *The Wealth of Nations* berteori bahwa dalam ekonomi kapitalisme, akumulasi kekayaan alam harus terjadi dulu sebelum pembagian kerja². Menurut Smith (1776), kekayaan bangsa-bangsa dihasilkan oleh kerja produktif setiap individu. Smith berpendapat bahwa pendapatan sebuah negara dihasilkan oleh seluruh hasil tahunan dari tanah dan tenaga kerja³. Smith berpandangan bahwa *Wealth of Nations* akan tercapai bila sistem produksi, sistem distribusi, dan pertukaran (*exchange*) berjalan dengan baik.

Selama berabad-abad pengukuran mengenai kesejahteraan selalu mengacu pada indikator-indikator yang berkaitan dengan proses ekonomi. Pasar persaingan sempurna (*invisible hand*) dari Adam Smith, misalnya, pada masanya dipercaya sebagai sebuah teori pamungkas mengenai bagaimana kesejahteraan bekerja. Demikian pula dengan PDB. Hingga hari ini PDB tetap menjadi salah satu parameter penting untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Namun demikian, berbagai teori kesejahteraan tersebut dalam perjalanannya tak mampu menjelaskan fenomena “baru” yang belakangan muncul sebagai akibat dari berkembangnya perilaku individu serta terjadinya perubahan sosial. Klaim pasar persaingan sempurna, misalnya, ia tak dapat menjelaskan manakala manusia mulai mengenal praktik monopoli, juga oligopoli. Bandul *equilibrium* tak mampu secara otomatis kembali ke titik keseimbangan sempurnanya. Demikian pula dengan PDB sebagai perlambang kesejahteraan suatu wilayah. Hal tersebut tak sepenuhnya berlaku manakala yang terjadi adalah pertumbuhan PDB semu. Sebuah situasi di mana wilayah yang bersangkutan hanya “dipinjam rahimnya” untuk tumbuh-kembang produk dan jasa. Sementara nilai tambah yang dihasilkan dari komoditas, serta pemanfaatan tenaga kerja, tidak sepenuhnya kembali ke daerah tersebut.

Kelemahan mendasar dari pengukuran kesejahteraan yang mengacu pada proses ekonomi itu adalah diabaikannya fakta penting bahwa manusia adalah subjek utama dari narasi kesejahteraan tersebut. Perilaku manusia sebagai individu terus berkembang, beradaptasi seiring perubahan alamiah dan perubahan sosial yang terjadi. Manusia adalah makhluk rasional. Tepatnya, manusia adalah individu-individu yang diasumsikan sebagai “*goal seeking and choosing creatures*” yang beroperasi di

¹ Lorenzo Fioramonti, *Problem Produk Domestik Bruto: Sejarah dan Realitas Politik di Balik Angka Pertumbuhan Ekonomi (Gross Domestic Problem: The Politics Behind the World's Most Powerful Number)*, Terjemahan Lita Soerjadiinata. Tangerang Selatan: CV Marjin Kiri, 2017, hal 4-5.

² Saturnino M Borras Jr, Marc Edelman, Cristobal Kay, ed. *Gerakan-Gerakan Agraria Transnasional (Transnational Agrarian Movement)*, Terjemahan Vica Tri Septianty. Yogyakarta: INSISTPress, 2017, hal vii

³ Lorenzo Fioramonti, Op. Cit., h. 5-6.

lingkungan yang berbeda-beda. Aktor individu diasumsikan mempunyai sifat-sifat khusus yang spesifik, termasuk di dalamnya seperangkat selera atau perangkingan preferensi dan kemampuan mengambil keputusan secara rasional atau kemampuan memilih alternatif terbaik yang paling efisien dari berbagai pilihan yang ada⁴. Dalam teori ekonomi politik neo-klasik, individu memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka, di mana kesejahteraan ini didefinisikan berdasarkan peringkat keinginan mereka⁵. Kaum klasik mengembangkan asumsi manusia rasional yang selalu berusaha memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia.

Rasionalitas manusia yang terus berkembang serta beradaptasi itu menjadi salah satu determinan penting mengapa berbagai pengukuran kesejahteraan dan indikator pembangunan, yang memosisikan faktor manusia "hanya" sebagai objek, tak mampu menjelaskan semua fenomena yang terjadi. Suatu wilayah dengan PDB tinggi, misalnya, tak selalu linier dengan tingginya kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Guna melengkapi analisis yang belum menjelaskan dari berbagai pengukuran yang telah ada itu, para ahli mulai mengembangkan beberapa pengukuran baru yang memosisikan manusia dan perilakunya sebagai fokus utama studi tersebut, salah satunya adalah pengukuran modal sosial.

Istilah modal sosial dikemukakan pertamakali oleh Hanifan (1916) yang meneliti sebab-sebab keberhasilan seorang kepala sekolah dalam mengembangkan pendidikan di Amerika Serikat. Kepala sekolah ini bisa sukses karena dia mempunyai modal sosial yang cukup. Modal sosial, seperti ditulis Hanifan dalam buku berjudul *The Rural School Community Centre*, bukanlah kekayaan atau uang, tetapi berupa kemauan baik, rasa bersahabat dan kerjasama erat yang membentuk kelompok sosial, baik di dalam sekolah maupun lingkungan sekitar sekolah. Hasilnya, kemajuan tidak hanya dicapai oleh anak didik dalam bidang akademik tetapi juga oleh warga di sekitar sekolah dalam berbagai aspek kehidupan. Sayangnya istilah modal sosial kemudian dilupakan orang selama 70 tahun. Baru pada dua dekade terakhir ini, konsep modal sosial menjadi pembicaraan hangat, ketika Bourdieu (1986) membuat tulisan berjudul *The Forms of Capital*. Bourdieu menyatakan bahwa struktur dan fungsi sosial hanya bisa dipahami lewat modal sosial, di samping juga modal ekonomi. Pada setiap transaksi ekonomi yang bersifat material selalu disertai transaksi non-ekonomi yang bersifat immaterial berbentuk modal sosial, yaitu berupa hubungan interpersonal di antara pelaku transaksi, misalnya, hubungan antara tenaga penjualan dengan konsumen. Selain itu, perbedaan modal ekonomi dan modal sosial terlihat pada konversi. Modal ekonomi mudah dikonversi dalam bentuk uang atau pemilikan. Modal sosial (seperti gelar pendidikan) bisa juga dikonversi menjadi modal ekonomi (nilai jual ekonomi)⁶.

Selanjutnya, Coleman (1988) membuat tulisan dengan judul *Social Capital in The Creation of Human Capital*. Coleman menganalisis proses sosial dengan menggunakan teori pilihan rasional yang sarat dengan prinsip ekonomi. Kesimpulannya, modal sosial berperan menciptakan modal manusia. Jadi, modal sosial bersifat produktif. Tanpa modal sosial, seseorang tidak mungkin memperoleh keuntungan material atau keberhasilan

4 Deliamov, *Ekonomi Politik*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006, h.132.

5 James A Caporaso dan David P Levine, *Teori-Teori Ekonomi Politik (Theories Of Political Economy)*, Terjemahan Suraji. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996,h.125.

6 Santoso, Thomas, *Memahami Modal Sosial*, Surabaya: Pustaka Saga, 2020, h.1-2.

yang optimal. Namun, modal sosial hanya memberi manfaat pada situasi tertentu saja. Contoh kerjasama yang positif dengan seorang pejabat merupakan modal sosial ketika yang bersangkutan berkuasa, tapi bisa juga terjadi sebaliknya. Sementara itu, Fukuyama (1995) dalam buku *Trust: The Social Virtues and The Creations of Prosperity*, menyatakan bahwa kondisi kesejahteraan, demokrasi dan daya saing suatu masyarakat ditentukan oleh tingkat kepercayaan antara sesama warga. Tingkat kepercayaan bertalian dengan akar budaya, etika dan moral, yang diwujudkan dalam perilaku saling bantu dan kerjasama. Keberhasilan ekonomi suatu negara bangsa setara dengan perpaduan yang harmonis antara organisasi ekonomi skala besar, korporasi yang demokratis, dan nilai budaya seperti resiprositas, tanggungjawab moral dan kepercayaan⁷.

Modal sosial mencapai puncak ketenarannya ketika Putnam (2000) menulis bukunya yang monumental berjudul *Bowling Alone: America's Declining Social Capital*. Lewat *Bowling Alone*, Putnam telah memukul syaraf yang amat penting dan amat peka tentang kemerosotan partisipasi warga di Amerika Serikat akibat hancurnya kepercayaan terhadap penguasa publik⁸.

Pada kasus lainnya, sekelompok ilmuwan ekonomi, para perencana dan para praktisi pembangunan dibuat kaget dan gelisah mengamati hasil hasil pembangunan yang dicapai. Stimulus pembangunan antar wilayah diberikan dengan takaran yang cenderung sama, tetapi hasilnya sering kali jauh berbeda. Kondisi masyarakat di satu wilayah tetap miskin, sementara di wilayah yang lain mengalami peningkatan kesejahteraan yang cukup pesat. Selama ini kajian-kajian penyebab terjadinya disparitas tersebut diarahkan pada varian *human capital* yang ada di setiap wilayah, korupsi dan beberapa faktor yang lain, tetapi mengabaikan adanya varian kultural yang direfleksikan oleh adanya variasi-variasi pada konfigurasi dan tipologi modal sosialnya⁹.

1.2. Kilas Balik Pengukuran Modal Sosial

Kajian khusus mengenai modal sosial yang dilakukan dalam skala besar belum pernah dilakukan di Indonesia. Hingga saat ini, belum ada satu survei, kajian, maupun diskusi yang sungguh-sungguh dan berskala luas yang pernah dilaksanakan, baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga penelitian swasta. Kajian modal sosial yang selama ini dilakukan, cenderung mengarah ke situasi hipotesis yang berasal dari pengamatan keseharian perilaku sosial masyarakat. Belum ada satu sumber informasi pun yang dapat dijadikan rujukan mengenai situasi dan perkembangan modal sosial yang terukur. Selain wacana tentang rasa saling percaya (*trust*) yang diangkat ke permukaan oleh beberapa pengamat sosial, elemen-elemen lain masih dirasakan sangat asing dan belum pernah secara sungguh-sungguh diangkat sebagai bagian dari unsur modal sosial yang perlu ditelaah lebih jauh. Demi mengisi kekosongan tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) mengambil inisiatif untuk menyusun pengukuran modal sosial di Indonesia. Titik pijak pertama inisiatif tersebut dimulai pada tahun 2005.

7 Santoso, Thomas, Op. Cit., h.2-3.

8 Santoso, Thomas, Op. Cit., h.3.

9 Midayanti, Nurma, Dkk, Studi Modal Sosial 2006, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2006, h.27.

1.2.1 Studi Modal Sosial 2005 dan 2006

Studi modal sosial yang dilaksanakan BPS pada tahun 2005 dan 2006 bertujuan untuk mengkaji kelayakan variabel yang secara teoritis merupakan determinan modal sosial. Kelayakan yang dimaksud dilihat dari sisi kemungkinan variabel/pertanyaan tersebut dapat dioperasionalkan di lapangan dengan unit analisis adalah rumah tangga dan kemungkinan dapat diperolehnya suatu jawaban yang sesuai dengan pengetahuan lokal tentang kecenderungan sosial di suatu wilayah. Pengertian layak tidaknya variabel dimaksud ditentukan oleh penilaian kualitatif baik yang menyangkut kemudahan mengoperasionalkannya di lapangan, maupun adanya pola dan kecenderungan sosial yang dihasilkannya.

Disamping tujuan utama tersebut, studi ini juga berusaha menemukan pola-pola dan kecenderungan dari setiap komponen modal sosial, serta orientasi jaringan sosial. Hasil studi ini diharapkan akan memberikan gambaran sementara tentang spektrum modal sosial yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini masih bersifat eksploratif, sehingga belum ada hipotesis yang dibuat; justru kecenderungan yang diperoleh dari lapangan akan menjadi hipotesis bagi studi selanjutnya.

Studi modal sosial 2005 melibatkan 950 rumah tangga yang tersebar di 19 kabupaten/kota pada 10 provinsi untuk mempelajari modal sosial yang melekat pada beberapa suku bangsa antara lain: Batak, Minang, Palembang, Sunda, Jawa, Sasak, Dayak, Bugis dan Minahasa. Sebaliknya pada tahun 2006 hanya melibatkan 360 rumah tangga yang tersebar di 3 (tiga) Provinsi untuk mempelajari modal sosial bagi suku bangsa Dayak dan Kaili.

Studi yang dilakukan pada tahun 2006 ini, difokuskan pada upaya mengoperasionalkan komponen-komponen utama modal sosial, yang terdiri dari:

1. Partisipasi sosial dan keterlibatan dalam komunitas
2. Rasa percaya pada sesama manusia dan pada institusi
3. Jaringan sosial dan struktur pemberian dukungan
4. Toleransi pada kebhinekaan dan eksternalitas.

Pada kerangka pikir studi modal sosial 2006, dijelaskan bahwa modal sosial merupakan bagian dari modal komunitas. Seperti diketahui terdapat beberapa bentuk modal lain yang sudah cukup dikenal selama ini, yaitu modal manusia (*Human Capital*), modal/sumber daya alam (*Natural Capital*) dan *Financial/Built/Produced Economic Capital*. Modal manusia merupakan kemampuan personal yang termasuk pembedolam, pengetahuan, kesehatan, keahlian dan keadaan terkait lainnya. Selain itu *Modal Produced Economic* berupa aset ekonomi, sumberdaya dan aset finansial. Sementara itu modal natural misalkan sinar matahari, cuaca, air, flora dan fauna, sumber energi, tanah dll. Selain itu modal sosial adalah norma/nilai (*trust reciprocity*, norma sosial lainnya), partisipasi dalam jaringan, dan *proactivity*. Selain itu dijelaskan pula unsur-unsur utama yang menopang modal sosial yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun oleh

faktor-faktor eksternal kebudayaan. Faktor internal berupa pola organisasi sosial yang tumbuh dalam suatu setting kebudayaan masyarakat lokal seperti tatanan sosial yang berhubungan dengan kepercayaan tradisional, pola-pola pembagian kekuasaan dalam masyarakat, pola/sistem produksi dan reproduksi serta nilai-nilai dan norma itu sendiri. Faktor yang lebih luas yang diklasifikasikan sebagai faktor eksternal seperti pengaruh agama, globalisasi, urbanisasi, kebijakan pemerintah, hukum dan perundang-undangan, ekspansi pendidikan, politik dan pemerintahan serta nilai-nilai universal seperti nilai demokrasi, persamaan, kebebasan dan keadaban merupakan kumpulan determinan yang saling pengaruh mempengaruhi dengan unsur-unsur pokok modal sosial.

1.2.2 Studi Modal Sosial 2007

Badan Pusat Statistik kembali melaksanakan kegiatan survei modal sosial dan kerawanan sosial pada tahun 2007. Wilayah survei mencakup 10 ibukota provinsi yaitu: Medan, Padang, Bandung, Semarang, Surabaya, Serang, Mataram, Banjarmasin, Samarinda dan Makassar. Total jumlah sampel pada survei ini sebanyak 5.000 rumah tangga. Survei ini dilaksanakan untuk melakukan beberapa hal terkait modal sosial. Pertama, menguji tingkat representasi pertanyaan (variabel) terhadap dimensi modal sosial. Kedua, mendapatkan gambaran umum terkait: partisipasi dan kohesivitas sosial, jejaring sosial, serta nilai dan norma sosial yang melekat pada masyarakat yang menjadi target survei. Selain bertujuan untuk menggambarkan kecenderungan modal sosial di 10 ibukota provinsi yang menjadi sampel, survei ini juga dimaksudkan untuk menyediakan data mentah bagi pengembangan penelitian modal sosial dalam skala yang lebih besar.

Pertanyaan (variabel) yang digunakan pada survei ini serupa dengan studi modal sosial 2005 dan 2006. Namun demikian, pertanyaan yang digunakan dalam survei tahun 2007 ini telah banyak mengalami penyempurnaan dibanding studi modal sosial sebelumnya dan telah mengacu pada berbagai penelitian serupa di banyak negara. Dengan demikian, struktur pertanyaan (variabel) modal sosial yang digunakan pada survei modal sosial 2007 diharapkan telah sesuai dan relevan bagi penelitian modal sosial dengan sampel berskala besar.

1.2.3 Studi Modal Sosial 2009

Studi modal sosial yang dilakukan pada tahun 2009 adalah bertujuan untuk menghasilkan instrumen terkait modal sosial yang shahih dan terpercaya dalam rangka mengukur stok modal sosial. Secara khusus, studi modal sosial 2009 direncanakan untuk menghasilkan sejumlah pertanyaan yang mampu secara shahih dan terpercaya mengukur stok modal sosial. Secara khusus, studi modal sosial 2009 direncanakan untuk menghasilkan sejumlah pertanyaan yang mampu mengukur stok modal sosial untuk disisipkan dalam kegiatan Susenas. Dengan tersedianya pertanyaan terkait modal sosial, maka data modal sosial dapat dikumpulkan secara rutin bersama dengan

data sosial ekonomi lainnya.

Wilayah studi modal sosial 2009 mencakup 12 (dua belas) provinsi yaitu: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara. Target sampel dalam kegiatan ini adalah sebanyak 6.000 rumah tangga yang tersebar di 48 kabupaten/kota, 96 kecamatan, dan 384 desa. Dengan cakupan sampel tersebut, maka diharapkan studi ini mampu memberikan rekomendasi penting mengenai metodologi dan susunan instrumen modal sosial bagi pengembangan survei modal sosial dan penyusunan publikasi stok modal sosial pada tahun 2010.

Studi modal sosial 2009 mengukur modal sosial pada dua level unit analisis antara lain: (a) level mikro meliputi individu, rumah tangga/keluarga, atau tetangga yang membentuk interaksi sosial, (b) level meso meliputi institusi lokal yang menggambarkan peran institusi, penegakan hukum dan pemerintahan. Kedua level unit analisis tersebut dipilih untuk evaluasi konsistensi penilaian validitas dan reliabilitas instrumen modal sosial menurut perspektif responden yang berbeda level. Responden rumah tangga memberikan penilaian terhadap modal sosial yang melekat pada rumah tangga tersebut, sebaliknya responden narasumber memberikan penilaian terhadap modal sosial semua rumah tangga yang ada di desa/komunitas setempat. Dalam konteks ini, narasumber lebih berfungsi sebagai validator bagi semua responden rumah tangga di desa/komunitas setempat. Kuesioner untuk responden rumah tangga didisain untuk mencakup dan mengeksplorasi aspek multidimensionalitas modal sosial dan merupakan hasil adaptasi terhadap instrumen studi modal sosial Bank Dunia. Pertanyaan yang digunakan mencakup tiga dimensi modal sosial antara lain:

1. Dimensi input meliputi: kelompok dan jejaring (*groups and networks*), dan sikap percaya dan toleransi (*trust and tolerance*)
2. Dimensi operasional meliputi: gotong royong dan kerjasama (*collective action and cooperation*)
3. Dimensi area penerapan meliputi: keeratan sosial dan kebersamaan (*social cohesion and inclusion*), dan pemberdayaan (*empowerment*)

Sementara itu, kuesioner untuk narasumber didisain untuk keperluan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan para narasumber yang dianggap mengerti benar kondisi sosial masyarakat di desa/komunitas setempat. Narasumber terpilih meliputi: pengurus institusi lokal, tokoh masyarakat lokal, dan aparatur pemerintah desa. Informasi yang didapatkan dari narasumber mencakup: (1) gambaran detail mengenai keadaan modal sosial masyarakat yang dicerminkan oleh berbagai persepsi rumah tangga di komunitas setempat, (2) informasi lain terkait dimensi modal sosial di masyarakat yang sulit diungkap melalui pendekatan rumah tangga.

1.2.4 Studi Modal Sosial 2014

Pada tahun 2014, dimensi dan indikator tersebut pada dasarnya tidak mengalami perubahan dari perhitungan Indeks Modal Sosial Tahun 2014. Perhitungan tetap menggunakan 3 dimensi yang terdiri dari 7 sub-dimensi dan 24 indikator (variabel) yang secara substansi menggambarkan besarnya modal sosial penduduk. Dimensi terdiri dari Sikap percaya dan Toleransi yang terdiri dari Sikap Percaya, Toleransi Agama dan Toleransi Suku. Aksi Bersama terdiri dari Resiprositas dan Aksi Bersama, serta Kelompok dan Jejaring terdiri dari Partisipasi dalam kelompok dan Jejaring.

1.2.5 Studi Modal Sosial 2017

Indeks Modal Sosial Tahun 2017 diukur berdasarkan data hasil Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) tahun 2017 yang dilaksanakan secara serentak di kabupaten/kota terpilih sebagai lokasi sampel yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Unit analisis adalah rumah tangga yang dipilih secara acak (random). Total sampel rumah tangga sebanyak kurang lebih 75.000 rumah tangga sehingga dapat dilakukan estimasi hingga level provinsi. Sebaran sampel dialokasikan pada setiap wilayah pendataan sedemikian sehingga mampu merepresentasikan kondisi sosial ekonomi rumah tangga setiap provinsi.

Pada Tahun 2017, Badan Pusat Statistik dalam hal ini melakukan pengukuran modal sosial dengan berfokus pada level mikro, mengadaptasi dari rujukan modal sosial oleh Grootaert (2002), namun pengembangan modal sosial BPS tetap berlandaskan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, dengan mengadakan survei yang dilaksanakan berbasis rumah tangga. Dimensi modal sosial yang dikembangkan oleh BPS mencakup 3 dimensi yaitu:

1. Sikap percaya dan kepatuhan terhadap norma merupakan modal sosial kognitif yang membutuhkan persepsi dan pengalaman responden terkait perilaku yang memerlukan sikap percaya.
2. Keanggotaan dalam perkumpulan dan jejaring merupakan indikator modal sosial struktural yang meliputi banyaknya anggotanya, keragaman internal anggota, dan manajemen perkumpulan seperti pengambilan keputusan yang demokratis.
3. Aksi bersama mencakup berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang. Indikator ini mengukur sejauh mana kegiatan bersama tersebut menjadi dasar dari kohesi sosial.

Selanjutnya, secara umum dapat dijelaskan bahwa dimensi sikap percaya dan toleransi terdiri dari sub-dimensi sikap percaya (5 indikator), toleransi agama (4 indikator), dan toleransi suku (3 indikator). Dimensi aksi bersama dan resiprositas terdiri dari sub-dimensi aksi bersama (4 indikator) dan resiprositas 2 indikator). Dimensi



Pendahuluan

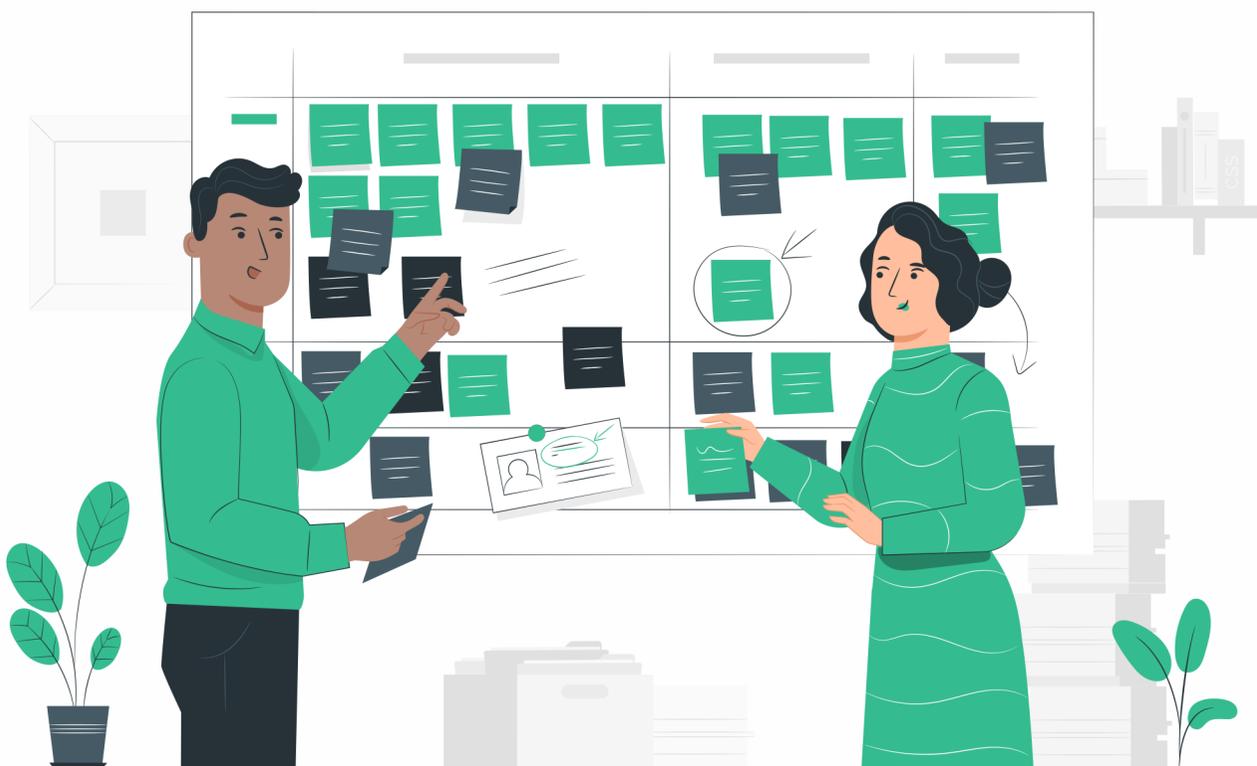
kelompok dan jejaring terdiri dari sub-dimensi kelompok (4 indikator), dan jejaring (2 indikator). Pada dasarnya dimensi dan indikator penyusunan Indeks Modal Sosial Tahun 2017 tidak mengalami perubahan dari Tahun 2014, yaitu terdiri dari 3 dimensi, 7 sub-dimensi dan 24 indikator.

<https://www.bps.go.id>

BAB II

METODOLOGI

<https://www.bps.go.id>



2.1. Kajian Teoritis Modal Sosial

Modal Sosial adalah sumber daya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Seperti diketahui bahwa sesuatu yang disebut sumber daya (*resources*) adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi, disimpan dan diinvestasikan. Sumber daya yang digunakan untuk investasi disebut sebagai modal. Dimensi modal sosial cukup luas dan kompleks. Modal sosial berbeda dengan istilah populer lainnya yaitu modal manusia (*human capital*). Pada modal manusia, lebih merujuk ke dimensi individual yaitu daya dan keahlian yang dimiliki oleh seorang individu. Pada modal sosial, lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antar individu dalam suatu kelompok dan antar kelompok dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan antar sesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok¹.

Modal sosial juga sangat dekat dengan terminologi sosial lainnya seperti yang dikenal sebagai kebajikan sosial (*social virtue*). Perbedaan keduanya terletak pada dimensi jaringan. Kebajikan sosial akan sangat kuat dan berpengaruh jika di dalamnya melekat perasaan keterikatan untuk saling berhubungan yang bersifat timbal balik dalam suatu bentuk hubungan sosial. Putnam (2000) memberikan proposisi bahwa suatu entitas masyarakat yang memiliki kebajikan sosial yang tinggi, tetapi hidup secara sosial terisolasi akan dipandang sebagai masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang rendah².

Collin (1981) melakukan kajian tentang apa yang dia sebut sebagai fenomena mikro dari interaksi sosial yaitu norma dan jaringan (*the norms and networks*) yang sangat berpengaruh pada kehidupan organisasi sosial. Norma yang terbentuk dari berulangnya pola pergaulan keseharian akan menciptakan aturan-aturan tersendiri dalam suatu masyarakat. Aturan yang terbentuk tersebut kemudian akan menjadi dasar yang kuat dalam setiap proses transaksi sosial, dan akan sangat membantu menjadikan berbagai urusan sosial lebih efisien. Ketika norma ini kemudian menjadi norma asosiasi atau norma kelompok, akan sangat banyak manfaatnya dan menguntungkan kehidupan institusi sosial tersebut. Kekuatan-kekuatan sosial dalam melakukan interaksi antar kelompok akan terbentuk. Pada akhirnya mempermudah upaya mencapai kemajuan bersama³.

Bank Dunia (1999) mendefinisikan modal sosial sebagai sesuatu yang merujuk ke dimensi institusional, hubungan-hubungan yang tercipta, dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Modal sosial bukan sekadar deretan jumlah institusi atau kelompok yang menopang (*underpinning*) kehidupan sosial, melainkan dengan spektrum yang lebih luas, yaitu sebagai perekat (*social glue*) yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama. Cohen dan Prusak (2001) memberikan pengertian bahwa modal sosial sebagai stok dari hubungan yang aktif antar masyarakat. Setiap pola hubungan yang terjadi diikat oleh kepercayaan (*trust*) saling pengertian (*mutual understanding*), dan nilai-nilai bersama

1 Midayanti, Nurma, Dkk., Op.Cit.,h.13.

2 Midayanti, Nurma, Dkk., Op.Cit.,h.13-14.

3 Midayanti, Nurma, Dkk., Op.Cit.,h.14.

(*shared value*) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama dapat dilakukan secara efisien dan efektif⁴.

Cox (1995) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama. Paul Bullen dan Jenny Onix (1998) memberi tambahan bobot terhadap dimensi modal sosial dengan mengatakan bahwa yang sangat penting dari modal sosial adalah kemampuannya sebagai basis sosial untuk membangun masyarakat sipil yang sebenarnya. Tanpa basis sosial yang kuat seperti yang terkandung dalam modal sosial, sebetulnya kehidupan itu sendiri bukanlah kehidupan yang berdimensi kemanusiaan⁵.

Bourdieu (1986), yang pemikirannya banyak dipengaruhi oleh *marxist sociology*, mengemukakan konsep yang sedikit berbeda, terminologi modal sosial menurutnya, memiliki 3 (tiga) bentuk. Pertama, modal ekonomi yang dapat dikaitkan dengan uang atau kepemilikan benda-benda, barang dan sejenisnya yang dapat dipandang dan digunakan bagi keperluan investasi. Kedua, modal kultural yang terinstitusionalisasi dalam bentuk kualifikasi pendidikan, dan yang ketiga, yaitu modal sosial yang terdiri dari kewajiban-kewajiban sosial dan di antaranya terinstitusionalisasikan dalam bentuk kehormatan dan kebangsawanan. Bourdieu sedikit berbeda dengan Putnam, dimana yang disebut pertama menekankan peran individual dan keterikatan sosial yang terorganisir dalam memprediksi kemajuan individu dan tindakan-tindakan kolektif mereka. Putnam lebih mengembangkan pemikirannya pada ide asosiasi dan aktivitas masyarakat sipil sebagai basis bagi terciptanya integrasi sosial dan kesejahteraan⁶.

Salah satu tokoh utama yang sangat berpengaruh dalam pemikiran modal sosial yaitu James Coleman (1990). Atas dasar hasil studinya tentang pemuda dan pendidikan (*youth and schooling*) mendefinisikan konsep modal sosial sebagai varian entitas, terdiri dari beberapa struktur sosial yang memfasilitasi tindakan dari para pelakunya, apakah dalam bentuk personal atau korporasi dalam suatu struktur sosial. Modal sosial menurutnya inheren dalam struktur relasi antar individu. Struktur relasi dan jaringan inilah yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma dan sanksi sosial bagi para anggotanya⁷.

Coleman dan Bourdieu memiliki kesamaan dalam fokus kajian yaitu individual, terutama yang berkaitan dengan peran dan hubungan dengan sesama sebagai unit analisis modal sosial. Formulasi lain tentang konsep modal sosial dikemukakan juga oleh Adlem dan Kwon (2000) yang menyatakan bahwa modal sosial merupakan gambaran dari keterikatan internal yang mewarnai struktur kolektif dan memberikan kohesivitas dan keuntungan-keuntungan bersama dari proses dan dinamika sosial yang terdapat dalam struktur dimaksud⁸.

4 Midayanti, Nurma, Dkk., Op.Cit.,h.14.

5 Midayanti, Nurma, Dkk., Op.Cit.,h.14.

6 Midayanti, Nurma, Dkk., Op.Cit.,h.14-15.

7 Midayanti, Nurma, Dkk., Op.Cit.,h.15.

8 Midayanti, Nurma, Dkk., Op.Cit.,h.15.

Fukuyama (1995; 2003) menekankan pada dimensi yang lebih luas yaitu segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, dan di dalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi. Situasi tersebutlah yang akan menjadi resep kunci bagi keberhasilan pembangunan di segala bidang kehidupan, dan terutama bagi kestabilan pembangunan ekonomi dan demokrasi. Pada masyarakat yang secara tradisional telah terbiasa dengan bergotong royong serta bekerjasama dalam kelompok atau organisasi yang besar cenderung akan merasakan kemajuan dan akan mampu, secara efisien dan efektif, memberikan kontribusi penting bagi kemajuan negara dan masyarakat⁹.

Masing-masing tokoh yang mempopulerkan konsep modal sosial memiliki perbedaan penekanan terhadap unsur-unsur yang membentuknya. Perbedaan tersebut juga dalam hal pendekatan analisis. Tetapi apapun perbedaan tersebut, intinya konsep modal sosial memberikan penekanan pada kebersamaan masyarakat untuk mencapai tujuan memperbaiki kualitas kehidupan dan senantiasa melakukan perubahan dan penyesuaian secara terus menerus. Dalam proses perubahan dan upaya untuk mencapai tujuan, masyarakat senantiasa terikat pada nilai-nilai dan norma yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak dan bertingkah laku serta berhubungan dengan pihak lain. Beberapa acuan nilai dan unsur yang merupakan roh modal sosial antara lain sikap yang partisipatif, sikap yang saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling percaya mempercayai dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma yang mendukungnya. Unsur lain yang memegang peran penting adalah kemauan masyarakat atau kelompok tersebut untuk secara terus menerus proaktif baik dalam mempertahankan nilai, membentuk jaringan-jaringan kerjasama maupun dengan penciptaan kreasi dan ide-ide baru. Inilah jati diri modal sosial yang sebenarnya¹⁰.

2.2. Rumusan Pengukuran Modal Sosial Tahun 2021

Hingga saat ini belum ada rumusan baku modal sosial yang bisa disepakati secara penuh, baik dari sisi konseptual, maupun dari sisi operasionalisasi pengukurannya. Bain dan Hicks (dikutip Krishna dan Shradder dalam Syahra, 2003) mengajukan dua dimensi modal sosial sebagai kerangka konseptual untuk mengembangkan alat pengukur tingkat keberadaan modal sosial. Dimensi pertama yang disebutnya dimensi kognitif, berkaitan dengan nilai-nilai, sikap dan keyakinan yang mempengaruhi kepercayaan, solidaritas dan resiprositas yang mendorong ke arah terciptanya kerjasama dalam masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Setiap kelompok etnik sebenarnya memiliki dimensi kognitif atau bisa juga disebut sebagai dimensi kultural ini, sekalipun dalam kadar yang berbeda. Dimensi kedua modal sosial adalah dimensi struktural, yang berupa susunan, ruang lingkup organisasi dan lembaga-lembaga masyarakat pada tingkat lokal, yang mawadahi dan mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat¹¹.

⁹ Midayanti, Nurma, Dkk., *Op.Cit.*,h.15-16.

¹⁰ Midayanti, Nurma, Dkk., *Op.Cit.*,h.16.

¹¹ Syahra, Rusydi. 2003. "Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi". *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol 5 (1): 1-22

Dalam tulisannya berjudul *The Rural School Community Centre*, Hanifan (1916:130) mengatakan modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta kekayaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti kiasan, namun merupakan aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat. Menurut Hanifan, dalam modal sosial termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial¹².

Pierre Bourdieu, dalam sebuah tulisan yang berjudul *The Forms of Capital* (1986) mengemukakan bahwa untuk dapat memahami struktur dan cara berfungsinya dunia sosial perlu dibahas modal dalam segala bentuknya, tidak cukup hanya membahas modal seperti yang dikenal dalam teori ekonomi. Bertolak dari pola pikir tersebut maka Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai keseluruhan sumber daya baik yang aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap dengan didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui¹³.

Coleman dalam sebuah tulisan yang berjudul *Social Capital in the Creation of Human Capital* (1988) berpendapat bahwa sekalipun sebenarnya terdapat banyak fungsi modal sosial tetapi ia mengatakan bahwa pada dasarnya semuanya memiliki dua unsur yang sama, yakni: pertama, modal sosial mencakup sejumlah aspek dari struktur sosial, dan kedua, modal sosial memberi kemudahan bagi orang untuk melakukan sesuatu dalam kerangka struktur sosial tersebut. Selanjutnya Coleman mengidentifikasi tiga unsur utama yang merupakan pilar modal sosial. Pertama, kewajiban dan harapan yang timbul dari rasa kepercayaan dalam lingkungan sosial. Pilar kedua modal sosial menurut Coleman adalah pentingnya arus informasi yang lancar di dalam struktur sosial untuk mendorong berkembangnya kegiatan dalam masyarakat. Pilar ketiga adalah norma-norma yang harus ditaati dengan sanksi yang jelas dan efektif. Dalam buku *Foundations of Social Theory* (1990), Coleman mengatakan antara lain bahwa modal sosial, seperti halnya modal ekonomi, juga bersifat produktif. Tanpa adanya modal sosial seseorang tidak akan bisa memperoleh keuntungan material dan mencapai keberhasilan lainnya secara optimal¹⁴.

Dalam bukunya *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (1993: 36) Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai ciri-ciri organisasi sosial, seperti jaringan, norma-norma, dan kepercayaan yang memudahkan koordinasi dan kerjasama untuk mendapatkan manfaat bersama¹⁵.

Belum adanya rumusan baku modal sosial yang bisa disepakati secara penuh, baik dari sisi konseptual, maupun dari sisi operasionalisasi pengukurannya itu, tentu saja adalah wujud keterbatasan modal sosial. Akan tetapi di sisi lain hal tersebut juga sangat memungkinkan dimaknai sebagai peluang untuk turut mengambil peran dalam mengembangkan pengukuran modal sosial. Di ranah konseptual, misalnya, lahirnya konsepsi teoritis dalam lingkup ilmu-ilmu sosial dan humaniora tidak pernah berasal dari ruang hampa alam pikir semata. Lahirnya konsepsi teoritis tersebut sangat berkaitan

¹² Syahra, Rusydi. 2003. "Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi". *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol 5 (1): h.2

¹³ Syahra, Rusydi, *Op.Cit.*, h.2.

¹⁴ Syahra, Rusydi., *Op.Cit.*, h.4.

¹⁵ Syahra, Rusydi., *Op.Cit.*, h.5.

erat dengan karakteristik sosiologis, antropologis, dan etnografis di mana konsepsi teoritis tersebut mengemuka untuk kali pertama. Dengan demikian, pada masyarakat dengan karakteristik sosiologis, antropologis, dan etnografis yang berbeda, sangat memungkinkan sebuah konsepsi teoritis untuk dielaborasi lebih lanjut, disesuaikan dengan realitas empirik dari objek penelitian. Di ranah implementatif, operasionalisasi pengukuran akan sangat bergantung pada konsepsi teoritis yang menjadi titik pijaknya. Dengan kalimat lain, kita tidak bisa serta-merta mereplikasi sebuah pengukuran sosial dengan mengabaikan adanya perbedaan karakteristik sosiologis, antropologis, dan etnografis dari masyarakat yang akan diteliti. Maka, penelitian sosial yang sudah pernah dilakukan sebelumnya itu posisinya bukan sebagai alat legitimasi untuk melakukan replikasi, melainkan sebagai bahan rujukan, alat banding (*benchmark*), hingga catatan kaki bagi penelitian yang akan dilakukan.

Dengan paradigma berpikir semacam itulah pengukuran modal sosial dalam publikasi ini dirumuskan. Selanjutnya, kajian-kajian yang telah dilakukan kemudian dijadikan sebagai titik tolak dalam mengembangkan berbagai unsur pokok modal sosial yang akan diukur. Dengan banyaknya keterbatasan, baik yang sifatnya teknis maupun yang bersifat prosedural administratif, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, tentu saja tidak semua unsur pokok modal sosial dapat diakomodir dalam pengukuran ini.

Meski dengan banyak keterbatasan itu, kami berusaha menetapkan lebih lanjut kerangka konseptual bagaimana bentuk operasionalisasi modal sosial dengan menetapkan berbagai kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi modal sosial pada suatu kelompok masyarakat. Dengan adanya alat ukur ini maka diharapkan dapat dihasilkan gambar sketsa kondisi modal sosial di Indonesia saat ini. Sebagaimana sifat pengukuran kuantitatif pada umumnya, pengukuran modal sosial ini tidak berpretensi memberikan gambar utuh berwarna dengan resolusi piksel sangat tinggi, di mana setiap detail permasalahan dapat diketahui dengan terang-benderang. Pengukuran modal sosial ini boleh jadi hanya dapat menunjukkan ada indikasi permasalahan di sektor-sektor tertentu di ruang interaksi sosial. Namun, hasil pengukuran ini belum mampu menjawab dengan presisi pertanyaan-pertanyaan seperti faktor penyebab, latar belakang, atau pun akibat-akibat yang mungkin muncul dari adanya simptom permasalahan yang terpotret tersebut. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan semacam itu hanya dapat diberikan berdasarkan fenomena keumuman hukum sebab-akibat dari teori dan realitas sosial yang sudah pernah terjadi

Terdapat setidaknya dua unsur pokok modal sosial yang tidak dimasukkan dalam pengukuran ini, yaitu unsur kelompok dan jejaring sosial (*networking*), dan unsur norma sosial. Secara garis besar, unsur kelompok dan jejaring sosial digunakan untuk mengetahui seberapa luas jaringan interaksi sosial yang terbentuk dalam satu komunitas di masyarakat. Semakin luas dan erat jaringan yang terjalin, maka semakin kokoh modal sosial yang terbentuk. Merujuk pada berbagai literatur yang membahas modal sosial, dapat disimpulkan bahwa aspek kelompok dan jejaring sosial cenderung diukur dengan ikatan interaksi yang sifatnya formal, misalnya, keanggotaan dalam sebuah grup, organisasi, atau kelembagaan. Ukuran keformalan ini tentu mudah dipahami

sebab konsep modal sosial lahir dari rahim sosiologis masyarakat di negara-negara maju, di mana keanggotaan formal dalam sebuah grup atau organisasi sudah menjadi semacam identitas sosial kewargaan. Pola-pola keanggotaan grup ini kemudian turut memengaruhi dinamika sosial-politik di wilayah tersebut. Di Amerika Serikat, misalnya, anggota komunitas gereja-gereja Katolik cenderung akan berada di belakang Partai Republik. Pun sebaliknya dengan anggota komunitas Protestan yang cenderung memilih afiliasi politik ke Partai Demokrat. Apabila dikaji lebih jauh, polarisasi kelompok agama ini terhadap dukungan politik dapat ditarik hingga peristiwa reformasi gereja yang mencetuskan renaissance di Eropa.

Fenomena sosial yang turut merekonstruksi dinamika sosial masyarakat barat itu tentu saja berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Ikatan-ikatan formal yang mengikat kuat, terlebih dengan bukti kartu keanggotaan, belum menjadi sebuah habit di masyarakat. Ikatan-ikatan sosial di masyarakat Indonesia cenderung bermodal-meminjam istilah Bung Hatta, kolektivitas, tanpa menghiraukan sekat-sekat formal semisal kartu keanggotaan. Keguyuban yang terjalin cenderung didasari oleh semangat kegotong-royongan, kekeluargaan, hingga kekerabatan. Model ikatan sosial yang terbentuk ini tentu tak bisa dilepaskan begitu saja dengan semangat perlawanan terhadap penjajahan yang dilatari perasaan senasib dan sepenanggungan.

Latar belakang kesejarahan serta realitas sosial yang berbeda itu tentu saja kurang tepat apabila dipotret dengan sudut pandang yang sama. Sebab, hasilnya cenderung akan bias makna. Ikatan sosial dalam bingkai negara-bangsa (*nation state*) yang terjadi di negara-negara barat pada umumnya sudah berlangsung selama ratusan tahun, sementara di Indonesia hal yang sama bahkan belum genap berlangsung 80 tahun. Hal ini tentunya turut memengaruhi derajat formalitas suatu ikatan sosial yang ada di masyarakat.

Aspek lain yang tidak diadopsi dalam pengukuran modal sosial dalam publikasi ini adalah norma sosial. Pengertian norma adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Norma-norma ini biasanya terinstitusionalisasi dan mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya. Aturan-aturan kolektif tersebut biasanya tidak tertulis (konvensi, hukum adat) tapi dipahami oleh setiap anggota masyarakatnya dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial. Norma-norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Jika di dalam suatu komunitas, asosiasi, kelompok atau grup, norma tersebut tumbuh, dipertahankan dan kuat akan memperkuat masyarakat itu sendiri. Itulah alasan rasional mengapa norma merupakan salah satu unsur modal sosial yang akan menopang keberlangsungan kohesivitas sosial yang kuat¹⁶.

Pada umumnya norma sosial tidak berlaku universal, meski nilai kebaikan dari norma sosial tersebut boleh jadi bersifat umum. Hal yang membedakan antara norma sosial dengan etika kebaikan publik (*civic virtue*) yang cenderung berlaku universal itu, terletak pada adanya sanksi sosial. Dalam norma sosial, sanksi menjadi bagian tak

¹⁶ Midayanti, Nurma, Dkk, Op.Cit.,h.19-20.

terpisahkan dari norma sosial itu sendiri.

Pada kasus Indonesia, norma sosial hidup subur dalam entitas masyarakat yang masih memegang kuat nilai-nilai konservatisme budaya leluhur, misalnya pada kelompok masyarakat adat. Awig-awig di komunitas masyarakat adat di Bali adalah salah satu contoh norma sosial tertulis yang masih eksis hingga saat ini. Di masyarakat adat Dayak, hukuman bagi lelaki yang berselingkuh dengan istri orang, selain namanya dicoret dari daftar adat serta diusir dari wilayah adat tersebut, juga diwajibkan mengganti biaya mahar dan biaya hidup sang istri kepada suaminya. Selain itu, si lelaki juga wajib menikahi dan membawa pergi perempuan yang ia selingkuhi tersebut keluar dari wilayah desa. Di masyarakat Rejang Lebong, Bengkulu, ada ritual “cuci kampung” yang dikenakan bagi mereka yang kedapatan berzina. Ritual “cuci kampung” adalah sanksi sosial berupa upacara penyembelihan domba/kambing yang kemudian darah hewan sembelihan itu dipercikkan ke seluruh wilayah kampung. Ritual ini dipercaya dapat menyucikan kembali kampung yang sudah tercemar noda akibat perbuatan zina. Apa yang berlaku di masyarakat adat Dayak dan masyarakat Rejang Lebong di Bengkulu adalah contoh norma sosial tidak tertulis yang masih hidup di Indonesia.

Tiga norma sosial sebagaimana diuraikan di atas adalah contoh kecil dari kemungkinan adanya ratusan model norma sosial merujuk pada jumlah komunitas masyarakat adat di Indonesia. Variasi yang sangat tinggi mengenai sifat dan karakteristik antar norma sosial yang ada tentunya menjadi salah satu kendala dalam merumuskan pertanyaan yang tepat bila dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Permasalahan lainnya adalah adanya kemungkinan ketiadaan norma sosial di suatu kelompok masyarakat serta adanya ketidak-tahuan responden mengenai keberadaan norma sosial di wilayah tempat tinggalnya. Bila pengukuran modal sosial dilakukan serentak secara massif dengan pendekatan kuantitatif, tentunya hal tersebut cenderung akan menjadi bias.

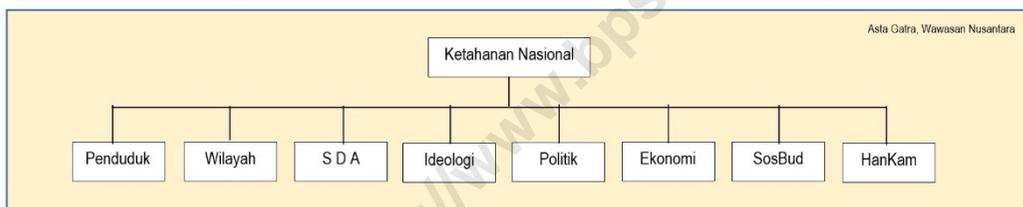
Meski tidak menyertakan dimensi kelompok dan jejaring sosial (*networking*), serta dimensi norma sosial, pengukuran modal sosial dalam publikasi ini diharapkan tetap mampu menghasilkan sketsa situasi modal sosial di Indonesia. Sebab, pemilihan dimensi yang mana yang akan dipotret didasarkan pada titik fokus dari sudut pandang kajian yang ingin didalami. Pilihan terhadap sudut pandang tertentu itu adalah upaya memetakan permasalahan sosial yang kami pandang lebih urgen untuk mendapat intervensi. Dimensi modal sosial yang kami pandang lebih penting yang kemudian kami adopsi dalam pengukuran ini adalah dimensi rasa saling percaya (*trust*), dimensi partisipasi sosial, dan dimensi toleransi.

2.3. Kerangka Kerja Modal Sosial Tahun 2021

Kerangka kerja (*framework*) penyusunan statistik modal sosial tahun 2021 ini mempertimbangkan setidaknya dua hal. Pertama, pengukuran modal sosial ini harus berdimensi ketahanan wilayah. Kedua, hasil pengukuran modal sosial ini secara makro harus dapat ditindaklanjuti melalui pendekatan kebijakan publik. Selain itu, hasil

pengukuran modal sosial tahun 2022 ini juga diharapkan dapat menjadi bahan analisis pendukung dari indikator-indikator lain yang ada di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik.

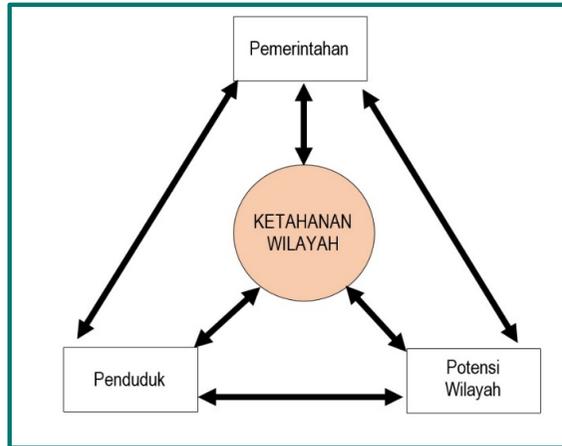
Dimensi ketahanan wilayah yang menjadi pertimbangan pertama kerangka kerja pengukuran modal sosial tahun 2021 ini merujuk pada Astagatra Wawasan Nusantara yang menjadi konsepsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional sebagai konsepsi merupakan pisau analisis untuk memecahkan problem atau masalah kehidupan bangsa melalui pendekatan delapan aspek kehidupan nasional yang diistilahkan sebagai Astagatra. Astagatra terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Trigatra adalah tiga aspek alamiah, yaitu aspek geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam yang merupakan potensi dan modal bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan, oleh karena itu Trigatra harus dikelola dengan baik. Sedangkan Pancagatra adalah lima aspek sosial, yaitu aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan. Penggabungan Trigatra dan Pancagatra akan menjadi Astagatra (Gambar 2.1) yang merupakan model pemetaan yang mantap dari sistem kehidupan nasional bangsa Indonesia¹⁷.



Gambar 2.1. Astagatra Wawasan Nusantara

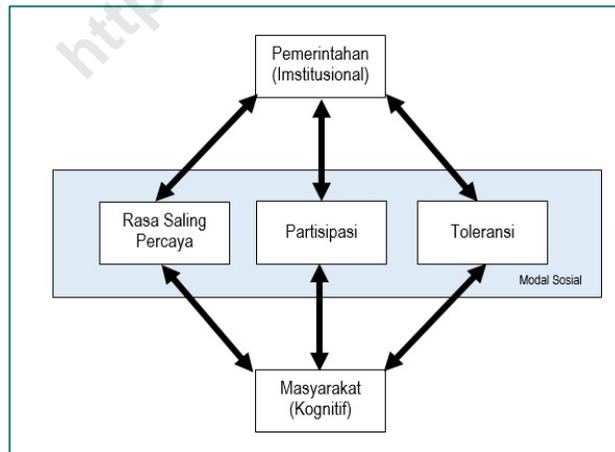
Dimensi ketahanan wilayah yang menjadi bagian dari ketahanan nasional adalah bentuk kristalisasi Astagatra yang terdiri dari unsur penduduk, pemerintahan, dan potensi wilayah (Gambar 2.2). Di mana aspek Pancagatra merupakan unsur-unsur yang melingkupi interaksi antara penduduk dan pemerintahan.

¹⁷ Nasution, Saiful Anwar, Pengembangan Pemeriksaan Kinerja Guna Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2011, h.16.



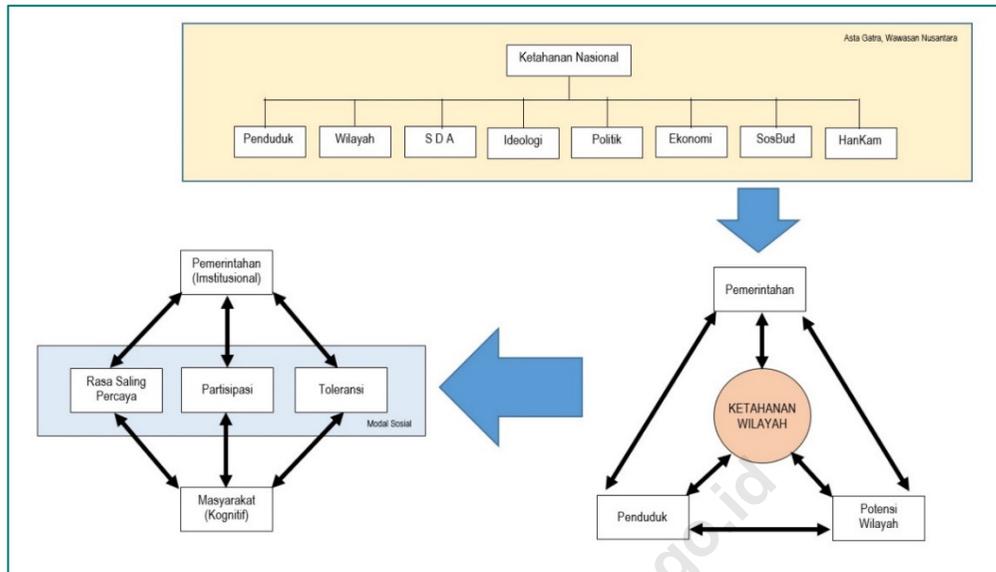
Gambar 2.2. Dimensi Ketahanan Wilayah

Untuk menerjemahkan pertimbangan kedua dari kerangka kerja pengukuran modal sosial tahun 2021, yaitu agar hasil pengukuran modal sosial ini secara makro dapat ditindaklanjuti melalui pendekatan kebijakan publik, maka rumusan modal sosial yang mengerucut pada tiga dimensi, yaitu rasa saling percaya (*trust*), partisipasi, dan toleransi itu kemudian diintegrasikan ke dimensi ketahanan wilayah (Gambar 2.3). Ringkasnya, ruang lingkup modal sosial yang diukur mencakup rasa saling percaya, partisipasi, serta toleransi yang berkembang pada ranah institusional (pemerintahan) dan unsur kognitif kewargaan. Ruang lingkup tersebut sekaligus dapat menjadi rujukan terhadap perkembangan Astagatra sistem ketahanan nasional.



Gambar 2.3. Dimensi Modal Sosial

Dengan demikian, pengukuran modal sosial tahun 2021 ini adalah upaya Badan Pusat Statistik berkontribusi menghasilkan indikator-indikator sosial yang dapat dipergunakan sebagai alat pantau kondisi ketahanan sosial di Indonesia.



Gambar 2.4. Kerangka Kerja Pengukuran Modal Sosial

Tahapan selanjutnya dari kerangka kerja ini adalah menerjemahkan ketiga dimensi modal sosial yang telah dipilih ke ranah empirik, yaitu dalam bentuk butir-butir pertanyaan penelitian. Selain mempertimbangkan konsep teoritis dari tiap dimensi, butir-butir pertanyaan tersebut disusun dengan mempertimbangkan karakteristik sosiologis masyarakat Indonesia. Selain itu, pada dimensi rasa saling percaya dan dimensi partisipasi sosial, butir-butir pertanyaan disusun dan dikelompokkan menjadi 2 level, yaitu, level lokal dan level global. Ruang lingkup level lokal memotret interaksi di tingkat hunian hingga cakupan wilayah kabupaten/kota. Sementara level global didefinisikan sebagai interaksi di level provinsi dan nasional. Dengan demikian, pada dimensi rasa saling percaya dan dimensi partisipasi sosial diharapkan dapat dipetakan derajat diferensiasi kekuatan modal sosial di level lokal dengan di level global.

2.4. Keterbatasan

Salah satu keterbatasan dari konsep modal sosial (*the nations of Social Capital*) terletak pada pendekatan, unit analisis, rentang cakupan unsur-unsur yang membentuk modal sosial dan orientasi analisisnya. Varian konsep dan definisi modal sosial begitu besar sehingga menyulitkan dalam perumusannya yang dapat diterima sebagai kesepakatan universal dan dioperasionalkan untuk membuat keterbandingan-keterbandingan antar negara atau antar daerah. Keterbatasan tersebut, menyebabkan kesulitan banyak negara terutama di negara-negara berkembang, untuk mengoperasionalkan pengukurannya melalui berbagai survei atau cara pengumpulan data lainnya yang relevan. Hal ini terutama dirasakan oleh negara-negara berkembang

yang memiliki variasi budaya antar wilayah dan atau antar suku yang tinggi¹⁸.

Mengukur modal sosial dalam tataran kuantitatif bukan perkara yang mudah. Terlebih bila pengukuran tersebut diharapkan mampu merepresentasikan gambaran utuh sebuah populasi selevel wilayah administrasi tingkat provinsi. Bahkan, jika pun representasi yang dihasilkan baru setaraf sketsa, bukan gambar utuh beresolusi tinggi, yang memiliki kedalaman pemaknaan. Selain karena hingga saat ini belum ada konsepsi baku yang telah benar-benar disepakati para ahli, sehingga variabel dan indikator pengukurannya pun masih multi interpretatif, modal sosial adalah tema penelitian yang cenderung lebih dekat pada domain kualitatif dengan tingkat amatan populasi yang tidak begitu luas.

Permasalahan pokok yang membuat modal sosial tidak mudah dikuantifikasi cenderung disebabkan oleh pengertian dasar dari modal sosial itu sendiri. Modal sosial tidak berbicara di ranah individual. Modal sosial bukan tentang aku, bukan tentang anda, bahkan bukan pula tentang kami. Modal sosial mengukur tentang kekitaan, ia berbicara tentang kolektivisme kita sebagai makhluk sosial. Modal sosial berbicara mengenai kekuatan solidaritas, partisipasi, toleransi, hingga rasa saling percaya dalam satu komunitas dan antar komunitas. Modal sosial bukan tentang perasaan terhubung satu arah, tetapi hubungan timbal-balik (kesalingan). Oleh karena itu, idealnya, modal sosial juga diukur dengan prinsip timbal-balik, saling-silang, bukan pengukuran satu arah. Model pengukuran semacam itu tentu tidak mudah apabila menggunakan pendekatan kuantitatif pada level rumah tangga.

Hal tersebut tentu saja berbeda dengan pengukuran kuantitatif yang biasa dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) atau Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran, sebagai keluaran utama kedua survei tersebut, sejatinya adalah isu personal/individual yang hasilnya diagregasi hingga dapat menggambarkan karakteristik pada populasi tertentu. Dengan demikian, pengukuran tingkat kemiskinan atau pun tingkat pengangguran, relatif sudah tak memiliki banyak kendala.

Kemiskinan dan pengangguran adalah dimensi individual pada aspek modal manusia yang merujuk pada daya dan keahlian yang dimiliki oleh seorang individu. Sementara pada modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antar individu dalam suatu kelompok dan antar kelompok dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan antar sesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok¹⁹.

Keterbatasan lainnya mengenai pengukuran modal sosial dalam publikasi ini terkait sumber data. Statistik modal sosial ini datanya bukan berasal dari hasil survei khusus dengan tema modal sosial. Data statistik modal sosial ini disusun dari Blok X (Kehidupan Sosial) Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) tahun 2021.

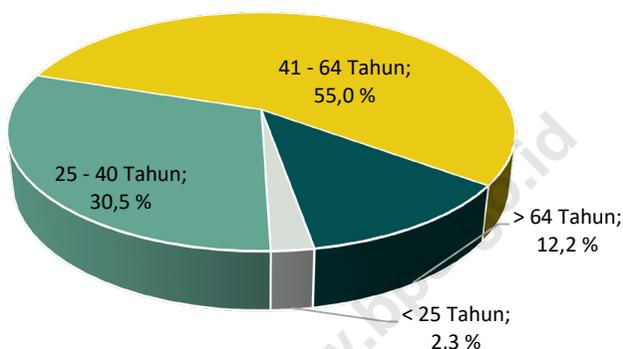
¹⁸ Midayanti, Nurma, Dkk, Loc. Cit., h.34.

¹⁹ Midayanti, Nurma, Dkk, Loc. Cit., h.13.

2.5. Karakteristik Responden

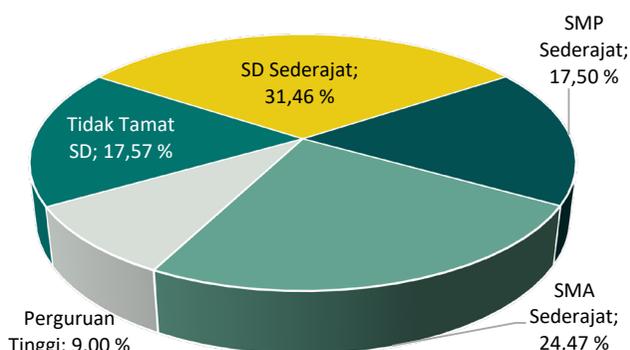
2.5.1. Karakteristik Demografi

Data dasar penyusunan modal sosial tahun 2022 ini berasal dari instrumen Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) tahun 2021. SPTK 2021 diselenggarakan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan target sampel sebanyak 75.000 rumah tangga. Desain sampel sebanyak itu digunakan untuk estimasi level provinsi dan level nasional.



Gambar 2.5. Karakteristik Responden menurut Kelompok Umur

Sebaran sampel SPTK menurut jenis kelamin terdiri dari 48,7 persen laki-laki dan 51,3 persen perempuan. Sementara itu, apabila sebaran sampel tersebut diklasifikasikan berdasarkan kelompok umur, maka terlihat bahwa mayoritas responden berada pada rentang usia 41 sampai 64 tahun. Banyaknya responden yang berada pada rentang usia tersebut mencapai 55,0 persen. Kelompok usia kedua terbesar berasal dari rentang usia 25 sampai 40 tahun, yaitu sebesar 30,5 persen. Sisanya, sebanyak 12,2 persen berasal dari mereka yang berusia di atas 64 tahun, dan sebanyak 2,3 persen berasal dari responden berusia di bawah 25 tahun.



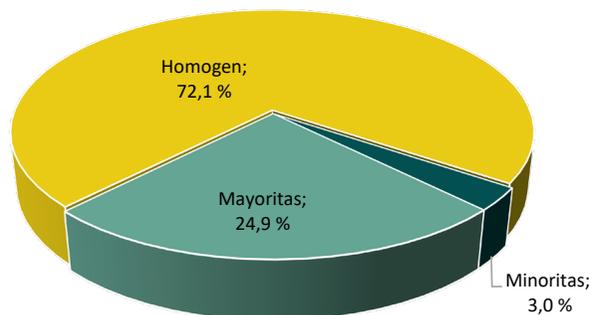
Gambar 2.6. Karakteristik Responden menurut Tingkat Pendidikan

Dari sisi pendidikan formal, secara mayoritas responden adalah mereka yang berijazah paling tinggi pada level SMP. Total responden pada kelompok ini mencapai 66,53 persen, dengan rincian, sebanyak 17,57 persen tidak tamat SD, 31,46 persen berijazah SD, dan 17,50 persen berijazah SMP. Sementara itu, responden berijazah SMA sebanyak 24,47 persen, dan yang mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi hanya sebanyak 9,0 persen. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada survei ini adalah mereka yang berusia di atas 25 tahun dan berpendidikan formal paling tinggi hingga di level SMP.

2.5.2. Karakteristik Lingkungan Tempat Tinggal

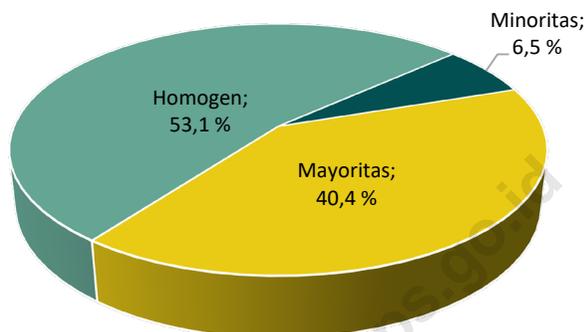
Jaringan hubungan sosial biasanya akan diwarnai oleh suatu tipologi khas sejalan dengan karakteristik dan orientasi kelompok. Pada kelompok sosial yang biasanya terbentuk secara tradisional atas dasar kesamaan garis keturunan (*lineage*), pengalaman-pengalaman sosial turun temurun (*repeated social experiences*) dan kesamaan kepercayaan pada dimensi ketuhanan (*religious beliefs*) cenderung memiliki kohesivitas tinggi, tetapi rentang jaringan maupun *trust* yang terbangun sangat sempit. Sebaliknya, pada kelompok yang dibangun atas dasar kesamaan orientasi dan tujuan dan dengan ciri pengelolaan organisasi yang lebih modern, akan memiliki tingkat partisipasi anggota yang lebih baik dan memiliki rentang jaringan yang lebih luas. Pada tipologi kelompok yang disebut terakhir akan lebih banyak menghasilkan dampak positif baik bagi kemajuan kelompok maupun kontribusinya pada pembangunan masyarakat secara luas.

Untuk menguji hipotesis tersebut, terdapat 3 pertanyaan kunci yang dapat dijadikan sebagai determinan untuk menjelaskan posisi *bonding*, *bridging*, dan *linking* dengan lebih mendalam. Ketiga pertanyaan tersebut bertujuan untuk memetakan posisi responden di wilayah tempat tinggalnya. Dalam pelaksanaannya, posisi responden tersebut boleh jadi tidak selalu tepat sesuai fakta empirik. Akan tetapi, cenderung berdasarkan pemahaman dan pengetahuan subjektif responden mengenai situasi di lingkungan tempat tinggalnya. Posisi sosial responden tersebut dipetakan berdasarkan keragaman suku, agama, dan hubungan kekerabatan.



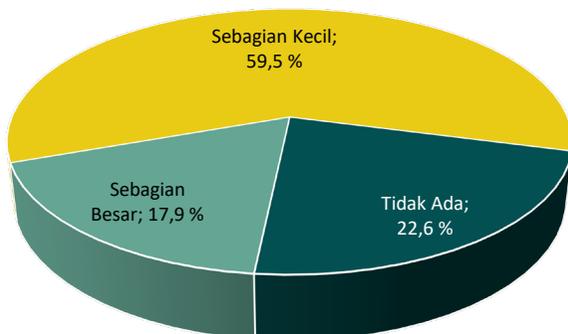
Gambar 2.7. Tempat Tinggal Responden berdasarkan Kesamaan Agama/Keyakinan

Ketika ditanyakan mengenai keberadaan tetangga yang berbeda agama/ keyakinan religius, sebanyak 72,1 persen menjawab tidak ada. Artinya, sebanyak 72,1 persen penduduk tinggal dan menetap di lingkungan yang homogen dari sisi agama/ keyakinan religius. Dari pertanyaan tersebut juga terungkap bahwa 3 persen penduduk menjadi minoritas di tempat tinggalnya. Sebab, sebagian besar tetangganya berbeda agama/keyakinan religius dengan dirinya. Sisanya, sebanyak 24,9 persen hidup sebagai kelompok mayoritas, karena hanya sebagian kecil tetangganya yang berbeda agama/ keyakinan religius dengan dirinya (Gambar 2.7).



Gambar 2.8. Tempat Tinggal Responden berdasarkan Kesamaan Suku

Terkait kesamaan suku, sebanyak 53,1 persen responden mengaku bahwa mereka tinggal di lingkungan yang homogen. Mereka menyatakan tidak ada tetangga yang berbeda suku di lingkungan tempat tinggalnya. Sementara itu sebanyak 40,4 persen responden tinggal dan menetap sebagai kelompok mayoritas. Sebab, hanya sebagian kecil tetangga mereka yang berbeda suku dengan dirinya. Masih terkait dengan keragaman suku di lingkungan tempat tinggal, sebanyak 6,5 persen penduduk mengaku hidup sebagai minoritas karena sebagian besar tetangganya berbeda suku dengan keluarganya (Gambar 2.8).



Gambar 2.9. Tempat Tinggal Responden berdasarkan Keberadaan Tetangga yang Masih Ada Hubungan Kekerabatan

Ketika ditanyakan mengenai keberadaan tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan, sebanyak 17,9 persen responden menjawab bahwa sebagian besar tetangga mereka masih ada hubungan kekerabatan. Sementara itu sebanyak 59,5 persen responden menjawab sebagian kecil, dan sebanyak 22,6 persen responden menjawab tidak ada tetangga mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka (Gambar 2.9).

Berdasarkan uraian terkait karakteristik lingkungan tempat tinggal ini, secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden tinggal di lingkungan homogen, baik dari sisi agama ataupun suku. Dalam konteks modal sosial, kelompok masyarakat homogen pada umumnya tidak terlatih untuk menerima perbedaan. Kelompok masyarakat ini cenderung kuat dalam hal *bonding*, namun lemah pada aspek *linking* dan *bridging*. Meski tidak sama persis, persoalan yang relatif sama juga terdapat pada kelompok masyarakat dengan label mayoritas. Pada sisi sebaliknya, problem modal sosial pada kelompok masyarakat minoritas pada umumnya adalah terjadinya partisipasi semu. Partisipasi yang dihadirkan bukan berasal dari kesadaran kewargaan, tetapi cenderung didasari atas ketakutan untuk dikucilkan. Dengan asumsi tersebut, pada pengukuran modal sosial ini, dimensi rasa saling percaya dan dimensi partisipasi sosial diukur dari perspektif lokal dan global. Harapannya, pemetaan kekuatan modal sosial di Indonesia dapat dipahami secara lebih utuh.

BAB III

RASA PERCAYA



Rasa Percaya

Tingkat Kepercayaan Bahwa Tetangga Akan Membantu Jika Terkena Musibah



Sebagian besar
ada hubungan kekerabatan

84,06

Sebagian kecil
ada hubungan kekerabatan

81,59

Tidak ada
ada hubungan kekerabatan

79,67

// Penduduk yang tinggal di lingkungan yang sebagian besar tetangganya masih ada hubungan kekerabatan memiliki tingkat kepercayaan bahwa tetangganya akan membantunya jika terkena musibah yang cenderung lebih tinggi yaitu sebesar 84,06 persen //

Kepercayaan Terhadap Aparat Penegak Hukum (POLRI)

72,00



Perempuan

70,88



Laki-laki

Penduduk Indonesia yang berjenis kelamin perempuan memiliki tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum (POLRI) yang cenderung lebih tinggi



3.1. Pengantar

Konsep modal sosial yang sangat dinamis dan terus berkembang menyebabkan belum ada kerangka konseptual utuh yang dapat direplikasi di berbagai tipe struktur sosial mana pun. Namun demikian, dalam setiap gagasan yang dikemukakan oleh para ahli, rasa percaya merupakan dimensi yang selalu ada dalam setiap konsep yang dikemukakan. Rasa percaya (*trust*) mendorong seseorang berkeinginan untuk mengambil risiko dalam hubungan-hubungan sosial yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak yang lain tidak akan bertindak merugikan kelompoknya. Lebih lanjut, rasa percaya adalah sikap saling mempercayai, saling bersatu dengan yang lain, dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial. Berbagai tindakan kolektif yang didasari atas rasa saling mempercayai yang tinggi akan meningkatkan partisipasi antar individu dalam berbagai ragam bentuk dan dimensi, terutama dalam konteks membangun kemajuan bersama. Kehancuran rasa saling percaya akan mengundang hadirnya berbagai masalah sosial yang serius. Jika rasa saling mempercayai telah luntur, maka yang akan terjadi adalah sikap-sikap menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku. Oleh sebab itu, rasa percaya sangat dibutuhkan dalam modal sosial.

Kepercayaan (*trust*) memiliki implikasi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dibuktikan dengan suatu kenyataan bagaimana keterkaitan orang-orang yang memiliki rasa saling percaya (*mutual trust*) dalam suatu jaringan sosial memperkuat norma-norma mengenai keharusan untuk saling membantu¹. Pentingnya kepercayaan dalam mencapai kesejahteraan ekonomi merupakan sorotan utama dalam kajian yang dilakukan Francis Fukuyama. Dalam karyanya *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity* (1995) Fukuyama, menggunakan konsep kepercayaan untuk mengukur tingkat modal sosial. Selanjutnya masih dalam bukunya tersebut Fukuyama mengatakan bahwa kepercayaan muncul apabila masyarakat sama-sama memiliki seperangkat nilai-nilai moral yang memadai untuk menumbuhkan perilaku jujur pada warga masyarakat. Bertitik tolak pada keyakinan bahwa nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan kepercayaan pada suatu bangsa merupakan faktor penentu perkembangan ekonomi negara bersangkutan, akhirnya Fukuyama sampai pada pembedaan bangsa-bangsa dalam dua kategori. Kategori pertama adalah bangsa-bangsa yang memiliki tingkat kepercayaan yang rendah (*low-trust society*) dalam nilai budayanya. Kedua adalah masyarakatnya memiliki nilai budaya kepercayaan yang tinggi (*high trust society*)².

Dalam konteks relasi negara dan rakyat, terdapat hubungan sosial yang melibatkan institusi pemerintah, sebagai penyedia pelayanan publik, dengan warga masyarakat. Melalui kontrak sosial yang diterjemahkan kemudian sebagai Pemilu, penyelenggara negara dipercaya oleh rakyat, penyelenggara negara bertindak mewakili "orang banyak" (rakyat) untuk mengatur kepentingan orang banyak tersebut. Dengan sendirinya relasi dan "kontrak" ini mengikat aktor penyelenggara negara agar selaras dengan kepentingan mereka yang mempercayainya atau mereka yang memandatinnya.

¹ Syahra, Rusydi. 2003., Op.Cit.,h.6.

² Syahra, Rusydi. 2003., Op.Cit.,h.7.

Dari pengertian tersebut maka terdapat unsur kekuatan yang diperlukan, di antaranya adalah, integritas sosial, altruisme, partisipasi, jaringan sosial, kolaborasi dan juga kepercayaan (*trust*). Modal sosial adalah sesuatu yang bersifat *embedded* (menempel) pada relasi negara dan rakyat. Ia tumbuh dan berkembang bukan saja karena adanya kesamaan tujuan dan kepentingan, melainkan juga karena adanya kepercayaan yang bersifat imbal-balik. Modal sosial juga dipahami sebagai pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki bersama oleh komunitas, serta pola hubungan yang memungkinkan sekelompok individu melakukan satu kegiatan yang produktif, termasuk dalam hubungannya dengan negara.

Berdasarkan pemahaman modal sosial sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, selain rasa percaya di level komunitas kewargaan (bersifat lokal), pengukuran modal sosial pada publikasi ini juga mengukur rasa percaya pada level institusional (global), yaitu sejauh apa relasi antara negara dengan warga negara. Secara lebih spesifik pengukuran modal sosial ini mengukur rasa percaya warga negara kepada para penyelenggara negara. Pada aspek lokal maupun global, pengukuran modal sosial pada publikasi ini masing-masing didekati dengan 5 (lima) pertanyaan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Aspek dan Pertanyaan Dimensi Rasa Percaya

Aspek (1)	Pertanyaan (2)
Ranah Kewargaan (Lokal)	Jika Anda terkena musibah (keadaan darurat), Anda yakin ada tetangga yang akan membantu/menolong Anda
	Anda percaya tetangga akan membantu mengawasi ketika rumah Anda kosong
	Anda percaya para pengurus RT/Dusun (ketua lingkungan setempat) di lingkungan Anda bekerja dengan baik
	Anda percaya aparat desa/kelurahan di lingkungan tempat tinggal Anda bekerja dengan baik untuk kesejahteraan bersama
	Anda percaya aparat pemerintahan kabupaten/kota di tempat tinggal Anda bekerja dengan baik untuk kesejahteraan bersama
Ranah Institusional (Global)	Anda percaya aparat pemerintahan provinsi di tempat tinggal Anda bekerja dengan baik untuk kesejahteraan bersama
	Anda percaya pemerintah pusat bekerja dengan baik untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia
	Anda percaya hasil Pemilu sudah melalui proses yang jujur dan adil tanpa ada kecurangan
	Anda percaya para pejabat negara yang terpilih lewat Pemilu adalah orang yang kompeten, jujur, dan bekerja demi rakyat
	Anda percaya aparat penegak hukum (Polri) telah bekerja dengan baik dan jujur

3.2. Potret Rasa Percaya pada Ranah Kewargaan (Lokal)

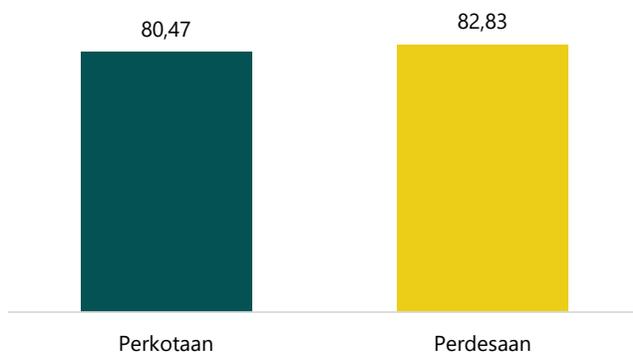
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada publikasi ini pembahasan mengenai rasa percaya dibagi menjadi dua tingkatan yakni rasa percaya pada ranah kewargaan (lokal) dan rasa percaya pada ranah institusional (global). Adapun lingkup rasa percaya penduduk di ranah lokal itu sendiri meliputi rasa percaya penduduk terhadap beberapa indikator modal sosial di lingkungan tempat tinggalnya pada skala yang lebih kecil. Rasa percaya pada ranah lokal ini mencakup beberapa indikator, seperti rasa percaya terhadap tetangga akan membantu jika terkena musibah, rasa percaya terhadap tetangga akan mengawasi jika rumah kosong, rasa percaya terhadap pengurus RT/Ketua lingkungan setempat, rasa percaya terhadap aparat desa/kelurahan dan rasa percaya terhadap pemerintah kabupaten/kota. Capaian dari indikator pada ranah lokal ini memiliki nilai yang bervariasi tergantung pada beberapa karakteristik suatu wilayah. Beberapa karakteristik tersebut mencakup klasifikasi wilayah perkotaan dan perdesaan, kelompok umur, pendidikan terakhir yang ditamatkan, dan keberadaan tetangga menurut keberagaman agama, suku dan kekerabatan.

3.2.1 Rasa Percaya Terhadap Tetangga Akan Membantu Jika Terkena Musibah

Setelah keluarga, tetangga merupakan individu atau komunitas terdekat bagi seseorang untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Rasa percaya sangat dibutuhkan pada interaksi antar tetangga, rasa saling mempercayai akan meningkatkan kontribusi positif pada modal sosial. Sebaliknya apabila dalam interaksi antar tetangga tidak ada rasa percaya, maka akan menimbulkan permasalahan sosial antar tetangga yang tentunya akan berpengaruh negatif pada modal sosial.

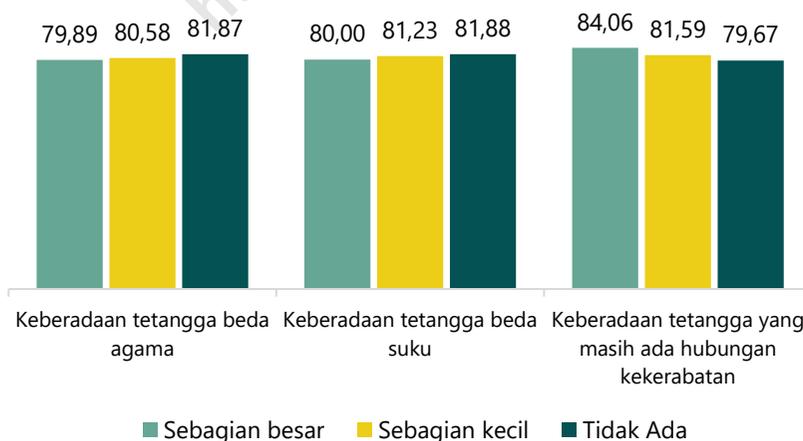
Indikator pertama yang akan dibahas pada rasa percaya pada ranah lokal adalah rasa percaya terhadap tetangga akan membantu jika terkena musibah. Analisis modal sosial terkait rasa percaya terhadap tetangga akan membantu jika terkena musibah bertujuan untuk mengukur sejauh mana rasa percaya berkembang dalam struktur sosial masyarakat yang didekati dengan kondisi sikap percaya akan mendapat pertolongan dari tetangga disaat terkena musibah atau keadaan darurat. Pertolongan yang dimaksud disini adalah berupa tindakan nyata bukan hanya kiriman pernyataan simpati dari media sosial/aplikasi pesan.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa capaian dari indikator rasa percaya pada ranah lokal akan bervariasi tergantung pada karakteristik wilayah. Berikut merupakan capaian indikator rasa percaya terhadap tetangga akan membantu jika terkena musibah menurut klasifikasi wilayah yang dapat dilihat dari grafik batang di bawah ini.



Gambar 3.1. Rasa Percaya Terhadap Tetangga Akan Membantu Jika Terkena Musibah menurut Klasifikasi Wilayah

Berdasarkan gambar di atas, diperoleh informasi bahwa penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah perdesaan memiliki rasa percaya terhadap tetangga akan membantu jika terkena musibah sebesar 82,83 poin, lebih tinggi 2,36 poin dibandingkan penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan yang memiliki rasa percaya terhadap tetangga akan membantu jika terkena musibah sebesar 80,47 poin. Hal tersebut sejalan dengan fenomena saat ini yang terjadi di Indonesia. Penduduk yang tinggal di perkotaan jangankan untuk membantu saat terkena musibah, untuk berinteraksi dengan tetangga pun jarang. Sebaliknya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penduduk yang tinggal di perdesaan lebih sering berinteraksi satu sama lain diantaranya karena budaya dan adat yang masih terjaga. Hal itu menyebabkan rasa percaya berkembang dan tumbuh lebih tinggi pada masyarakat di perdesaan.



Gambar 3.2. Rasa Percaya Terhadap Tetangga Akan Membantu Jika Terkena Musibah menurut Keberagaman Tetangga

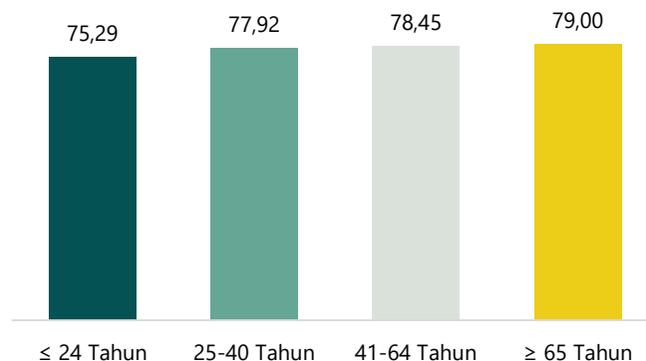
Selain pembahasan mengenai capaian indikator rasa percaya terhadap tetangga akan membantu jika terkena musibah menurut klasifikasi wilayah, pada sub bab ini

dibahas juga capaian indikator rasa percaya terhadap tetangga akan membantu jika terkena musibah menurut keberagaman tetangga berdasarkan keberagaman agama, keberagaman suku dan keberagaman hubungan kekerabatan di lingkungan tempat tinggalnya. Berdasarkan Gambar 3.2 diperoleh informasi bahwa, penduduk yang tinggal di lingkungan yang relatif homogen dalam hal ini tidak ada tetangga beda agama dan tidak ada tetangga beda suku, memiliki rasa percaya terhadap tetangga akan membantu jika terkena musibah yang cenderung lebih tinggi. Selain itu, diperoleh informasi bahwa penduduk yang tinggal di lingkungan tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan memiliki rasa percaya terhadap tetangga akan membantu jika terkena musibah cenderung lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk yang tinggal di lingkungan homogen memiliki modal sosial pada indikator rasa percaya terhadap tetangga akan membantu jika terkena musibah cenderung lebih tinggi dibandingkan penduduk yang tinggal di lingkungan heterogen.

3.2.2 Rasa Percaya Terhadap Tetangga Akan Mengawasi Jika Rumah Kosong

Indikator selanjutnya yang akan dibahas pada rasa percaya pada ranah lokal adalah rasa percaya terhadap tetangga akan mengawasi jika rumah kosong. Analisis modal sosial terkait rasa percaya terhadap tetangga akan mengawasi jika rumah kosong bertujuan untuk mengukur sejauh mana rasa percaya berkembang dalam struktur sosial masyarakat yang didekati dengan kondisi sikap percaya dimana tetangga akan membantu mengawasi ketika rumah dalam keadaan kosong.

Setelah pembahasan pada indikator sebelumnya yang menyatakan bahwa terdapat keragaman capaian indikator rasa percaya terhadap tetangga akan membantu jika terkena musibah menurut klasifikasi wilayah. Pada pembahasan kali ini akan dibahas keragaman capaian indikator rasa percaya terhadap tetangga akan mengawasi jika rumah kosong menurut kelompok umur.

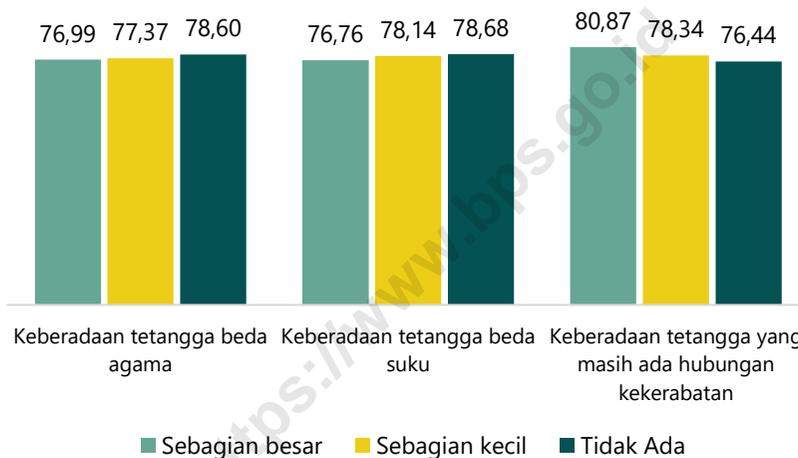


Gambar 3.3. Rasa Percaya Terhadap Tetangga Akan Membantu Jika Rumah Kosong menurut Kelompok Umur

Berdasarkan gambar di atas, diperoleh informasi bahwa terdapat hubungan yang

linier positif antara bertambahnya umur penduduk di Indonesia dengan rasa percaya terhadap tetangga akan membantu jika rumah kosong. Semakin bertambahnya umur penduduk di Indonesia maka semakin tinggi pula rasa percaya terhadap tetangga akan mengawasi jika rumah kosong. Penduduk yang berusia 65 tahun atau lebih cenderung memiliki rasa percaya terhadap tetangga akan mengawasi jika rumah kosong yang lebih tinggi dibandingkan penduduk dengan usia dibawahnya.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Greiner, B., & Zednik, A. (2019) dalam penelitiannya yang berjudul *Trust and age: An experiment with current and former students* yang meneliti perbedaan pada kepercayaan dan keterpercayaan antar kelompok umur. Hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat hubungan yang linier, di mana orang yang lebih tua lebih percaya dan lebih dapat dipercaya daripada orang yang lebih muda³.



Gambar 3.4. Rasa Percaya Terhadap Tetangga Akan Membantu Jika Rumah Kosong menurut Keberagaman Tetangga

Selain pembahasan mengenai capaian indikator rasa percaya terhadap tetangga akan mengawasi jika rumah kosong menurut kelompok umur, pada sub bab ini dibahas juga mengenai capaian indikator rasa percaya terhadap tetangga akan mengawasi jika rumah kosong menurut keberagaman tetangga berdasarkan keberagaman agama, keberagaman suku dan keberagaman hubungan kekerabatan di lingkungan tempat tinggalnya. Berdasarkan Gambar 3.4 diperoleh informasi bahwa, penduduk yang tinggal di lingkungan yang relatif homogen dalam hal ini tidak ada tetangga beda agama dan tidak ada tetangga beda suku, memiliki rasa percaya tetangga akan mengawasi jika rumah kosong yang cenderung lebih tinggi. Selain itu, diperoleh informasi bahwa penduduk yang tinggal di lingkungan tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan memiliki rasa percaya tetangga akan mengawasi jika rumah kosong cenderung lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk yang tinggal di lingkungan homogen memiliki modal sosial pada indikator rasa percaya tetangga akan mengawasi jika rumah

³ Greiner, B., & Zednik, A. (2019). Trust and age: An experiment with current and former students. *Economics Letters*, 181, 37–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.econlet.2019.04.004>

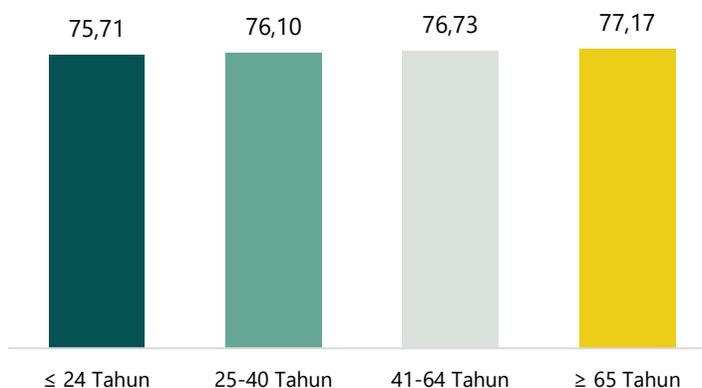
kosong cenderung lebih tinggi dibandingkan penduduk yang tinggal di lingkungan heterogen.

3.2.3 Rasa Percaya Terhadap Pengurus RT/Ketua Lingkungan Setempat

Rukun Tetangga (RT) merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah. Apabila melihat perannya pengurus RT/ketua lingkungan setempat merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan yang paling bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, rasa percaya terhadap pengurus RT/ketua lingkungan setempat merupakan hal penting yang harus ada agar terciptanya penyelenggaraan negara yang kondusif dari tingkat pemerintahan terkecil demi kemajuan bersama.

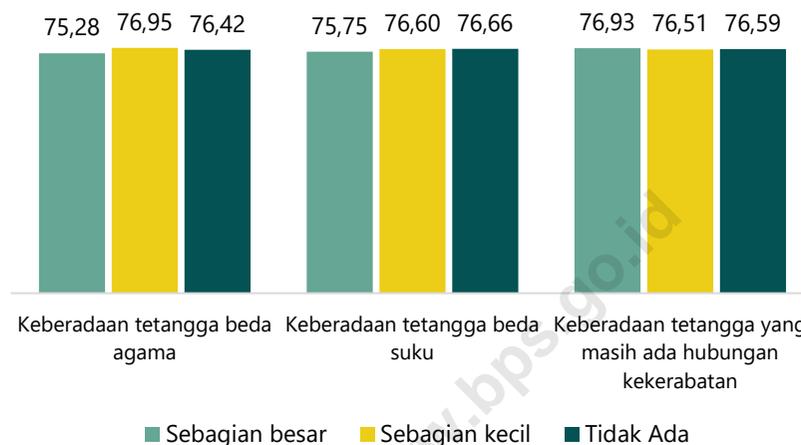
Indikator selanjutnya yang akan dibahas pada rasa percaya pada ranah lokal adalah rasa percaya terhadap pengurus RT/ketua lingkungan setempat. Analisis modal sosial terkait rasa percaya terhadap pengurus RT/ketua lingkungan setempat bertujuan untuk mengukur sejauh mana rasa percaya berkembang dalam struktur sosial masyarakat yang didekati dengan penilaian subjektif terhadap sikap percaya kepada pengurus RT/ketua lingkungan setempat seperti rasa percaya pengurus RT/ketua lingkungan setempat dapat menjadi mediator/penengah jika terjadi keributan/perselisihan di antara warga, memanfaatkan dana anggaran dari pemerintah untuk kepentingan bersama, aktif menggerakkan warga untuk berbagai kegiatan sosial, dan sebagainya.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa capaian dari indikator rasa percaya pada ranah lokal akan bervariasi tergantung pada karakteristik wilayah. Berikut merupakan capaian indikator rasa percaya terhadap pengurus RT/ketua lingkungan setempat menurut kelompok umur yang dapat dilihat dari grafik batang di bawah ini.



Gambar 3.5. Rasa Percaya Terhadap Pengurus RT/Ketua Lingkungan Setempat menurut Kelompok Umur

Berdasarkan gambar di atas, diperoleh informasi bahwa terdapat hubungan yang linier positif antara bertambahnya umur penduduk di Indonesia dengan rasa percaya terhadap pengurus RT/Ketua lingkungan setempat. Semakin bertambahnya umur penduduk di Indonesia maka semakin tinggi pula rasa percaya terhadap pengurus RT/ketua lingkungan setempat. Penduduk yang berusia 65 tahun atau lebih cenderung memiliki rasa percaya terhadap pengurus RT/ketua lingkungan setempat yang lebih tinggi dibandingkan penduduk dengan usia dibawahnya yakni sebesar 77,17 poin.



Gambar 3.6. Rasa Percaya Terhadap Pengurus RT/Ketua Lingkungan Setempat menurut Keberagaman Tetangga

Komponen lain analisis modal sosial, khususnya dimensi rasa percaya adalah analisis rasa percaya terhadap pengurus RT/Ketua lingkungan setempat menurut keberagaman tetangga berdasarkan keberagaman agama, keberagaman suku dan keberagaman hubungan kekerabatan di lingkungan tempat tinggalnya. Berdasarkan Gambar 3.6 diperoleh informasi bahwa, menurut keberadaan tetangga beda agama, penduduk yang tinggal di lingkungan yang tidak ada tetangga beda agama dan hanya sebagian kecil tetangganya beda agama, memiliki rasa percaya terhadap pengurus RT/Ketua lingkungan setempat yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di lingkungan yang sebagian besar tetangganya beda agama. Selain itu, menurut keberadaan tetangga beda suku, penduduk yang tinggal di lingkungan yang tidak ada tetangga beda suku, memiliki rasa percaya terhadap pengurus RT/Ketua lingkungan setempat yang cenderung lebih tinggi. Selain itu juga, diperoleh informasi bahwa penduduk yang tinggal di lingkungan tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan memiliki rasa percaya terhadap pengurus RT/Ketua lingkungan setempat cenderung lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk yang tinggal di lingkungan homogen memiliki modal sosial pada indikator rasa percaya terhadap pengurus RT/Ketua lingkungan setempat lebih tinggi dibandingkan penduduk yang tinggal di lingkungan heterogen.

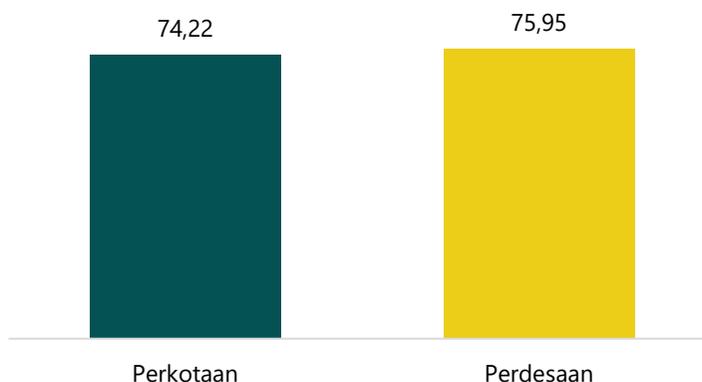
3.2.4 Rasa Percaya Terhadap Aparat Desa/Kelurahan

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kelurahan, Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.

Aparat desa/kelurahan memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Integritas kinerja aparat desa/kelurahan merupakan unsur yang diperlukan tidak hanya untuk kemajuan desa/kelurahan melainkan juga untuk meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap aparat desa/kelurahan.

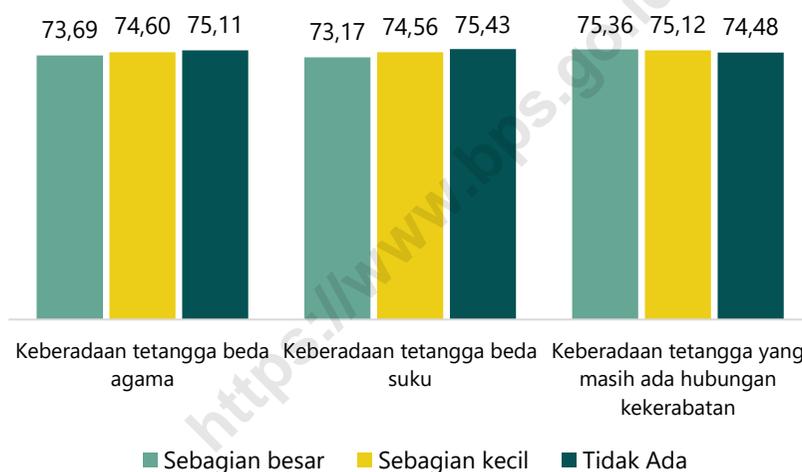
Indikator selanjutnya yang akan dibahas pada rasa percaya pada ranah lokal adalah rasa percaya terhadap aparat desa/kelurahan. Analisis modal sosial terkait rasa percaya terhadap aparat desa/kelurahan bertujuan untuk mengukur sejauh mana rasa percaya berkembang dalam struktur sosial masyarakat yang didekati dengan kondisi subjektif responden mengenai sikap percaya terhadap aparat desa/kelurahan.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa capaian dari indikator rasa percaya pada ranah lokal akan bervariasi tergantung pada karakteristik wilayah. Berikut merupakan capaian indikator rasa percaya terhadap aparat desa/kelurahan menurut klasifikasi wilayah yang dapat dilihat dari grafik batang di bawah ini.



Gambar 3.7. Rasa Percaya Terhadap Aparat Desa/Kelurahan menurut Klasifikasi Wilayah

Berdasarkan gambar di atas, diperoleh informasi bahwa penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah perdesaan memiliki rasa percaya terhadap aparat desa/kelurahan sebesar 75,95 poin, lebih tinggi 1,73 poin dibandingkan penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan yang memiliki rasa percaya terhadap aparat desa/kelurahan sebesar 74,22 poin. Sebetulnya baik penduduk yang tinggal di perkotaan maupun di perdesaan sama-sama memiliki ketergantungan pada aparat desa/kelurahan, seperti dalam hal mengurus dokumen administrasi kependudukan dan keperluan lainnya. Namun, penduduk di perdesaan memiliki faktor budaya dan adat yang masih terjaga yang membuat aparat desa dan masyarakat lebih sering berinteraksi. Selain itu, pada wilayah perdesaan sebagian besar wilayahnya dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih langsung oleh penduduk di wilayah tersebut, berbeda dengan di wilayah perkotaan yang sebagian besar dipimpin oleh Lurah yang dipilih langsung oleh Camat. Hal itu menyebabkan rasa percaya berkembang dan tumbuh lebih tinggi pada masyarakat di perdesaan.



Gambar 3.8. Rasa Percaya Terhadap Aparat Desa/Kelurahan menurut Keberagaman Tetangga

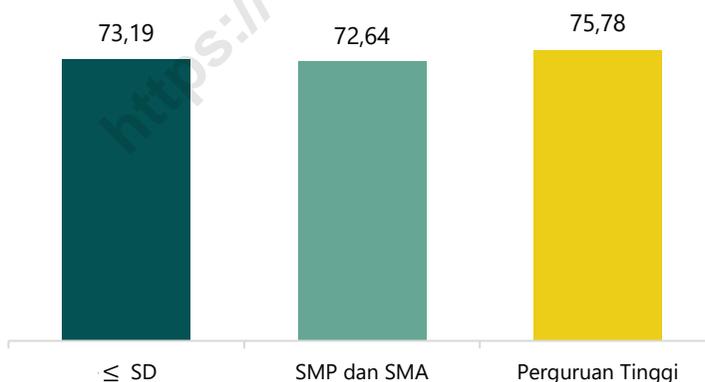
Selain menganalisis rasa percaya terhadap aparat desa/kelurahan menurut klasifikasi wilayah, pada sub bab ini juga menganalisis rasa percaya terhadap aparat desa/kelurahan menurut keberagaman tetangga berdasarkan keberagaman agama, keberagaman suku dan keberagaman hubungan kekerabatan di lingkungan tempat tinggalnya. Berdasarkan Gambar 3.8 diperoleh informasi bahwa, penduduk yang tinggal di lingkungan yang relatif homogen dalam hal ini tidak ada tetangga beda agama dan tidak ada tetangga beda suku, memiliki rasa percaya terhadap aparat desa/kelurahan yang cenderung lebih tinggi. Selain itu, diperoleh informasi bahwa penduduk yang tinggal di lingkungan tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan memiliki rasa percaya terhadap aparat desa/kelurahan cenderung lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk yang tinggal di lingkungan homogen memiliki modal sosial pada indikator rasa percaya terhadap aparat desa/kelurahan cenderung lebih tinggi dibandingkan penduduk yang tinggal di lingkungan heterogen.

3.2.5 Rasa Percaya Terhadap Terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota

Dewasa ini, di Indonesia untuk memilih kepala pemerintahan mulai dari Bupati hingga Presiden dilaksanakan melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Hal ini secara tidak langsung menjadikan kepala daerah yang terpilih memiliki hubungan dengan rakyat yang memilihnya. Rakyat yang memilih seorang kepala daerah memiliki rasa percaya bahwa orang yang mereka pilih akan membuat kebijakan sesuai dengan yang mereka harapkan.

Indikator selanjutnya yang akan dibahas pada rasa percaya pada ranah lokal adalah rasa percaya terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota. Analisis modal sosial terkait rasa percaya terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota bertujuan untuk mengukur sejauh mana rasa percaya berkembang dalam struktur sosial masyarakat yang didekati dengan penilaian subjektif terhadap sikap percaya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten/Kota bukan hanya Bupati ataupun Walikota saja, melainkan seluruh jajaran aparatur yang bertugas di wilayah pemerintahan kabupaten/kota.

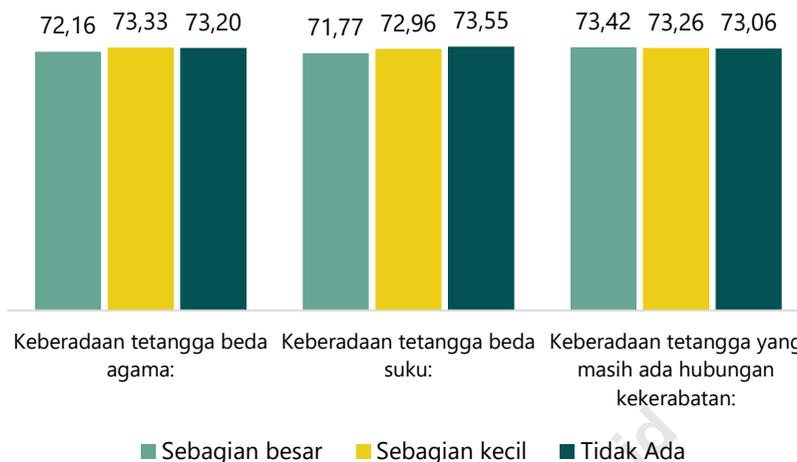
Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa capaian dari indikator rasa percaya pada ranah lokal akan bervariasi tergantung pada karakteristik wilayah. Berikut merupakan capaian indikator rasa percaya terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota menurut pendidikan terakhir yang ditamatkan yang dapat dilihat dari grafik batang di bawah ini.



Gambar 3.9. Rasa Percaya Terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan

Berdasarkan gambar di atas, diperoleh informasi bahwa terdapat keragaman capaian indikator rasa percaya terhadap pemerintah kabupaten/kota di Indonesia menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Penduduk dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan Perguruan Tinggi ke atas memiliki rasa percaya pada pemerintah kabupaten/kota yang cenderung lebih tinggi yaitu sebesar 75,78 poin. Sementara itu, penduduk dengan tingkat pendidikan SMP dan SMA memiliki rasa percaya terhadap pemerintah kabupaten/kota sebesar 72,64 poin, lebih rendah 0,55 poin dari penduduk

dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan minimal SD yaitu sebesar 73,19 poin.



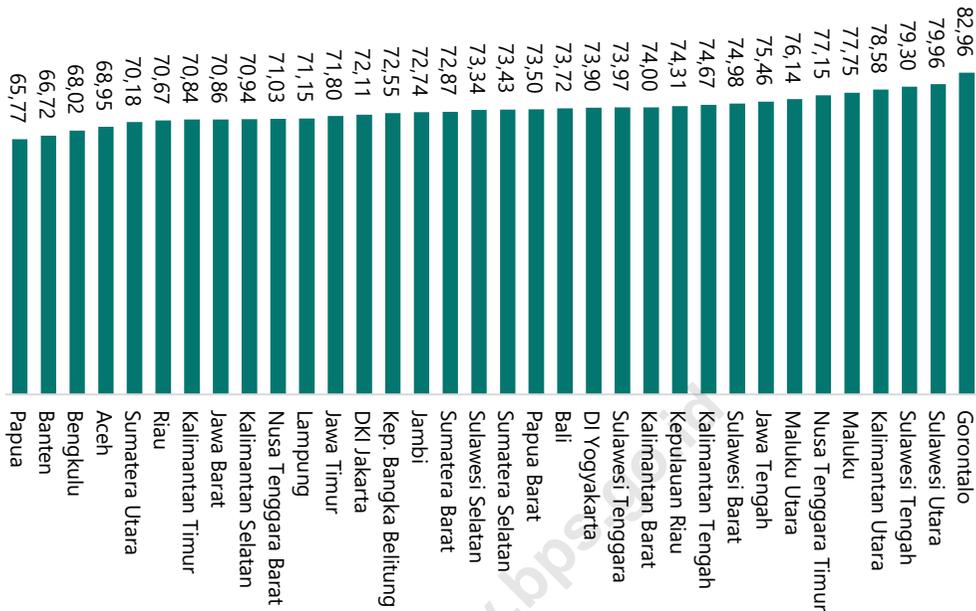
Gambar 3.10. Rasa Percaya Terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota menurut Keberagaman Tetangga

Komponen lain analisis modal sosial, khususnya dimensi rasa percaya adalah analisis rasa percaya terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota menurut keberagaman tetangga berdasarkan keberagaman agama, keberagaman suku dan keberagaman hubungan kekerabatan di lingkungan tempat tinggalnya. Berdasarkan Gambar 3.10 diperoleh informasi bahwa, penduduk yang tinggal di lingkungan yang tidak ada tetangga beda agama dan hanya sebagian kecil tetangganya beda agama, memiliki rasa percaya terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di lingkungan yang sebagian besar tetangganya beda agama. Selain itu, menurut keberadaan tetangga beda suku, penduduk yang tinggal di lingkungan yang tidak ada tetangga beda suku, memiliki rasa percaya terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang cenderung lebih tinggi. Selain itu juga, diperoleh informasi bahwa penduduk yang tinggal di lingkungan tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan memiliki rasa percaya terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota cenderung lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk yang tinggal di lingkungan homogen memiliki modal sosial pada indikator rasa percaya terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota lebih tinggi dibandingkan penduduk yang tinggal di lingkungan heterogen.

3.3. Potret Rasa Percaya pada Ranah Institusional (Global)

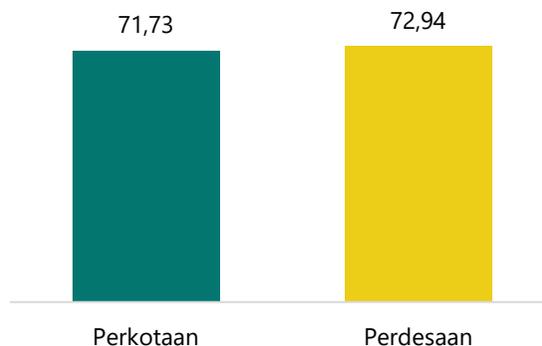
Pada sub bab sebelumnya telah dibahas potret lapangan dari 5 (lima) indikator rasa saling percaya (*trust*) di level kognitif kewargaan (lokal). Pada sub bab ini akan dibahas gambaran mengenai derajat kepercayaan masyarakat pada level institusional. Rasa percaya di level ini diukur melalui 5 (lima) pertanyaan.

3.3.1 Rasa Percaya Terhadap Pemerintah Provinsi



Gambar 3.11. Rasa Percaya Terhadap Pemerintah Provinsi menurut Provinsi

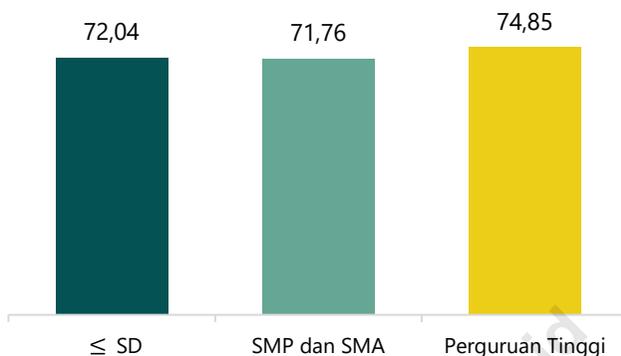
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah provinsi berada pada rentang menengah. Penilaian masyarakat yang menganggap bahwa jajaran pemerintahan provinsi, di mana mereka tinggal, telah bekerja dengan baik, secara rata-rata mendapat skor sebesar 72,25. Tiga provinsi dengan skor tertinggi adalah Gorontalo (82,96), Sulawesi Utara (79,96), dan Sulawesi Tengah (79,30). Sementara itu, tiga provinsi terendah terkait penilaian masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintahannya, secara berturut-turut adalah, Papua (65,77), Banten (66,72), dan Provinsi Bengkulu (68,02).



Gambar 3.12. Rasa Percaya Terhadap Pemerintah Provinsi menurut Klasifikasi Wilayah

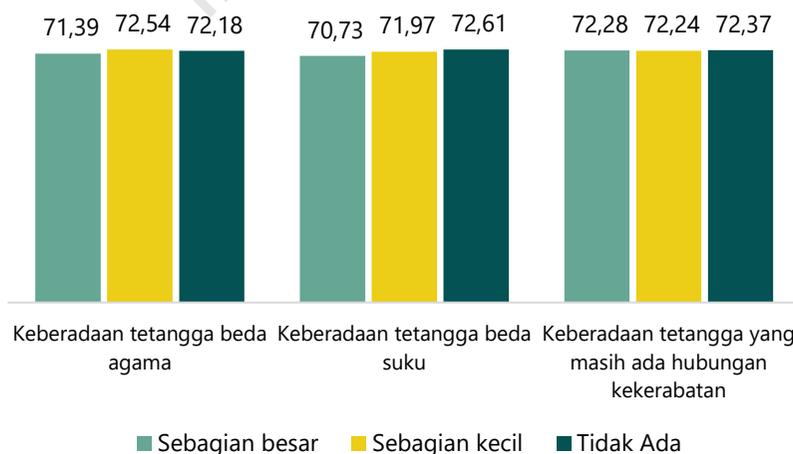
Berdasarkan karakteristik kewilayahan, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan secara umum memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan

mereka yang tinggal di wilayah perkotaan. Di wilayah perdesaan, penilaian masyarakat terkait kinerja pemerintah provinsinya, secara rata-rata memberi skor sebesar 72,94. Sementara itu, di masyarakat perkotaan, kinerja pemerintah provinsi hanya mendapat skor sebesar 71,73.



Gambar 3.13. Rasa Percaya Terhadap Pemerintah Provinsi menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Hal lain yang juga menarik untuk didalami adalah kepercayaan masyarakat terkait kinerja pemerintah provinsi berdasarkan tingkat pendidikan mereka. Hasil pengukuran indikator modal sosial ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat berpendidikan tinggi cenderung lebih percaya bahwa pemerintah provinsi sudah bekerja dengan baik. Masyarakat berpendidikan tinggi secara rata-rata memberi skor sebesar 74,85. Sementara itu, masyarakat berpendidikan setara sekolah menengah (SMP dan SMA) rata-rata memberi skor sebesar 71,76, dan masyarakat berpendidikan SD ke bawah secara rata-rata memberi skor sebesar 72,04.



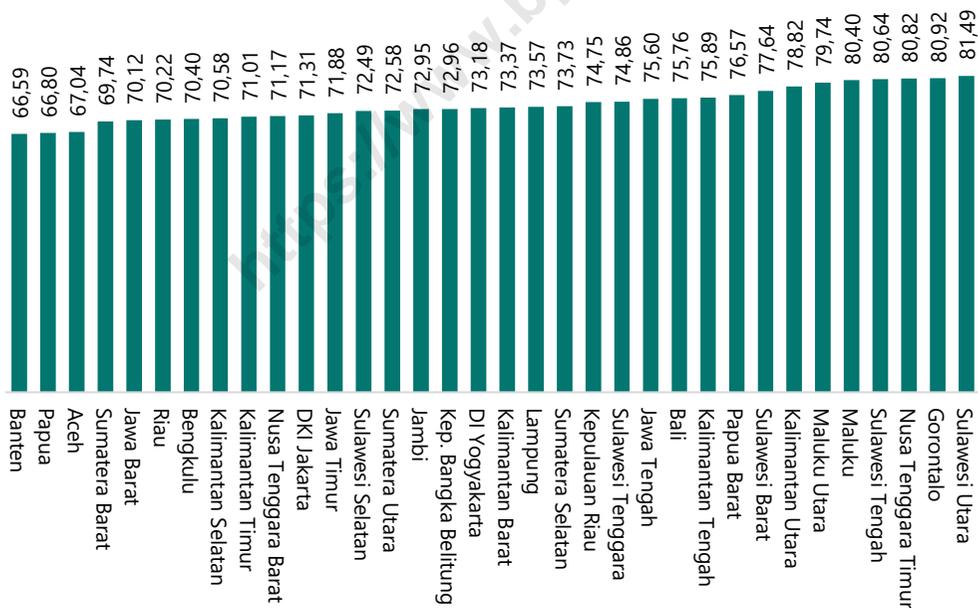
Gambar 3.14. Rasa Percaya Terhadap Pemerintah Provinsi menurut Keberagaman Tetangga

Pada pengukuran modal sosial ini, kami mencoba mengaitkan posisi sosial rumah tangga di lingkungan tempat tinggalnya. Posisi sosial tersebut dipotret dari tiga

aspek primordial seperti, agama, kesukuan, dan jalinan kekerabatan. Dari aspek agama, kelompok masyarakat yang menjawab “sebagian besar” tetangganya berbeda agama kami definisikan sebagai kelompok minoritas. Sedangkan mereka yang menjawab “sebagian kecil” didefinisikan sebagai kelompok mayoritas. Sementara itu, mereka yang menjawab “tidak ada” didefinisikan sebagai kelompok homogen. Pembacaan yang sama juga digunakan terhadap posisi sosial terkait kesukuan. Sementara itu, posisi sosial terkait relasi kekerabatan dinarasikan sebagaimana adanya.

Berdasarkan pengelompokan sebagaimana diuraikan di atas, terlihat bahwa kelompok masyarakat yang hidup sebagai minoritas, baik dalam hal kesamaan agama atau pun kesukuan, cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terkait kinerja pemerintahan provinsi di mana mereka tinggal. Sementara itu, terkait relasi kekerabatan, kelompok masyarakat yang tidak ada satupun tetangganya yang berkerabat dengan dirinya, menjadi kelompok yang memiliki tingkat kepercayaan tertinggi kepada pemerintah provinsinya.

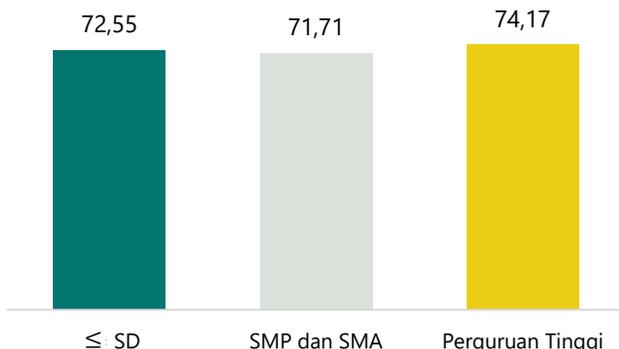
3.3.2 Rasa Percaya Terhadap Pemerintah Pusat



Gambar 3.15. Rasa Percaya Terhadap Pemerintah Pusat menurut Provinsi

Dibandingkan dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah provinsi, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pusat mendapat skor yang sedikit lebih tinggi. Penilaian masyarakat yang menganggap bahwa jajaran pemerintah pusat telah bekerja dengan baik, secara rata-rata mendapat skor sebesar 72,38. Tiga provinsi yang masyarakatnya memberi skor tertinggi adalah Sulawesi Utara (81,49), Gorontalo (80,92), dan Nusa Tenggara Timur (80,82). Sementara itu, tiga provinsi terendah terkait

penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat, secara berturut-turut adalah, Banten (66,59), Papua (66,80), dan Provinsi Aceh (67,04).



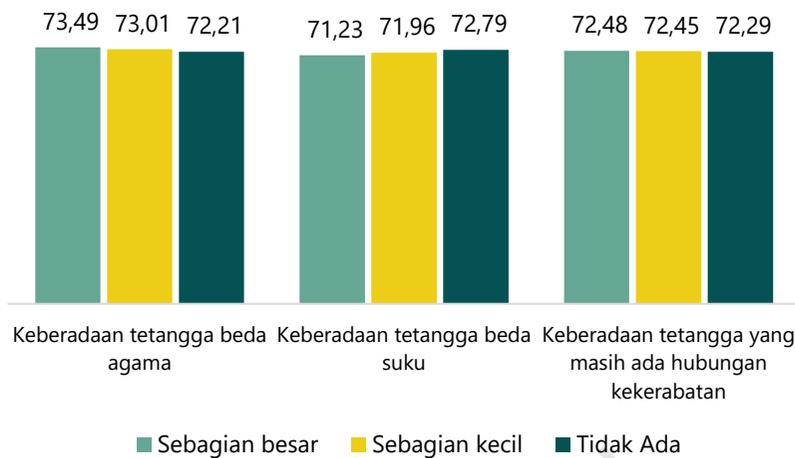
Gambar 3.16. Rasa Percaya Terhadap Pemerintah Pusat menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Sebagaimana kepercayaan kepada pemerintah provinsi, masyarakat berpendidikan tinggi juga menjadi kelompok yang memberi skor tertinggi terkait kepercayaan terhadap pemerintah pusat, dengan memberi skor sebesar 74,17. Sedangkan masyarakat berpendidikan menengah (SMP dan SMA) menjadi kelompok yang memiliki rasa percaya terendah kepada pemerintah pusat, dengan memberi skor 71,71.



Gambar 3.17. Rasa Percaya Terhadap Pemerintah Pusat menurut Pendapatan Rumah Tangga

Berdasarkan kelompok pendapatan rumah tangga, mereka yang berpendapatan terbesar (lebih dari 7,2 juta rupiah per bulan) menjadi kelompok yang memiliki tingkat kepercayaan tertinggi kepada pemerintah pusat. Berdasarkan fakta ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang memiliki rasa percaya yang tinggi kepada pemerintah pusat adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan berpendapatan tinggi. Sementara, mereka yang berasal dari kelompok menengah (berpendidikan dan berpendapatan level menengah) memiliki kecenderungan rasa percaya yang rendah kepada pemerintah pusat.

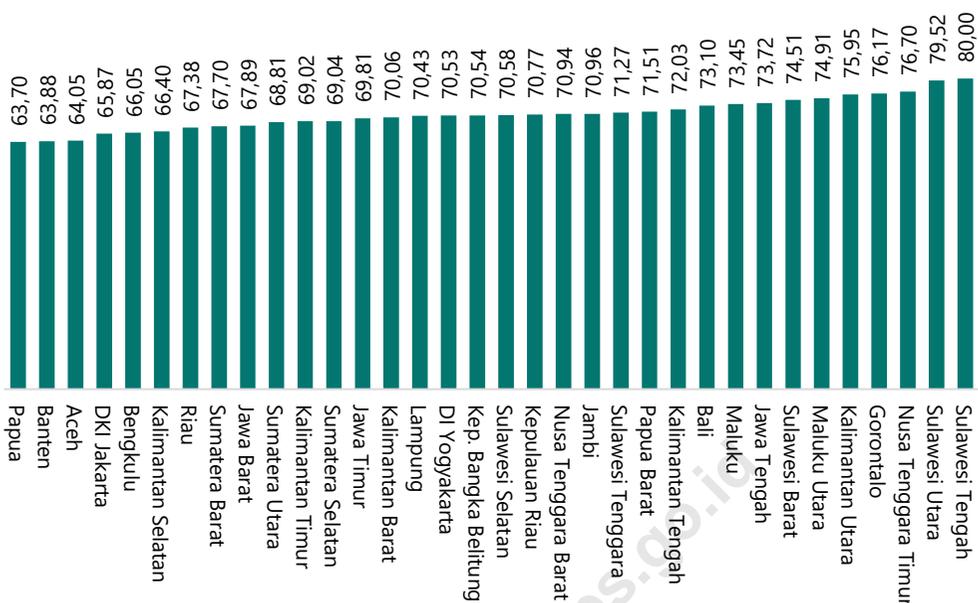


Gambar 3.18. Rasa Percaya Terhadap Pemerintah Pusat menurut Keberagaman Tetangga

Berdasarkan posisi primordial di lingkungan tempat tinggal, kelompok masyarakat yang hidup sebagai minoritas dalam hal kesamaan agama, memiliki tingkat kepercayaan tertinggi terkait kinerja pemerintah pusat, yaitu sebesar 73,49. Sementara, kelompok masyarakat yang hidup sebagai minoritas dalam hal kesamaan suku, menjadi kelompok yang memiliki rasa percaya terendah kepada pemerintah pusat, dengan skor 71,23. Berdasarkan relasi kekerabatan, kelompok masyarakat yang tidak ada satupun tetangganya yang berkerabat dengan dirinya, menjadi kelompok yang memiliki tingkat kepercayaan terendah kepada pemerintah pusat, dengan skor sebesar 72,29.

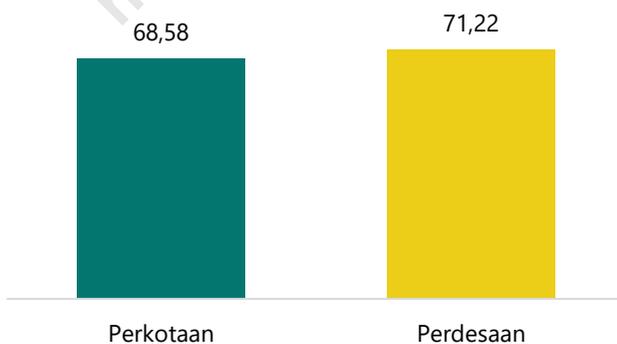
3.3.3. Rasa Percaya Terhadap Proses Pemilu

Pada tataran substansial, Pemilu adalah mekanisme demokratis untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Dalam tataran praktisnya, legitimasi tersebut diperoleh dari jumlah suara para pemilih. Semakin banyak suara memihak yang diperoleh, maka semakin kuat legitimasi yang didapat. Dari perspektif seperti itu, penyelenggaraan Pemilu yang dipercaya masyarakat sudah menjalankan prinsip jujur dan adil menjadi prasyarat penting bagi para calon terpilih untuk mendapatkan legitimasi tersebut. Dengan modal legitimasi itulah, pemerintah, di berbagai levelnya, memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk mengelola pemerintahan. Dengan kalimat lain, kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu menjadi parameter penting dari modal sosial pada ranah institusional.



Gambar 3.19. Rasa Percaya Terhadap Proses Pemilu menurut Provinsi

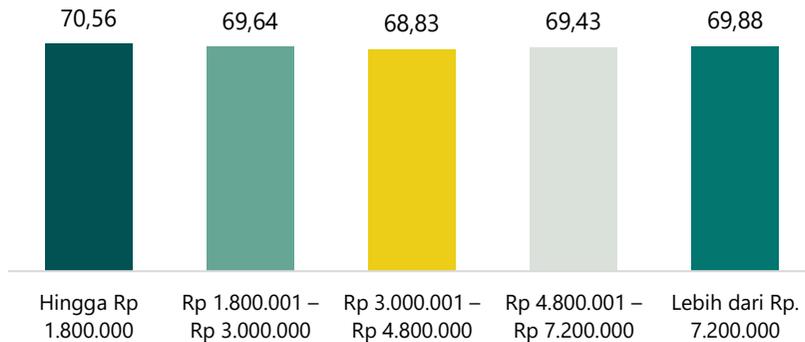
Derajat kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu secara rata-rata berada pada skor yang cukup rendah, yaitu hanya sebesar 69,72 poin. Tiga provinsi dimana masyarakatnya memiliki tingkat kepercayaan terendah terkait proses Pemilu adalah, Papua (63,70), Banten (63,88), dan Aceh (64,05). Sementara itu, tiga provinsi dengan tingkat kepercayaan tertinggi adalah, Sulawesi Tengah (80,00), Sulawesi Utara (79,52), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (76,70).



Gambar 3.20. Rasa Percaya Terhadap Proses Pemilu menurut Klasifikasi Wilayah

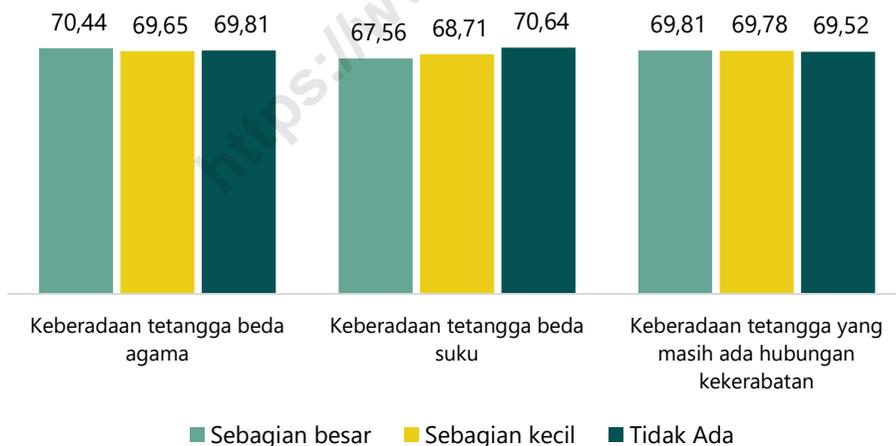
Terdapat hal menarik terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu. Mereka yang berasal dari wilayah perdesaan cenderung memiliki rasa percaya yang relatif lebih tinggi ketimbang mereka yang tinggal di wilayah perkotaan. Jika masyarakat di wilayah perkotaan hanya memberi skor sebesar 68,58 poin, maka masyarakat di perdesaan memberi skor sebesar 71,72 poin untuk kepercayaan terhadap

proses Pemilu.



Gambar 3.21. Rasa Percaya Terhadap Proses Pemilu menurut Pendapatan Rumah Tangga

Sementara itu, apabila tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu disandingkan dengan besaran pendapatan rumah tangga, maka terlihat bahwa mereka yang berasal dari kelompok pendapatan terendah, cenderung memiliki rasa percaya terhadap proses Pemilu yang lebih tinggi ketimbang mereka yang berasal dari kelompok pendapatan rumah tangga yang lainnya. Berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan dan berpendapatan rendah memiliki kecenderungan untuk lebih percaya terhadap proses Pemilu.



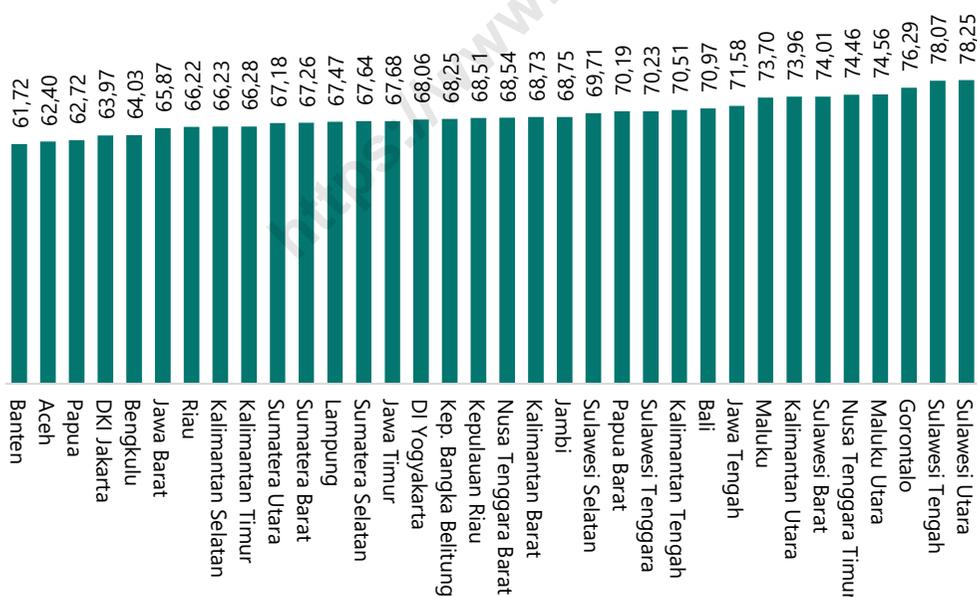
Gambar 3.22. Rasa Percaya Terhadap Proses Pemilu menurut Keberagaman Tetangga

Apabila dipotret berdasarkan posisi primordial di lingkungan tempat tinggal, kelompok masyarakat yang hidup sebagai minoritas dalam hal kesamaan agama, memiliki tingkat kepercayaan tertinggi terhadap proses Pemilu, yaitu sebesar 70,44. Akan tetapi, apabila label minoritas itu terkait dengan kesukuan, maka kelompok masyarakat minoritas tersebut menjadi pihak yang paling tidak percaya terhadap proses Pemilu. Sementara itu, kelompok yang menetap di lingkungan homogen secara kesukuan, cenderung memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap hasil Pemilu. Hal yang

relatif sama juga terjadi di komunitas dengan kekerabatan yang tinggi. Mereka yang memiliki kekerabatan yang tinggi di lingkungan tempat tinggalnya, akan cenderung lebih percaya terhadap hasil Pemilu.

3.3.4 Rasa Percaya Terhadap Pejabat Terpilih Hasil Pemilu

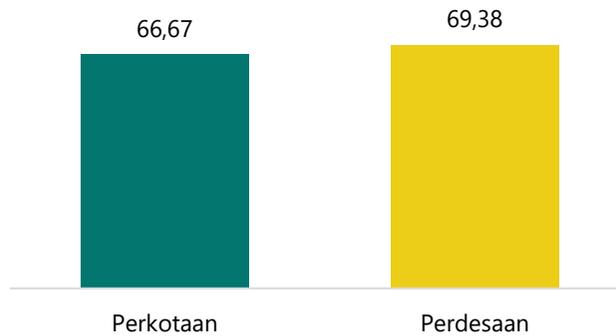
Keluaran utama dari perhelatan Pemilu adalah terpilihnya para pejabat publik, baik di level eksekutif atau pun di level legislatif. Meski Indonesia telah mengadopsi sistem pemilihan terbuka, di mana pemilih dapat secara langsung memilih calon pejabat yang dikehendaknya, akan tetapi, sebetulnya tidak banyak pemilih yang betul-betul mengenal calon pejabat yang fotonya terpajang di surat suara tersebut. Dengan situasi semacam itu, legitimasi para pejabat terpilih tersebut sebetulnya cenderung berasal dari rasa percaya masyarakat. Rasa percaya tersebut berakar dari persepsi mereka bahwa para calon pejabat tersebut telah dibekali partai pengusungnya dengan berbagai pelatihan dan tahapan kaderisasi yang ketat. Cara pandang semacam itu tentu saja berisiko dan dapat berkonotasi negatif. Akan tetapi, perspektif institusional dari pendekatan modal sosial mensyaratkan rasa percaya semacam itu agar pembangunan dapat berjalan lancar dan kesejahteraan dapat terdistribusi dengan merata.



Gambar 3.23. Rasa Percaya Terhadap Pejabat Terpilih Hasil Pemilu menurut Provinsi

Hasil pengukuran modal sosial terkait rasa percaya masyarakat bahwa para pejabat terpilih hasil Pemilu adalah mereka yang memiliki kompetensi memadai, secara agregat cenderung rendah, yaitu hanya sebesar 67,84 poin. Di level provinsi, Banten menjadi wilayah dengan rasa percaya terendah, yaitu hanya sebesar 61,72. Provinsi yang berada di posisi kedua dan ketiga terendah, secara berturut-turut adalah Aceh

(62,40) dan Papua (62,72). Di kutub sebaliknya, tiga provinsi yang memiliki rasa percaya tertinggi secara berturut-turut adalah, Sulawesi Utara (78,25), Sulawesi Tengah (78,07), dan Gorontalo (76,29).



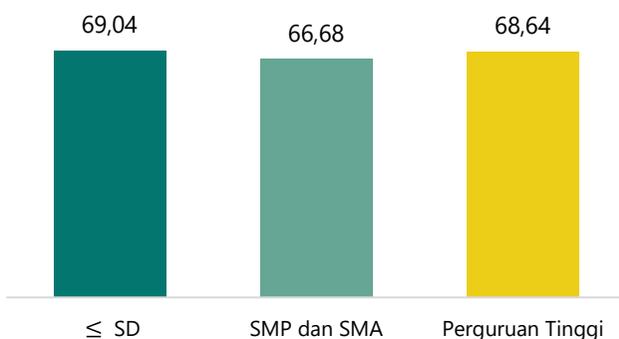
Gambar 3.24. Rasa Percaya Terhadap Pejabat Terpilih Hasil Pemilu menurut Klasifikasi Wilayah

Searah dengan fenomena yang terjadi pada indikator rasa percaya terhadap proses Pemilu, pada indikator ini, mereka yang berasal dari wilayah perdesaan juga cenderung memiliki rasa percaya yang relatif lebih tinggi ketimbang mereka yang tinggal di wilayah perkotaan. Di masyarakat perkotaan, rasa percaya atas kompetensi pejabat terpilih hanya sebesar 66,67 poin. Sementara di masyarakat perdesaan skornya sebesar 69,38 poin.



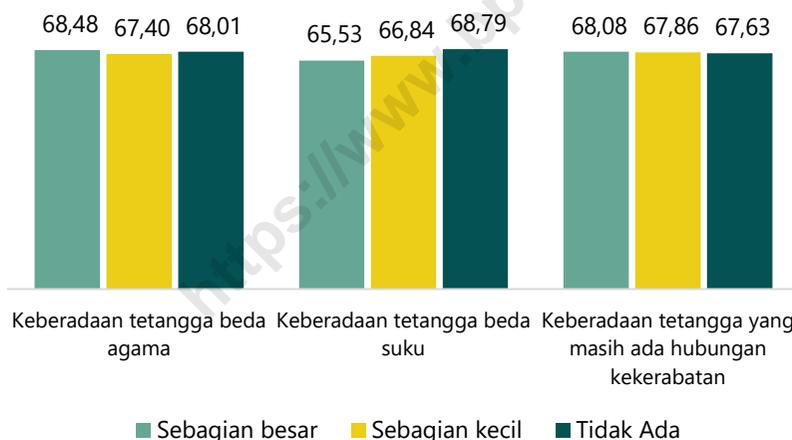
Gambar 3.25. Rasa Percaya Terhadap Pejabat Terpilih Hasil Pemilu menurut Pendapatan Rumah Tangga

Sementara itu, apabila ditilik dari besaran pendapatan rumah tangga, kelompok masyarakat dengan pendapatan terendah secara relatif cenderung memiliki rasa percaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang berada pada kelompok pendapatan rumah tangga lain di atasnya. Sedangkan dari sisi pendidikan, rasa percaya yang lebih tinggi berasal dari mereka yang mengenyam pendidikan paling tinggi hanya selevel sekolah dasar (SD).



Gambar 3.26. Rasa Percaya Terhadap Pejabat Terpilih Hasil Pemilu menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

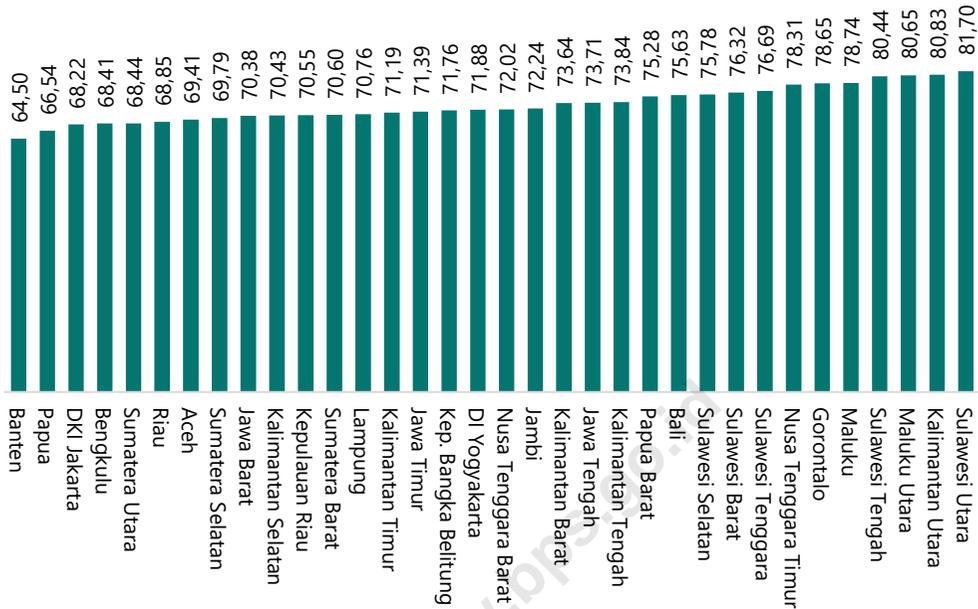
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rasa percaya yang relatif tinggi terkait kompetensi pejabat terpilih hasil Pemilu cenderung berasal dari mereka yang bertempat tinggal di wilayah perdesaan, dengan pendapatan rumah tangga yang relatif rendah, serta berpendidikan paling tinggi hanya setara sekolah dasar (SD).



Gambar 3.27. Rasa Percaya Terhadap Pejabat Terpilih Hasil Pemilu menurut Keberagaman Tetangga

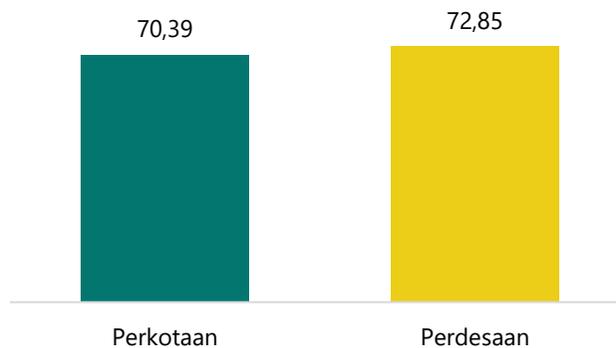
Bila rasa percaya pada kompetensi pejabat hasil Pemilu disandingkan dengan posisi responden di tempat tinggalnya, maka ditemukan pola yang relatif sama dengan yang terdapat pada indikator rasa percaya terhadap proses Pemilu. Tingkat kepercayaan tertinggi terhadap kompetensi pejabat terpilih hasil Pemilu berasal dari mereka yang hidup sebagai minoritas dalam hal kesamaan agama. Akan tetapi, apabila label minoritas itu terkait dengan kesukuan, maka kelompok masyarakat minoritas tersebut menjadi pihak yang paling tidak percaya terhadap kompetensi para pejabat tersebut. Pola lain yang juga sama adalah, kelompok yang tinggal di komunitas dengan kekerabatan yang tinggi akan cenderung lebih percaya terhadap kompetensi para pejabat terpilih hasil Pemilu.

3.3.5. Rasa Percaya Terhadap Aparat Penegak Hukum (Polri)



Gambar 3.28. Rasa Percaya Terhadap Aparat Penegak Hukum (Polri) menurut Provinsi

Hasil pengukuran modal sosial terkait skor rasa percaya masyarakat terhadap aparat penegak hukum (Polri) merentang dari 64,50 di kutub terendah, hingga 81,70 di kutub tertinggi. Secara rata-rata skor rasa percaya tersebut berada di kisaran 71,45. Tiga provinsi dengan skor rasa percaya terendah adalah, Banten (64,50), Papua (66,54), dan DKI Jakarta (68,22). Sedangkan tiga provinsi dengan skor rasa percaya tertinggi adalah, Sulawesi Utara (81,70), Kalimantan Utara (80,83), dan Maluku Utara (80,65).

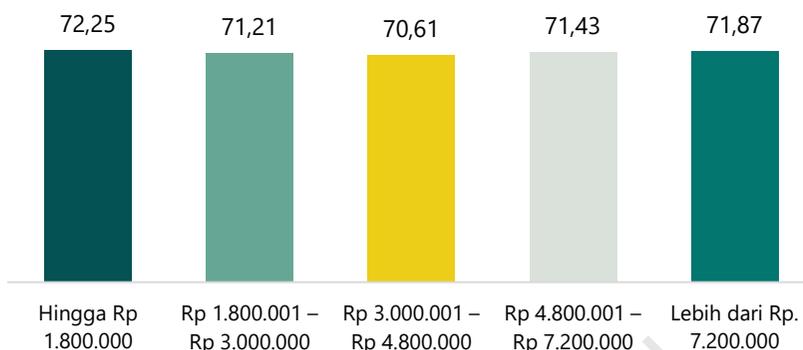


Gambar 3.29. Rasa Percaya Terhadap Aparat Penegak Hukum (Polri) menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Berdasarkan karakteristik kewilayahan, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan secara umum memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan

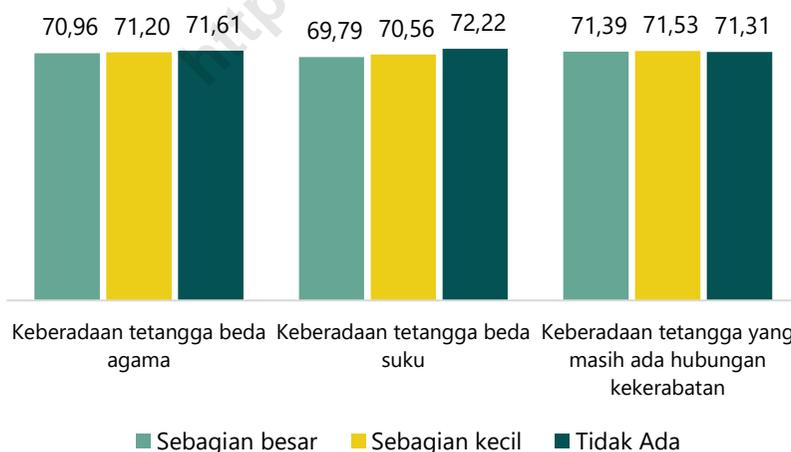
Rasa Percaya

mereka yang tinggal di wilayah perkotaan. Di wilayah perdesaan, rasa percaya masyarakat terhadap kepolisian mendapatkan skor sebesar 72,85. Sementara di masyarakat perkotaan rasa percaya kepada kepolisian sebesar 70,39.



Gambar 3.30. Rasa Percaya Terhadap Aparat Penegak Hukum (Polri) menurut Pendapatan Rumah Tangga

Berdasarkan tingkat pendapatan rumah tangga, skor kepercayaan tertinggi berasal dari mereka yang berasal dari kelompok pendapatan terendah. Skor rasa percaya pada kelompok ini sebesar 72,25. Sementara itu, skor kepercayaan kepada kepolisian yang berasal dari masyarakat dengan pendapatan tertinggi sebesar 71,87. Berdasarkan kedua data tersebut dapat disimpulkan bahwa kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan dan berpenghasilan di bawah 1,8 juta cenderung memiliki rasa percaya yang tinggi kepada kepolisian.



Gambar 3.31. Rasa Percaya Terhadap Aparat Penegak Hukum (Polri) menurut Keberagaman Tetangga

Fakta yang cukup menarik terkait rasa percaya kepada aparat kepolisian tersaji pada gambar di bawah ini. Dari gambar tersebut terlihat bahwa masyarakat yang bertempat tinggal secara homogen cenderung memiliki kepercayaan yang lebih tinggi

kepada kepolisian. Di masyarakat yang tinggal di lingkungan di mana tidak ada satu pun tetangga yang berbeda agama, tingkat kepercayaan terhadap kepolisian mencapai skor sebesar 71,61. Sementara, kelompok masyarakat yang tinggal di lingkungan di mana tidak ada satu pun tetangga yang berbeda suku, tingkat kepercayaan terhadap kepolisian mencapai skor sebesar 72,22. Selain fakta tersebut, gambar di bawah juga menunjukkan bahwa relasi kekerabatan di lingkungan tempat tinggal agaknya tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap rasa percaya masyarakat kepada pihak kepolisian.

<https://www.bps.go.id>

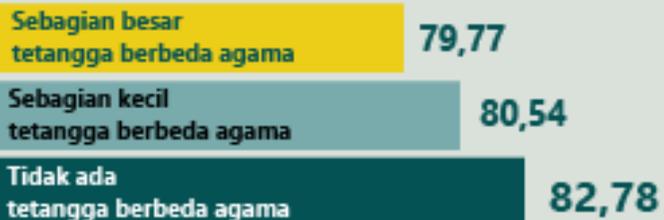
BAB IV

PARTISIPASI SOSIAL



Partisipasi Sosial

Partisipasi saat ada kejadian kematian di lingkungan tempat tinggal



“ Penduduk yang tinggal di lingkungan yang **sebagian besar tetangganya berbeda agama** memiliki partisipasi yang cenderung lebih rendah saat ada kejadian kematian di lingkungan tempat tinggal yaitu sebesar 79,77 persen ”

Partisipasi dalam aktivitas kerja bakti/ gotong royong di lingkungan tempat tinggal



Penduduk Indonesia yang berjenis kelamin **laki-laki** memiliki partisipasi dalam aktivitas kerja bakti/ gotong royong di lingkungan tempat tinggal cenderung lebih tinggi yaitu sebesar 79,94 persen



4.1. Pengantar

Dimensi kedua yang diadopsi dalam pengukuran modal sosial ini adalah dimensi partisipasi sosial. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kerangka kerja (*framework*) pengukuran modal sosial di antaranya adalah mengidentifikasi dimensi yang paling sering diukur menggunakan matriks survei dan kerangka kerja lainnya. Salah satu dimensi tersebut adalah partisipasi sosial.

Partisipasi sosial didefinisikan sebagai keterlibatan dalam kelompok, partisipasi sebagai relawan dalam kelompok atau organisasi. Sementara partisipasi sipil didefinisikan sebagai keterlibatan individu dalam urusan nasional maupun lokal atau daerah, serta persepsi terhadap kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahnya. Dimensi ini diukur dari, pertama, persepsi terhadap kemampuan untuk mempengaruhi suatu kegiatan atau peristiwa. Kedua, seberapa baik dalam menerima informasi mengenai urusan lokal maupun nasional. Ketiga, kontak dengan pejabat publik atau perwakilan politik. Keempat, keterlibatan dalam kelompok. Kelima, kecenderungan untuk memilih (mengikuti pemungutan suara)¹.

Salah satu kunci keberhasilan membangun modal sosial terletak pada kemampuan sekelompok orang dalam suatu asosiasi atau perkumpulan dalam melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial. Masyarakat selalu berhubungan sosial dengan masyarakat yang lain melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan atas prinsip kesukarelaan (*voluntary*), kesamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*) dan keadaban (*civility*). Kemampuan anggota-anggota kelompok/masyarakat untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergis akan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kuat tidaknya modal sosial suatu kelompok².

Modal sosial merupakan perasaan simpati seseorang atau suatu kelompok orang kepada seseorang atau kelompok lainnya. Perasaan simpati dapat mencakup kekaguman, kepedulian, perhatian, empati, penghargaan, rasa hormat, rasa kewajiban, atau kepercayaan untuk orang atau kelompok lain. Modal sosial yang dicakup dalam konsep tersebut tidak hanya terbatas pada modal sosial yang ditemukan dalam satu kelompok atau komunitas (*bonding social capital*), tetapi juga menjangkau modal sosial antarkelompok yang disebut *bridging* dan *linking social capital*³.

Bonding social capital ada dalam hubungan yang erat secara emosional. Didasarkan karena keterikatan perasaan dan kontak yang intens. *Bonding social capital* dicirikan oleh perasaan keterhubungan secara intens yang mencakup perasaan peduli, kasih sayang, dan perhatian seperti yang mungkin ada di antara anggota keluarga, pasangan yang berkomitmen, mitra bisnis lama, atau anggota minoritas yang tertindas. *Linking social capital* ada dalam semi-sosial yang dekat dan didasarkan pada adanya komitmen jangka menengah. *Linking social capital* dicirikan oleh perasaan keterhubungan yang cukup intens seperti rasa hormat, kepercayaan, dan kolegialitas

¹ Rosalyn Harper & Maryanne Kelly. Measuring Social Capital in The United Kingdom. United Kingdom: Office for National Statistics. 2003, h.8.

² Midayanti, Nurma, Dkk, Op. Cit., h.16.

³ Lindon J, Robison, dkk. Social Capital and Poverty Reduction: Toward a Mature Paradigm. United States: Department of Agricultural Economics, Michigan State University, 2002. h.7.

yang mungkin ada diantara rekan kerja, orang yang melakukan tugas serupa atau berbagi tanggung jawab yang sama, dan anggota klub atau komunitas. *Bridging social capital* ada pada orang-orang dalam hubungan asimetris, orang-orang dengan perbedaan yang signifikan dalam sumber daya yang dimiliki. *Bridging social capital* dicirikan oleh perasaan asimetris dari keterhubungan, yang mungkin ada antara bos dan karyawan, guru dan siswa, serta pemimpin negara dan warga negara⁴.

Contoh dari *bridging social capital* adalah orang-orang yang menerima bantuan bencana alam pada umumnya berasal dari kelompok masyarakat yang tinggal berjauhan dan sama sekali tidak kenal dengan kelompok orang yang memberi sumbangan. Hubungan tersebut hanya dijembatani oleh *bridging social capital* yang dibangun oleh rasa simpati, empati, dan peduli sesama. *Linking social capital* yang berbentuk perhatian dari suatu kelompok terhadap kelompok lain tercermin dari kerjasama yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contohnya keberhasilan program pengentasan kemiskinan sangat ditentukan oleh seberapa jauh *linking social capital* bisa terbentuk dalam kerjasama antara semua stakeholder. Dengan kata lain, keberhasilan tersebut ditentukan oleh kontribusi atau partisipasi optimal dari stakeholder sesuai perannya masing-masing⁵.

Sebagaimana pada dimensi rasa saling percaya (*trust*), pengukuran modal sosial pada dimensi partisipasi sosial ini juga dipotret pada level komunitas kewargaan (bersifat lokal), dan di level institusional (global). Pada aspek lokal maupun global, pengukuran modal sosial pada masing-masing level juga didekati dengan 5 (lima) pertanyaan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Aspek dan Pertanyaan Dimensi Partisipasi Sosial

Aspek (1)	Pertanyaan (2)
Ranah Kewargaan (Lokal)	Anda terlibat dalam aktivitas kerja-bakti atau gotong-royong di lingkungan tempat tinggal Anda
	Anda selalu menyempatkan hadir di rumah duka saat ada kejadian kematian di lingkungan tempat tinggal Anda
	Anda selalu menyempatkan hadir dan terlibat dalam pertemuan warga
	Anda bersedia ditunjuk dalam kepanitiaan pada acara-acara perayaan di lingkungan tempat tinggal Anda
	Anda menghormati dan menaati keputusan hasil musyawarah warga, meskipun hal tersebut bertentangan dengan kehendak dan pendapat Anda

⁴ Ibid
⁵ Ibid

Aspek (1)	Pertanyaan (2)
Ranah Institusional (Global)	Anda bersedia terlibat aktif dalam kegiatan penggalangan dana untuk korban bencana alam
	Anda tidak keberatan dan bersedia meluangkan waktu jika terpilih menjadi responden dalam sebuah survei yang diselenggarakan pemerintah
	Anda mendukung aksi solidaritas (demonstrasi) yang menyuarakan kepentingan publik selama hal itu dilakukan dengan dengan cara-cara yang baik
	Anda ikut serta (mencoblos) dalam setiap perhelatan Pemilu/Pilkada
	Anda mendukung program nasional vaksinasi Covid-19

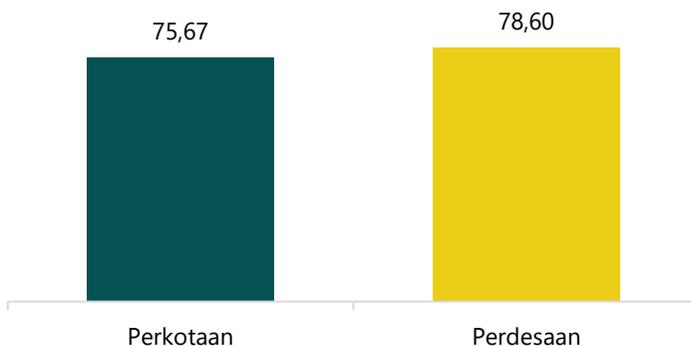
4.2. Partisipasi Sosial di Ranah Kewargaan (Lokal)

Partisipasi sosial pada publikasi ini dibagi menjadi dua tingkatan yakni partisipasi sosial di ranah institusional (global) dan partisipasi sosial di ranah kewargaan (lokal). Partisipasi sosial penduduk dalam ranah lokal atau kewargaan mencakup beberapa indikator seperti partisipasi dalam kegiatan gotong royong, partisipasi saat ada kematian, partisipasi dalam pertemuan warga, kesediaan ditunjuk dalam kepanitiaan acara, dan kesediaan menghormati hasil musyawarah warga di lingkungan tempat tinggal penduduk. Capaian dari indikator pada ranah lokal ini memiliki nilai yang bervariasi bergantung pada karakteristik suatu wilayah dan karakteristik lain yang melekat pada penduduknya. Karakteristik tersebut dapat mencakup klasifikasi wilayah perkotaan dan perdesaan, jenis kelamin, status perkawinan penduduk, umur, pendidikan yang ditamatkan, dan pendapatan rumah tangga. Tidak hanya itu, beberapa karakteristik penting yang perlu didalami pada analisis modal sosial adalah bagaimana karakteristik seperti pluralitas di lingkungan tempat tinggal penduduk memberikan warna dan pengaruh terhadap partisipasi sosial penduduk dalam hal ini adalah pada ranah kewargaan atau lokal. Karakteristik tersebut meliputi keberadaan tetangga yang berbeda agama, suku, dan hubungan kekerabatan di lingkungan tempat tinggal.

4.2.1 Partisipasi dalam Aktivitas Kerja Bakti/Gotong Royong

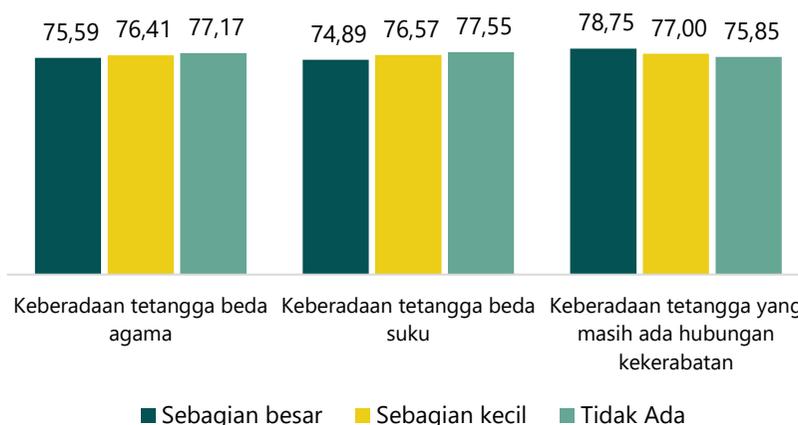
Indikator pertama yang terdapat pada partisipasi sosial pada ranah kognitif kewargaan (lokal) berkaitan dengan aktivitas kerja bakti/gotong royong. Kegiatan atau aktivitas gotong royong merupakan kebiasaan atau aktivitas yang cerminan bangsa Indonesia sejak dahulu kala, di mana kebersamaan yang kuat terpancar dari berbagai aktivitas masyarakat Indonesia baik di desa maupun kota. Di era modernisasi dan globalisasi ini, gotong royong masih menjadi salah satu kekuatan/ciri khas masyarakat Indonesia dalam kehidupan sosialnya. Pada bagian ini akan dibahas bagaimana potret partisipasi sosial penduduk Indonesia pada kegiatan kerja bakti/gotong royong menurut beberapa karakteristik yakni klasifikasi wilayah dan keberagaman atau

pluralitas di tempat tinggal penduduk.



Gambar 4.1. Partisipasi Sosial dalam Aktivitas Kerja Bakti/Gotong Royong menurut Klasifikasi Wilayah

Partisipasi sosial penduduk dalam ranah lokal atau kewargaan pertama yang dicermati adalah partisipasi sosial penduduk Indonesia dalam aktivitas kerja bakti/gotong royong (Gambar 4.1). Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan partisipasi sosial pada aktivitas kerja bakti/gotong royong antara wilayah perkotaan dan perdesaan, di mana partisipasi penduduk di wilayah perdesaan lebih besar daripada wilayah perkotaan. Jika melihat kebiasaan masyarakat perdesaan di Indonesia, hal ini memang sangat umum dijumpai, di mana rasa solidaritas tinggi yang dimiliki penduduk perdesaan. Selain itu, budaya juga menjadi faktor penting dari kebiasaan-kebiasaan dalam terlibat aktif dalam kegiatan di sekitar tempat tinggal. Adanya dorongan atau sebuah kewajiban yang tersirat dalam budaya penduduk perdesaan menjadikan kebiasaan-kebiasaan dalam dinamisnya kehidupan di desa dengan partisipasi sosial yang tinggi dalam berbagai kegiatan.



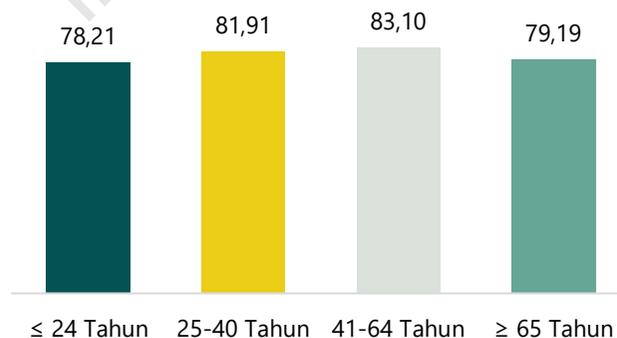
Gambar 4.2. Partisipasi Sosial dalam Aktivitas Kerja Bakti/Gotong Royong menurut Keberagaman Tetangga

Pluralitas di lingkungan tempat tinggal merupakan salah satu karakteristik dan

faktor penting dalam modal sosial, khususnya partisipasi sosial. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa partisipasi dalam kegiatan kerja bakti/gotong royong penduduk yang tinggal di lingkungan homogen paling tinggi daripada penduduk yang tinggal di lingkungan yang lebih heterogen. Jika diamati dengan lebih detail, pola partisipasi tersebut sama untuk semua kategori, di mana semakin homogen lingkungan tempat tinggal penduduk, terdapat kecenderungan semakin tinggi juga partisipasi penduduk dalam kegiatan kerja bakti/gotong royong. Kaitan karakteristik ini dengan modal sosial yang telah diulas pada bagian awal bab ini adalah kuatnya *bonding social capital* yang dimiliki penduduk Indonesia dalam hal partisipasi pada kegiatan kerja bakti. Adanya ikatan atau kesamaan dalam beberapa hal seperti beragama sama, suku yang sama, dan memiliki hubungan kekerabatan antara satu dengan lainnya di lingkungan tempat tinggal mendorong penduduk untuk lebih dalam melakukan atau mengikuti kegiatan kerja bakti/gotong royong.

4.2.2 Partisipasi saat Ada Kejadian Kematian

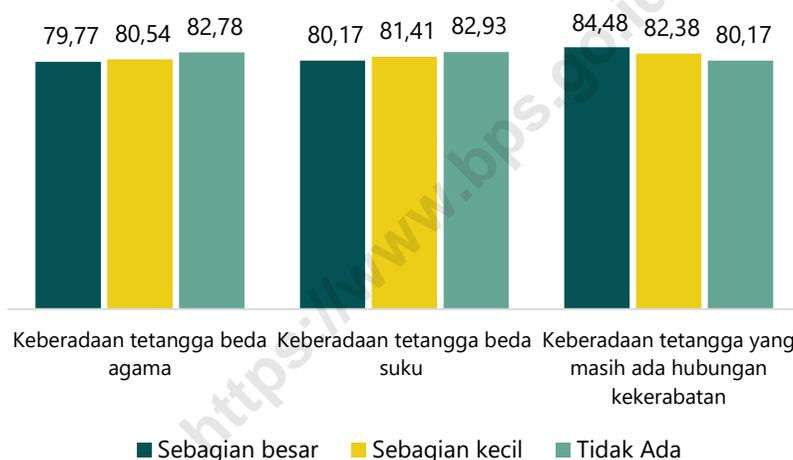
Kematian merupakan salah satu tahapan dalam kehidupan setiap manusia. Dari sisi ilmu demografi, kematian juga menjadi salah bagian yang menjadi fokus utama selain kelahiran dan perpindahan. Kematian juga merupakan kejadian yang tidak bisa dihindari oleh setiap insan yang lahir ke dunia ini. Dalam kebiasaan masyarakat Indonesia, kematian juga menjadi sebuah momentum untuk berkumpul dengan sanak saudara dan warga di lingkungan tempat tinggal dalam upaya mempererat silaturahmi antarwarga. Kebiasaan-kebiasaan ini juga dapat membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Grafik batang di bawah ini merupakan potret partisipasi penduduk Indonesia saat ada kejadian kematian di lingkungan tempat tinggalnya.



Gambar 4.3. Partisipasi Sosial saat Ada Kejadian Kematian menurut Kelompok Umur

Partisipasi sosial penduduk saat ada kejadian kematian jika dilihat dari kelompok umur menunjukkan bahwa penduduk berusia 41 hingga 64 tahun memiliki partisipasi yang paling tinggi daripada kelompok umur lainnya. Selain itu, penduduk yang sudah menginjak usia lanjut dalam hal ini 65 tahun ke atas memiliki tingkat partisipasi kedua terendah, lebih rendah dari penduduk usia produktif. Faktor usia ini dapat dikatakan

menjadi penyebab para lansia yang merupakan kelompok rentan memiliki partisipasi yang rendah. Terbatasnya mobilitas, masalah kesehatan, dan berbagai masalah lainnya yang berkaitan dengan usia menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi lansia dalam ranah lokal. Namun, partisipasi penduduk lansia saat ada kejadian kematian di lingkungannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk muda atau lebih tepatnya 24 tahun ke bawah. Kondisi tersebut dapat disebabkan karena pengalaman dan kedekatan dengan orang lain yang lebih tinggi. Para lansia cenderung memiliki pengalaman yang lebih luas dibandingkan penduduk yang masih muda sehingga para lansia umumnya mengenal hampir seluruh tetangganya. Berbeda dengan penduduk usia lanjut, partisipasi penduduk usia muda (24 tahun ke bawah) saat ada kejadian kematian merupakan yang terendah dari kelompok umur lainnya. Rendahnya partisipasi penduduk usia muda ini dapat disebabkan karena penduduk usia muda cenderung belum memiliki pengalaman yang setara dengan penduduk yang lebih tua dalam hal mengenal tetangga di sekitar tempat tinggalnya.



Gambar 4.4. Partisipasi Sosial saat Ada Kejadian Kematian menurut Keberagaman Tetangga

Tidak berbeda dengan indikator sebelumnya, keberagaman atau pluralitas tetangga di lingkungan tempat tinggal memiliki kekuatan yang sama dalam mendorong partisipasi warga saat ada kejadian kematian. Terlihat bahwa penduduk yang tinggal di lingkungan yang homogen baik secara agama, suku, dan memiliki hubungan kekerabatan dengan tetangganya memiliki tingkat partisipasi yang tertinggi daripada penduduk yang tinggal di lingkungan yang lebih heterogen (sebagian besar dan sebagian kecil). Adanya ikatan atau kesamaan dalam beberapa hal seperti beragama sama, suku yang sama, dan memiliki hubungan kekerabatan antara satu dengan lainnya di lingkungan tempat tinggal mendorong penduduk untuk mengikuti atau berpartisipasi saat ada kejadian kematian di lingkungan tempat tinggalnya.

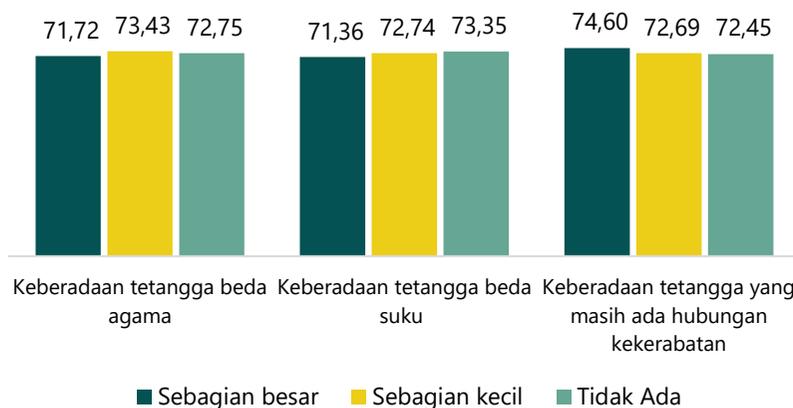
4.2.3 Partisipasi dalam Pertemuan Warga

Selain kegiatan kerja bakti/gotong royong dan saling membantu sesama ketika ada kejadian kematian, kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah pertemuan warga. Pertemuan warga dalam hal ini dapat dilakukan untuk membahas atau merundingkan berbagai hal yang merupakan kepentingan bersama. Pertemuan ini juga dapat dilaksanakan terjadwal maupun sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Grafik di bawah ini menyajikan potret partisipasi penduduk Indonesia dalam pertemuan warga yang di lingkungan tempat tinggalnya.



Gambar 4.5. Partisipasi Sosial dalam Pertemuan Warga menurut Jenis Kelamin

Jika dilihat dari karakteristik jenis kelamin, partisipasi sosial penduduk laki-laki di Indonesia dalam pertemuan warga lebih besar daripada penduduk perempuan, di mana terdapat selisih (gap) sebesar 5,79 poin. Adanya perbedaan capaian atau tingkat partisipasi antara penduduk laki-laki dan perempuan dapat disebabkan beberapa hal, salah satunya adalah budaya patriarki yang secara umum berlaku di Indonesia. Hal tersebut menempatkan laki-laki memiliki peran yang sentral dalam kehidupan baik di rumah tangga maupun kehidupan sosialnya. Pentingnya peran laki-laki dalam kehidupan sosial mendorong secara langsung agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diadakan di lingkungan tempat tinggalnya. Hal tersebut juga berkaitan dengan laki-laki yang sudah menikah, biasanya laki-laki yang sudah menikah memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk kegiatan sosial pada ranah kewargaan atau lokal.

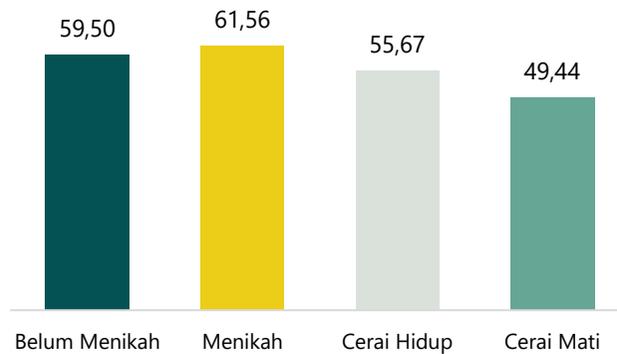


Gambar 4.6. Partisipasi Sosial dalam Pertemuan Warga menurut Keberagaman Tetangga

Dalam pluralitas lingkungan tempat tinggalnya (Gambar 4.6), penduduk yang tinggal di lingkungan yang tidak ada tetangga yang berbeda suku memiliki tingkat partisipasi tertinggi dalam pertemuan warga. Di samping itu, tingkat partisipasi penduduk dalam pertemuan warga di lingkungan yang sebagian merupakan kerabatnya adalah yang tertinggi daripada kelompok lainnya (sebagian kecil dan tidak ada kerabat di lingkungan tempat tinggalnya). Di sisi lain, penduduk yang tinggal di lingkungan yang sebagian kecil tetangganya berbeda agama memiliki tingkat partisipasi yang tertinggi. Pada kasus ini, terlihat bahwa adanya *linking social capital* yang terbentuk dari penduduk-penduduk sehingga ada sebuah ikatan dari penduduk dengan latar belakang yang berbeda.

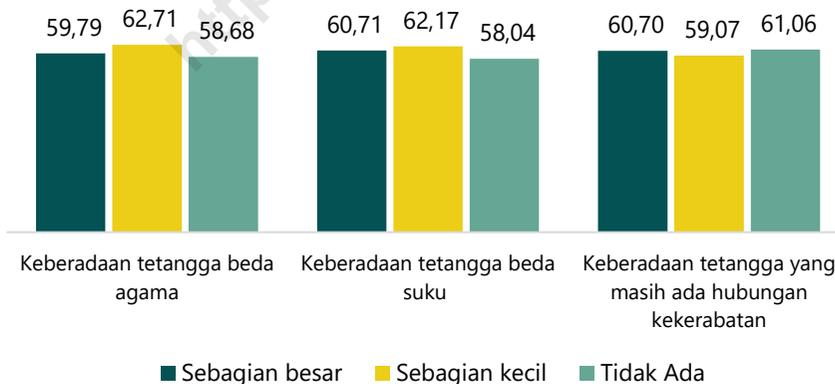
4.2.4 Partisipasi dalam Kepanitiaan Acara

Beragamnya budaya dan kearifan lokal yang dimiliki di seluruh penjuru negeri memberikan ciri khas setiap daerah. Keragaman tersebut memberikan warna dan keunikan tersendiri pada kehidupan masyarakat. Berbagai kegiatan budaya maupun kegiatan-kegiatan lain di masyarakat biasanya tidak lepas dari kerjasama berbagai komponen masyarakat. Dalam sebuah kegiatan, masyarakat biasanya membentuk sebuah kelompok atau panitia untuk merancang dan melaksanakannya. Umumnya setiap pihak terlibat baik tua-muda, laki-laki hingga perempuan, dan seterusnya. Namun demikian, globalisasi dan modernisasi kadang kala menghambat atau justru menjauhkan hingga mengurangi interaksi sosial masyarakat. Salah satunya adalah keterlibatan dalam kepanitiaan acara di lingkungan tempat tinggalnya. Lalu, bagaimana partisipasi penduduk Indonesia dalam kepanitiaan acara di lingkungan tempat tinggalnya? Grafik di bawah ini menyajikan partisipasi sosial penduduk Indonesia dalam kepanitiaan acara menurut status perkawinan.



Gambar 4.7. Partisipasi Sosial dalam Kepanitiaan Acara menurut Status Perkawinan

Secara umum, partisipasi penduduk dalam kesediaan ditunjuk menjadi panitia acara terendah dimiliki oleh penduduk dengan status cerai mati. Penduduk dengan status cerai mati identik dengan mereka yang sudah berusia lanjut, sehingga adanya faktor fisik yang sudah menurun menyebabkan penduduk lansia jarang bahkan tidak bersedia menjadi panitia dalam kegiatan tertentu di lingkungan tempat tinggalnya. Di sisi lain, hal tersebut juga dapat disebabkan karena penduduk berusia lanjut memang tidak dilibatkan dalam kegiatan di lingkungannya. Selain itu, dapat dilihat bahwa penduduk yang menikah memiliki partisipasi yang tertinggi jika ditunjuk dalam kepanitiaan acara. Hal ini dapat disebabkan karena penduduk yang sudah menikah, baik laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang lebih banyak untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di lingkungan tempat tinggalnya.



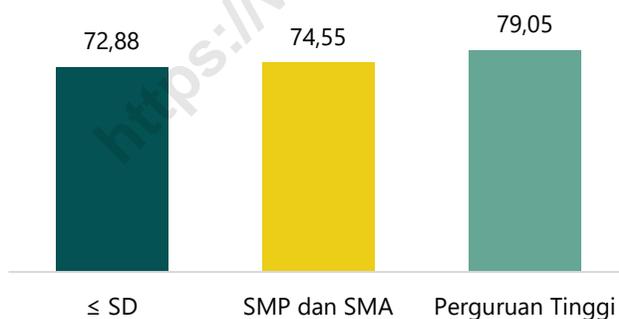
Gambar 4.8. Partisipasi Sosial dalam Kepanitiaan Acara menurut Keberagaman Tetangga

Mencermati partisipasi sosial dari sudut pandang keberagaman tetangga di lingkungan tempat tinggalnya, dari gambar di atas terlihat bahwa pola partisipasi dari penduduk berdasarkan keberagaman tetangga yang berbeda agama dan berbeda suku memiliki pola yang sama. Penduduk yang tinggal di lingkungan yang sebagian kecil berbeda agama dan berbeda suku memiliki tingkat partisipasi tertinggi daripada

kategori lainnya (sebagian besar dan tidak ada) dengan capaian sebesar 62,71 dan 62,17 poin. Tidak hanya itu, penduduk yang tinggal di lingkungan yang heterogen (agama dan suku) memiliki partisipasi yang terendah. Dari kasus ini dapat dilihat juga bahwa sudah terbentuk *linking social capital* antarpenduduk, artinya penduduk memiliki kesadaran untuk berpartisipasi menjadi panitia acara tanpa melihat latar belakang agama dan suku. Temuan menarik lainnya adalah kuatnya *linking social capital* pada penduduk yang tinggal tanpa kerabat di lingkungannya. Terlihat bahwa penduduk yang tinggal di lingkungan tersebut memiliki partisipasi tertinggi dari kelompok lainnya.

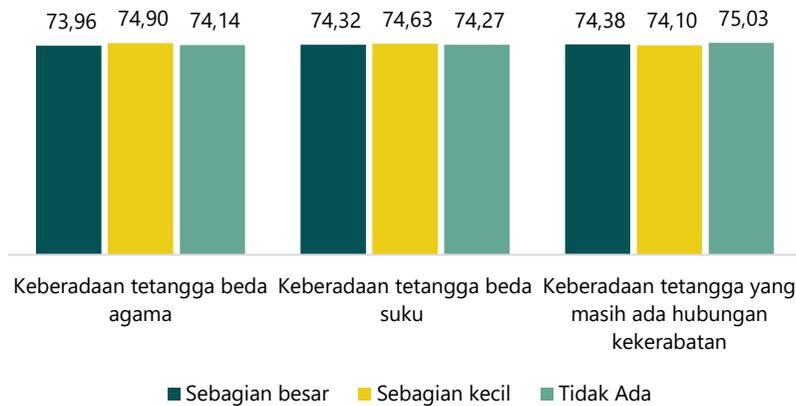
4.2.5 Kesiediaan dalam Menghormati Hasil Musyawarah

Kehidupan sosial masyarakat tidak bisa dilepaskan dari interaksi sosial antarmasyarakat, di mana interaksi tersebut dapat berupa langsung maupun tidak langsung. Seperti pada pembahasan sebelumnya, musyawarah merupakan salah satu bagian atau bentuk dari gotong royong yang masih eksis pada masyarakat Indonesia. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan suatu persoalan, mencari solusi dalam rangka mengambil keputusan bersama. Dalam musyawarah semua pihak harus mengutamakan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan golongan. Bila musyawarah telah mencapai mufakat, maka hasil pemufakatan menjadi keputusan bersama. Semua pihak harus menerima keputusan bersama dengan ikhlas, penuh tanggung jawab, dan lapang dada.



Gambar 4.9. Partisipasi Sosial dalam Menghormati Hasil Musyawarah menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Gambar 4.9 menyajikan partisipasi sosial penduduk dalam menghormati dan menaati keputusan hasil musyawarah warga, meskipun hal tersebut bertentangan dengan pendapat pribadi menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Tingkat partisipasi paling tinggi terdapat pada penduduk yang tamat perguruan tinggi, sementara partisipasi sosial paling rendah terdapat pada penduduk yang berpendidikan SD ke bawah. Semakin tinggi pendidikan semakin tinggi pula tingkat partisipasi sosialnya dalam menghormati hasil musyawarah.



Gambar 4.10. Partisipasi Sosial dalam Menghormati Hasil Musyawarah menurut Keberagaman Tetangga

Jika diamati menurut keberagaman tetangga baik yang tinggal di lingkungan yang heterogen ataupun homogen, tingkat partisipasi sosial penduduk dalam menghormati hasil musyawarah hampir merata, dengan nilai sekitar 74 poin. Tingkat partisipasi paling tinggi terdapat pada penduduk yang tinggal di lingkungan yang tidak ada sama sekali tetangganya yang memiliki hubungan kekerabatan. Selain itu, pola yang sama dimiliki oleh penduduk berdasarkan keberadaan tetangga berbeda agama dan suku, di mana penduduk yang sebagian kecil tetangganya berbeda agama dan suku memiliki capaian tertinggi dalam menghormati hasil musyawarah.

4.3. Partisipasi Sosial di Ranah Institusional (Global)

Partisipasi sosial di ranah kognitif lokal yang merupakan salah satu fokus utama dalam analisis modal sosial telah diulas pada bagian sebelumnya merujuk pada partisipasi penduduk pada kegiatan sehari-hari pada skala kecil, lebih tepatnya pada lingkungan tempat tinggal penduduk. Tingkatan lain dalam partisipasi sosial pada publikasi ini adalah partisipasi sosial di ranah institusional (global) yang berfokus pada partisipasi penduduk pada skala yang lebih besar. Partisipasi pada ranah global ini mencakup beberapa indikator yakni kesediaan terlibat aktif dalam kegiatan penggalangan dana untuk korban bencana alam, kesediaan jika terpilih menjadi responden dalam sebuah survei pemerintah, dukungan terhadap aksi solidaritas yang menyuarakan kepentingan publik dengan cara yang baik, partisipasi dalam kegiatan Pemilu/Pilkada, dan dukungan terhadap program nasional vaksinasi Covid-19. Capaian dari indikator pada ranah global ini memiliki nilai yang bervariasi tergantung pada beberapa karakteristik suatu wilayah. Beberapa karakteristik tersebut mencakup klasifikasi wilayah perkotaan dan perdesaan, tingkat pendidikan yang ditamatkan, pendapatan rumah tangga, dan keberadaan tetangga menurut keberagaman agama, suku dan kekerabatan.

4.3.1 Partisipasi Sosial dalam Kegiatan Penggalangan Dana untuk Korban Bencana Alam

Indonesia memiliki potensi bencana alam dengan intensitas kejadian bencana alam yang tinggi yang datang silih berganti seperti gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, dan gunung meletus. Dampak bencana alam memiliki potensi kerugian yang cukup tinggi. Seringnya terjadi bencana alam di Indonesia membuat pemerintah membutuhkan biaya yang tidak sedikit saat penanggulangan. Dukungan dan kepedulian masyarakat dibutuhkan untuk membantu para korban bencana alam. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa hidup seorang diri, sudah sepatutnya sesama manusia saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya.

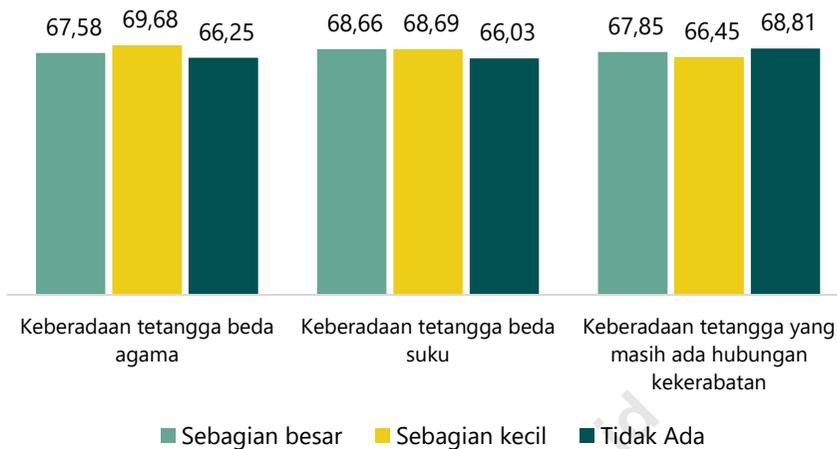
Analisis modal sosial terkait indikator partisipasi sosial dalam kegiatan penggalangan dana untuk korban bencana alam pada masyarakat bertujuan untuk mengukur tingkat solidaritas kemanusiaan tanpa dibatasi sekat-sekat primordial atau pun kewilayahan dengan menanyakan keaktifan responden dalam kegiatan sosial penggalangan dana.



Gambar 4.11. Partisipasi Sosial dalam Kegiatan Penggalangan Dana untuk Korban Bencana Alam menurut Pendapatan Rumah Tangga

Pendapatan rumah tangga mencakup seluruh upah/gaji/ pendapatan termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai, hasil usaha berupa sewa atau keuntungan bagi pengusaha, termasuk transfer yang diperoleh dari pihak lain. Pendapatan rumah tangga digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau konsumsi rumah tangga, baik konsumsi makanan maupun bukan makanan, ditabung dan juga dimanfaatkan untuk transfer kepada pihak lain yang berupa pembayaran hutang, mengirim uang untuk anak/orang tua/saudara, dan juga dipergunakan untuk donasi. Jika diamati dari Gambar 4.11 di atas, tercatat bahwa penduduk dengan kelompok pendapatan lebih dari Rp. 7,2 juta memiliki partisipasi paling tinggi untuk terlibat aktif dalam kegiatan penggalangan dana. Pola pada gambar tersebut mencerminkan semakin tinggi tingkat pendapatan rumah tangga, semakin tinggi pula nilai partisipasinya

sosialnya dalam hal penggalangan dana untuk korban bencana alam.



Gambar 4.12. Partisipasi Sosial dalam Kegiatan Penggalangan Dana untuk Korban Bencana Alam menurut Keberagaman Tetangga

Komponen lain dalam analisis modal sosial, khususnya partisipasi sosial adalah menurut keberadaan tetangga menurut keberagaman agama, suku dan hubungan kekerabatan di lingkungan tempat tinggalnya. Berdasarkan Gambar 4.12, terlihat bahwa nilai partisipasi sosial penduduk untuk bersedia terlibat aktif dalam kegiatan penggalangan dana untuk korban bencana alam ini cukup tinggi, yaitu di atas 66 poin. Penduduk yang tinggal di lingkungan heterogen, yang terdapat tetangga yang beda agama dan beda suku memiliki partisipasi yang lebih tinggi dibanding penduduk yang tinggal di lingkungan yang homogen. Hal tersebut sejalan dengan penduduk yang tinggal di lingkungan yang tidak ada tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan, partisipasi sosialnya juga paling tinggi. Modal sosial pada indikator partisipasi sosial dalam kegiatan penggalangan dan di lingkungan tempat tinggal yang heterogen bisa dikatakan cukup tinggi dibanding lingkungan yang homogen.

4.3.2 Partisipasi Sosial sebagai Responden dalam Sebuah Survei Pemerintah

Untuk mempersiapkan sebuah kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas seringkali pemerintah mengadakan sebuah survei untuk mengumpulkan berbagai macam informasi mengenai karakteristik sosial ekonomi penduduk. Informasi yang terkumpul dijadikan dasar dalam mewujudkan kebijakan terkait pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sarana infrastruktur dan lain-lain. Sering kali pula survei tersebut dilaksanakan untuk mengukur dan mengevaluasi apakah implementasi kebijakan yang digulirkan tersebut sudah memenuhi target dan tepat sasaran.

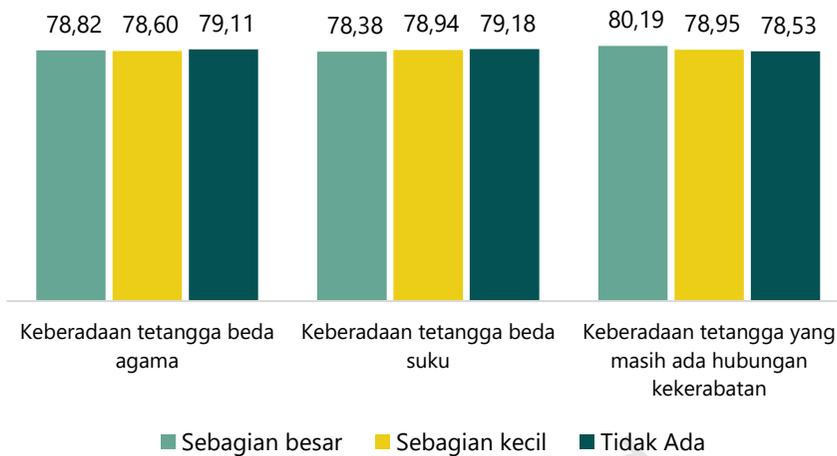
Partisipasi masyarakat menjadi indikator penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang tepat sasaran dan sesuai pada setiap survei yang dilaksanakan oleh pemerintah. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara bersedia dan mau meluangkan waktunya jika terpilih menjadi responden. Indikator partisipasi sosial sebagai responden dalam sebuah survei pemerintah untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk terhadap kegiatan pemerintah dalam hal pengumpulan data. Masyarakat sebagai responden bersedia memberikan waktu penuh dan bersedia menjawab seluruh pertanyaan sensus/survei dengan sukarela demi kelancaran kegiatan survei/sensus yang diselenggarakan oleh pemerintah tanpa mengharapkan imbalan.



Gambar 4.13. Partisipasi Sosial sebagai Responden dalam Sebuah Survei Pemerintah menurut Klasifikasi Wilayah

Partisipasi penduduk wilayah perdesaan untuk bersedia meluangkan waktunya menjadi responden pada sebuah survei yang diselenggarakan pemerintah lebih tinggi nilai partisipasinya dibandingkan dengan penduduk perkotaan (Gambar 4.13). Sifat kekeluargaan penduduk perdesaan lebih kental dibanding perkotaan, hal ini ditunjukkan dengan rasa kepedulian terhadap satu sama lain, saling membantu dan saling memberikan dukungan mampu memupuk rasa kekeluargaan. Rasa simpati dan empati yang ditunjukkan memiliki nilai positif untuk menciptakan kerukunan dalam masyarakat.

Penduduk perdesaan lebih banyak mempunyai waktu luang dibanding perkotaan, terkait dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Banyaknya lahan pertanian yang tersedia di daerah pedesaan membuat sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani. Lebih rendahnya partisipasi penduduk perkotaan dalam sebuah survei pemerintah karena keterbatasan waktu luang mereka. Mobilitas yang tinggi, pergi pagi pulang petang menuju tempat kegiatan lumrah dijumpai pada masyarakat perkotaan. Waktu akhir pekan pun digunakan untuk refreshing ke luar kota dengan keluarga, sehingga agak sulit ditemui di rumah ketika mereka terpilih sampel sebagai responden sebuah survei.



Gambar 4.14. Partisipasi Sosial sebagai Responden dalam Sebuah Survei Pemerintah menurut Keberagaman Tetangga

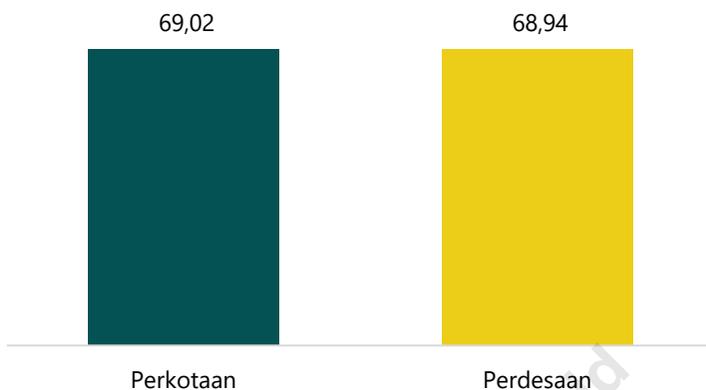
Gambar 4.14 menyajikan indikator partisipasi sosial penduduk yang tidak keberatan dan bersedia meluangkan waktu jika terpilih menjadi responden dalam sebuah survei yang diselenggarakan pemerintah menurut keberagaman tetangga. Secara umum, nilai partisipasi menurut keberagaman tetangga ini tinggi, di atas 78 poin. Pada penduduk yang tinggal di lingkungan dengan keberadaan tetangga beda agama dan beda suku yang cukup heterogen, tingkat partisipasi sosialnya lebih rendah dibanding penduduk yang tinggal di lingkungan homogen. Penduduk yang tinggal di lingkungan dengan agama atau suku yang sama cenderung lebih bersedia meluangkan waktunya sebagai responden sebuah survei, dengan nilai partisipasi di atas 79 poin.

Pola yang berbeda ditunjukkan pada penduduk yang tinggal di lingkungan yang masih ada hubungan kekerabatan dengan tetangganya. Mayoritas penduduk yang mengaku sebagian besar tetangganya adalah kerabatnya, mempunyai nilai partisipasi yang lebih tinggi untuk bersedia menjadi responden jika terpilih dalam sebuah survei pemerintah.

4.3.3 Partisipasi Sosial Terhadap Aksi Solidaritas untuk Kepentingan Publik

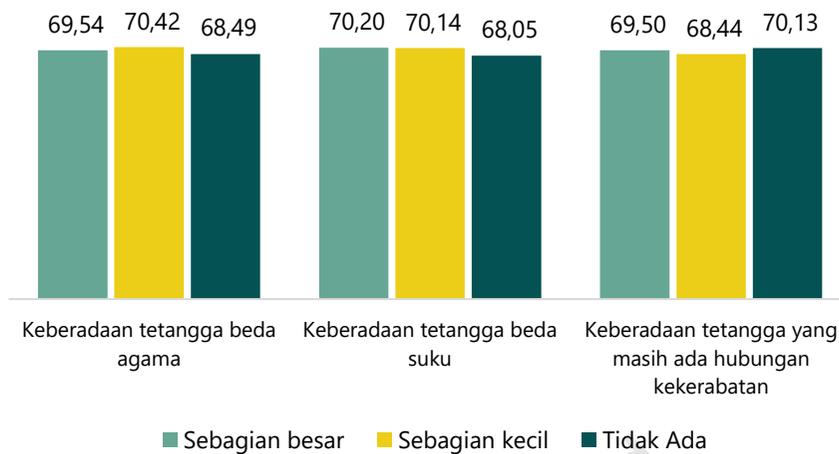
Solidaritas merupakan hubungan antar individu atau komunitas yang terikat dengan rasa setia kawan dan saling percaya. Jika rasa kepercayaan ini terbentuk, maka menjadi satu rasa, menjadi saling hormat-menghormati, menjadi terdorong untuk bertanggung jawab dan memperhatikan antar sesamanya. Pentingnya solidaritas dalam kehidupan sosial adalah untuk membangun rasa saling menghargai dan menciptakan ketertarikan serta ketergantungan antar manusia. Dengan adanya solidaritas, tujuan bersama akan dapat tercapai. Salah satu bentuk solidaritas adalah kekompakan dalam kerja sama atau gotong royong yang sudah ada sejak lama di Indonesia. Gotong royong

terlihat dari bagaimana seorang individu atau suatu keluarga merespon tetangga sekitarnya. Solidaritas sosial ini menjadi penting karena menjadi suatu kekuatan masyarakat dalam menghadapi permasalahan.



Gambar 4.15. Partisipasi Sosial Terhadap Aksi Solidaritas untuk Kepentingan Publik menurut Klasifikasi Wilayah

Indikator partisipasi sosial terhadap aksi solidaritas (demonstrasi) yang menyuarakan kepentingan publik selama hal itu dilakukan dengan dengan cara-cara yang baik bertujuan untuk mengukur tingkat solidaritas penduduk untuk saling merawat, menjaga dan mengontrol kepentingan publik. Artinya untuk mengetahui sikap penduduk bila ada aksi demonstrasi baik dilakukan oleh mahasiswa, buruh, atau masyarakat dalam menyampaikan kritikan, masukan untuk kepentingan publik di jalanan, gedung pemerintahan, dan sebagainya dimana aksi tersebut dilakukan dengan cara-cara yang baik. Partisipasi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan untuk mendukung aksi demonstrasi yang dilakukan dengan cara yang baik nilainya sedikit lebih tinggi dibanding penduduk perdesaan. Penduduk perkotaan lebih berpartisipasi karena umumnya aksi demonstrasi ini dilaksanakan di wilayah kota-kota besar, sehingga mereka lebih berkesempatan untuk ikut berpartisipasi.

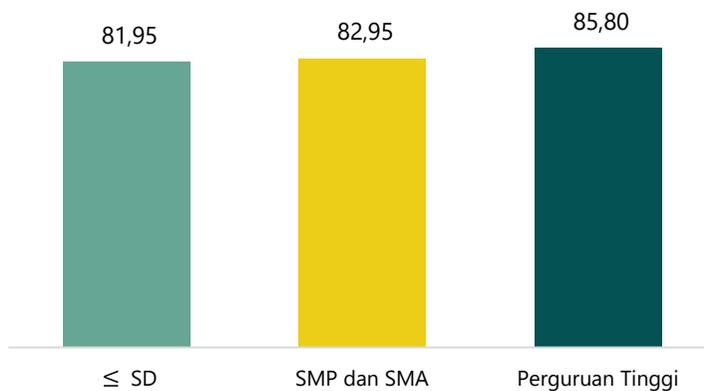


Gambar 4.16. Partisipasi Sosial Terhadap Aksi Solidaritas untuk Kepentingan Publik menurut Keberagaman Tetangga

Jika diamati menurut keberagaman tetangga, penduduk yang tinggal di lingkungan yang beragam agama dan suku mempunyai nilai indikator partisipasi terhadap aksi solidaritas untuk kepentingan publik yang lebih tinggi dibandingkan penduduk yang tinggal di lingkungan yang lebih homogen (Gambar 4.16). Sementara untuk penduduk yang tinggal pada lingkungan yang sama sekali tidak ada tetangganya yang menjadi kerabat, partisipasinya juga lebih tinggi dibanding penduduk yang tinggal pada lingkungan yang masih ada hubungan kekerabatan. Kemajemukan tetangga di sekitar lingkungan tempat tinggal, secara umum tingkat partisipasi sosialnya lebih tinggi dibandingkan lingkungan yang homogen.

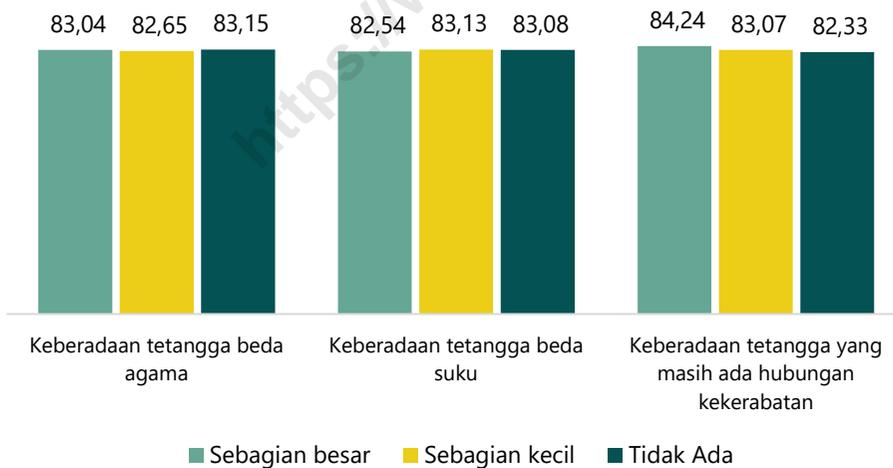
4.3.4 Partisipasi Sosial dalam Kegiatan Pemilu/Pilkada

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara atau daerah dan secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini bisa berupa memberikan suara, ikut serta mencoblos dalam pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada). Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada, menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Indikator partisipasi sosial terkait kegiatan pemilu/pilkada bertujuan untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk terhadap kegiatan pemilu/pilkada yang akan diulas pada paragraf berikutnya.



Gambar 4.17. Partisipasi Sosial dalam Kegiatan Pemilu/Pilkada menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Gambar 4.17 mengulas mengenai tingkat partisipasi penduduk untuk mencoblos atau memberikan suaranya dalam kegiatan pemilu/pilkada menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Secara umum tingkat partisipasi penduduk untuk mencoblos tinggi, di atas 80 poin. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula tingkat partisipasinya. Hal ini menunjukkan pengetahuan yang semakin luas sejalan dengan tingkat pendidikan yang dicapai. Penduduk yang tamat dari perguruan tinggi mempunyai partisipasi yang paling tinggi dalam kegiatan pemilu/pilkada.



Gambar 4.18. Partisipasi Sosial dalam Kegiatan Pemilu/Pilkada menurut Keberagaman Tetangga

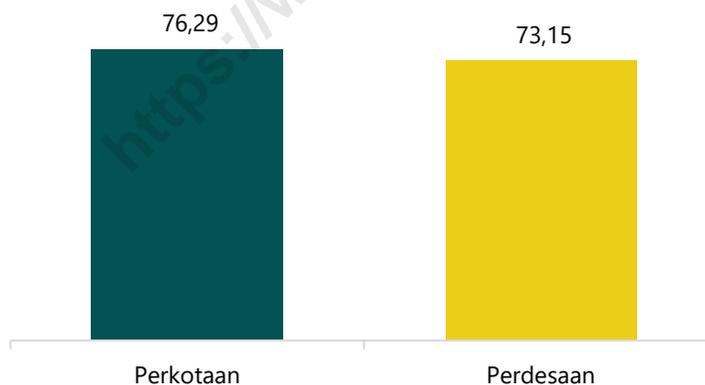
Penduduk yang tinggal di lingkungan yang homogen dari sisi keragaman agama dan suku dengan tetangga sekitarnya mempunyai tingkat partisipasi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungan yang heterogen. Hanya berbeda tipis, tidak terlalu jauh perbedaan nilai partisipasinya antara lingkungan tempat tinggal yang heterogen dan homogen (Gambar 4.18).

Sebaliknya, untuk penduduk yang tinggal di lingkungan yang sebagian tetangganya masih mempunyai hubungan kekerabatan memiliki tingkat partisipasi lebih tinggi untuk mencoblos dalam setiap perhelatan pemilu/pilkada dibandingkan mereka yang tinggal di wilayah yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan tetangga sekitarnya.

4.3.5 Partisipasi Sosial Terhadap Program Nasional Vaksinasi Covid-19

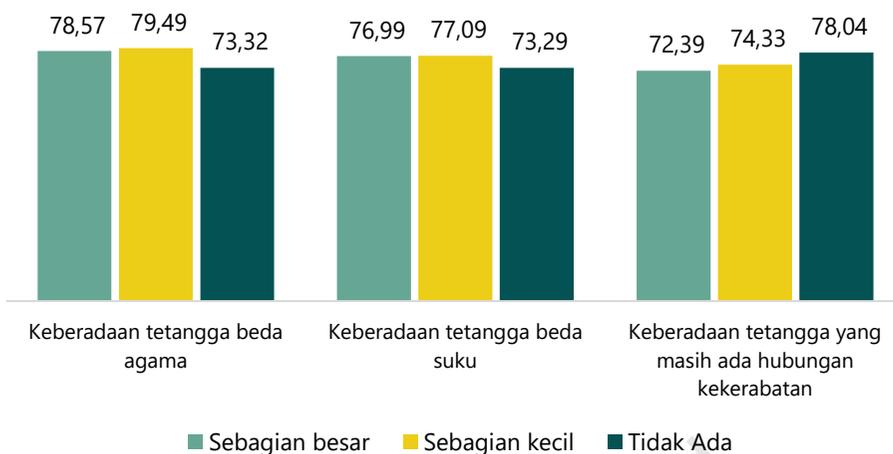
Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pandemi ini telah mengubah cara masyarakat beraktivitas dalam berbagai hal karena adanya beberapa fase pembatasan sosial. Pemerintah menerapkan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) pada berbagai level, untuk menghindari penularan virus Covid-19.

Dalam rangka membentuk kekebalan kelompok terhadap virus Covid-19, pemerintah mengadakan vaksinasi berskala nasional. Analisis partisipasi sosial penduduk terhadap program nasional vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengukur tingkat partisipasi dan mengetahui sikap dukungan penduduk terhadap program tersebut. Mendukung artinya turut/bersedia divaksinasi untuk mensukseskan program vaksinasi nasional Covid-19.



Gambar 4.19. Partisipasi Sosial Terhadap Program Nasional Vaksinasi Covid-19 menurut Klasifikasi Wilayah

Gambar 4.19 menyajikan tingkat partisipasi penduduk terhadap dukungan program nasional vaksinasi Covid-19. Penduduk yang tinggal di perkotaan mempunyai tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Mobilitas penduduk perkotaan yang tinggi serta lingkungan tempat tinggal yang lebih padat, mendorong masyarakat perkotaan untuk berperan lebih aktif dalam kegiatan vaksinasi Covid-19. Hal ini tercermin dari tingginya cakupan vaksinasi booster, mengingat penularan Covid-19 yang cukup tinggi pada wilayah perkotaan.



Gambar 4.20. Partisipasi Sosial Terhadap Program Nasional Vaksinasi Covid-19 menurut Keberagaman Tetangga

Keberagaman tetangga di sekitar tempat tinggal turut mempengaruhi tingkat partisipasi terhadap program nasional vaksinasi Covid-19 seperti yang disajikan pada Gambar 20. Penduduk yang tinggal di lingkungan yang heterogen dari sisi agama dan suku, mempunyai tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibanding lingkungan yang homogen. Demikian pula dengan penduduk yang tinggal pada lingkungan yang tidak ada hubungan kekerabatan, tingkat partisipasi terhadap dukungan program nasional vaksinasi Covid-19 jauh lebih tinggi dibanding lingkungan yang masih terdapat hubungan kekerabatan antar tetangganya.

BAB V

TOLERANSI

<https://www.bps.go.id>



Toleransi

Persepsi terhadap pembatasan ajaran agama orang lain minoritas

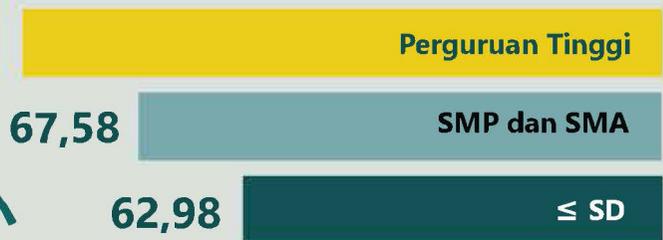


“ Penduduk yang tinggal di lingkungan yang **sebagian besar tetangganya berbeda suku** memiliki persepsi terhadap pembatasan ajaran agama orang lain yang minoritas cenderung lebih tinggi yaitu sebesar 64,20 persen ”

Persepsi hanya berteman baik dengan orang yang satu suku



72,17



Penduduk Indonesia yang memiliki pendidikan tertinggi **perguruan tinggi** memiliki persepsi hanya berteman baik dengan orang yang satu suku cenderung lebih tinggi yaitu sebesar 72,17 persen



5.1. Pengantar

Dimensi ketiga yang diadopsi dalam pengukuran modal sosial ini adalah dimensi toleransi. Toleransi pada dasarnya adalah praktik membiarkan atas dasar kesamaan hak sesama warga yang dapat menjamin hak setiap individu dalam kelompok untuk bebas dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun dengan tidak melanggar nilai-nilai yang berlaku di komunitas dan hak-hak orang lain. Toleransi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dapat terlihat dari sikap toleran terhadap persahabatan antar suku bangsa dan agama maupun kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Toleransi merupakan salah satu perwujudan modal sosial kognitif yang dipahami sebagai sikap mau menerima dan menghargai perbedaan di antara anggota masyarakat. Toleransi antar anggota masyarakat dapat menjamin hak setiap individu untuk bebas dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun dengan tidak melanggar nilai-nilai yang berlaku di komunitas dan hak-hak orang lain. Toleransi merupakan sikap atau perilaku manusia mengikuti aturan, dimana seseorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku orang lain (Bakar, 2015).

Studi yang dilakukan oleh Bourdieu (1986), Fukuyama (1995, 1999), dan Putnam (1993, 2000) menunjukkan bahwa negara yang memiliki modal sosial yang tinggi, mampu dan berhasil menyelesaikan persoalan yang dihadapi dengan solusi yang lebih baik dibanding negara yang memiliki modal sosial rendah. Modal sosial tersebut meliputi tiga elemen penting yaitu norma sosial, kepercayaan, dan jaringan sosial. Norma sosial yang perlu dibangun dalam hubungan masyarakat-pemerintah adalah kepercayaan, akuntabilitas, kemitraan, partisipasi, dan responsivitas; sedangkan dalam hubungan antar masyarakat warga adalah solidaritas, toleransi, kepercayaan, dan kerjasama.

Istilah toleransi semakin banyak dibicarakan oleh peneliti-peneliti dalam mendefinisikan modal sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Stole dan Rochon dalam (Santoso, 2020), mengoperasionalkan konsep "modal sosial publiknya" sebagai toleransi dan kerja sama. Mereka menanyakan beberapa pertanyaan fundamental, dalam menyusun kerangka modal sosial tersebut. Pertanyaan terkait toleransi yang terpenting adalah pada akhirnya jenis toleransi yang mengakui hak kelompok lain untuk berpartisipasi sebagai warga negara merupakan hal yang paling krusial demi keberlangsungan negara terutama mereka mengambil contoh negara demokratis.

Dari beberapa penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa orang yang tergabung dalam suatu kelompok tertentu atau yang berpartisipasi dalam masyarakat, akan memiliki sikap toleransi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bukan anggota kelompok. Selain itu seiring dengan meningkatnya toleransi dan sikap kepercayaan, maka akan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dalam toleransi, kehidupan sosial dan beragama juga hendaknya tidak tersisih dari satu sama lain dan musti terintegrasi. Sikap toleransi beragama bukan berarti harus membenarkan keyakinan pemeluk agama lain atau harus meyakini bahwa semua agama merupakan jalan yang benar dan direstui. Namun, yang paling dibutuhkan adalah sikap saling menghargai terhadap pilihan orang lain, dan eksistensi golongan lain (Bakar,

2015). Dalam beragama, salah satu prinsip kebebasan beragama yaitu memahami dan menghargai realitas perbedaan (Rosyidi, 2019). Perbedaan itu mencakup masalah-masalah perbedaan keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau ketuhanan yang diyakininya. Begitu juga dengan kehidupan sosial. Toleransi dalam kehidupan sosial juga sangat penting, dimana dapat tercermin dari sikap tidak membedakan di antara suku dan ras. Dengan kata lain, toleransi dalam kehidupan sosial dan beragama akan dapat berjalan dengan selaras, selama kita dapat memahami dan menghargai realitas perbedaan yang ada di masyarakat.

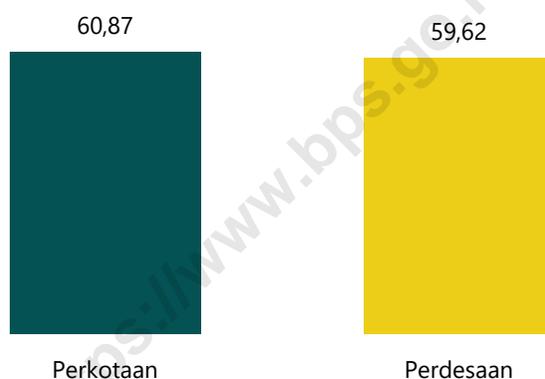
Berbeda dengan 2 (dua) dimensi sebelumnya, pembahasan indikator pada dimensi toleransi tidak diklasifikasikan menjadi dua level, baik itu level komunitas kewargaan (bersifat lokal), atau pun level institusional (global). Merujuk pada kajian teoritis yang telah dilakukan, penelitian mengenai toleransi dalam modal sosial pada umumnya tidak diperlakukan sebagai dimensi utuh tersendiri. Toleransi pada umumnya diposisikan sebagai subset, atau menjadi salah satu bagian dari rumah besar dimensi rasa saling percaya (*trust*) atau dimensi partisipasi sosial. Pemisahan tema toleransi menjadi dimensi tersendiri pada penyusunan modal sosial ini didasarkan pada realitas sosial yang terjadi di Indonesia. Setidaknya pada kurun 10 tahun terakhir, wacana intoleransi cukup sering mengejutkan kita. Kesadaran akan realitas plural di banyak sisi keindonesiaan kita mulai diusik. Kebhinekaan kita sedang diuji. Dengan latar seperti itu, pemisahan toleransi menjadi dimensi tersendiri diikhtiarkan menjadi semacam alat deteksi dini (*early warning system*) bagi para pemangku kebijakan. Meski dengan banyak keterbatasan, dimensi toleransi dalam penyusunan modal sosial ini secara umum diukur dari dua sisi pandang: potret perilaku dan persepsi mayoritas terhadap minoritas, dan penerimaan atas perbedaan dalam lingkup interaksi sosial. Secara lebih spesifik, parameter pengukuran dimensi toleransi disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1. Parameter Pengukuran untuk Dimensi Toleransi

Dimensi (1)	Pertanyaan (2)
Toleransi	<p>Anda akan membiarkan orang lain melakukan aktivitas yang mereka pandang sebagai pelaksanaan ajaran agamanya, meskipun menurut Anda ritual tersebut tidak benar</p> <p>Karena Anda bagian dari mayoritas penganut agama di lingkungan Anda, maka Anda berhak mengontrol atau membatasi aktivitas keagamaan warga lain yang minoritas.</p> <p>Anda akan cenderung hanya berteman baik (karib) dengan orang yang satu suku dengan Anda</p> <p>Kebijakan pembangunan sudah sewajarnya memberi prioritas (berpihak) kepada masyarakat dari kelompok agama mayoritas</p> <p>Kebijakan pembangunan sudah sewajarnya memberi prioritas (berpihak) kepada masyarakat dari kelompok suku asli (pribumi)</p> <p>Anda cenderung tidak suka kepada orang yang mendebat/membantah pendapat/pandangan Anda</p>

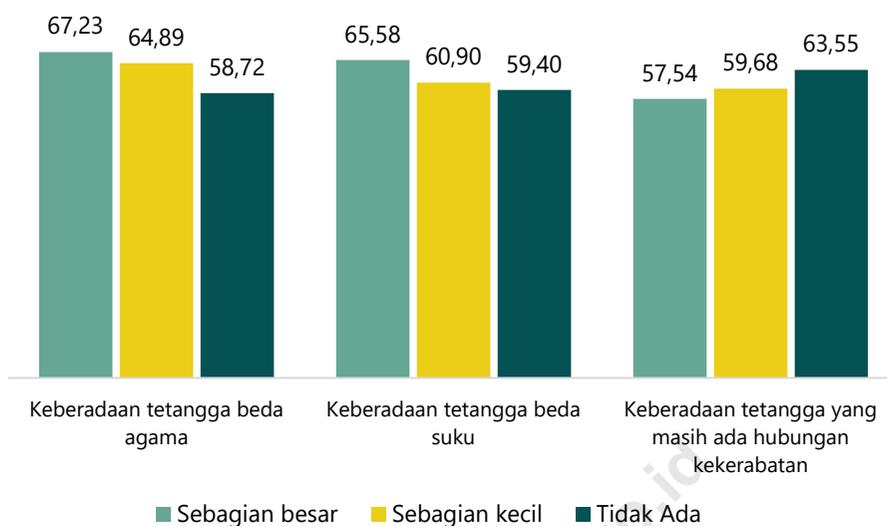
5.2. Persepsi Terhadap Pembatasan Pelaksanaan Ajaran Agama Orang Lain yang Minoritas

Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap individu dalam memilih agama dan keyakinan yang dipercayainya. Kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan tersebut penting untuk menciptakan kehidupan harmonis yang saling menghormati martabat setiap manusia. Namun dalam realitanya, masih banyak muncul kelompok intoleran yang menentang kebebasan beragama dan berkeyakinan tersebut, diantaranya seperti penertiban rumah ibadah dan maraknya ujaran kebencian terhadap identitas agama. Kelompok minoritas merupakan salah satu sasaran utama dari aksi kelompok intoleran tersebut. Adapun kelompok intoleran tersebut memiliki persepsi terhadap pembatasan pelaksanaan ajaran agama orang lain yang minoritas, dan dapat diklasifikasikan menurut wilayah, ataupun keberagaman tetangganya.



Gambar 5.1. Persepsi Terhadap Pembatasan Pelaksanaan Ajaran Agama Orang Lain yang Minoritas menurut Klasifikasi Wilayah

Berdasarkan Gambar 5.1, dapat dilihat bahwa penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk memiliki persepsi terhadap pembatasan pelaksanaan ajaran agama orang lain yang minoritas yaitu sebesar 60,87 dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan memiliki sikap toleransi keyakinan beragama yang lebih rendah dibandingkan penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan.



Gambar 5.2. Persepsi Terhadap Pembatasan Pelaksanaan Ajaran Agama Orang Lain yang Minoritas menurut Keberagaman Tetangga

Berdasarkan persepsi terhadap pembatasan pelaksanaan ajaran agama orang lain orang lain yang minoritas pada Gambar 5.2, dapat dilihat bahwa adanya pola yang sama di antara persepsi tersebut menurut keberadaan tetangga berbeda agama dan keberadaan tetangga berbeda suku. Penduduk yang tinggal di wilayah yang sebagian besar keberadaannya tetangganya berbeda agama (heterogen) memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk memiliki persepsi terhadap pembatasan pelaksanaan ajaran agama orang lain yang minoritas yaitu sebesar 67,23 dibandingkan dengan mereka yang tinggal di wilayah yang sebagian kecil atau tidak ada tetangga yang berbeda agama.

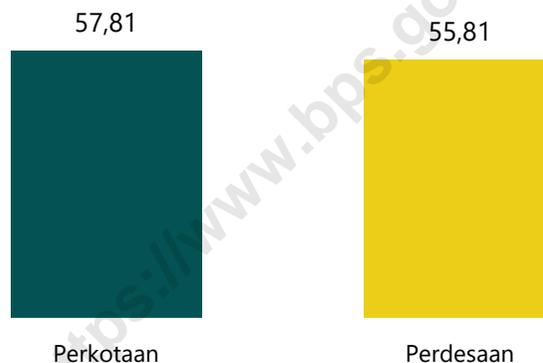
Sejalan dengan hal tersebut, penduduk yang tinggal di wilayah yang sebagian besar keberadaannya tetangganya berbeda suku memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk memiliki persepsi terhadap pembatasan pelaksanaan ajaran agama orang lain yang minoritas yaitu sebesar 65,58 dibandingkan dengan mereka yang tinggal di wilayah yang sebagian kecil atau tidak ada tetangga yang berbeda suku. Hal tersebut berarti bahwa semakin banyak tetangga yang berbeda agama dan berbeda suku di lingkungannya, semakin rendah sikap toleransi keyakinan beragama yang dimiliki penduduk tersebut.

Berbanding terbalik dengan hal tersebut, penduduk yang tinggal di wilayah yang sebagian besar keberadaannya tetangganya masih ada hubungan kekerabatan memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk memiliki persepsi terhadap pembatasan pelaksanaan ajaran agama orang lain yang minoritas yaitu sebesar 57,54 dibandingkan dengan mereka yang tinggal di wilayah yang sebagian kecil atau tidak ada tetangganya yang memiliki hubungan kekerabatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin

banyak tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan di lingkungannya, semakin tinggi sikap toleransi keyakinan beragama yang dimiliki penduduk tersebut.

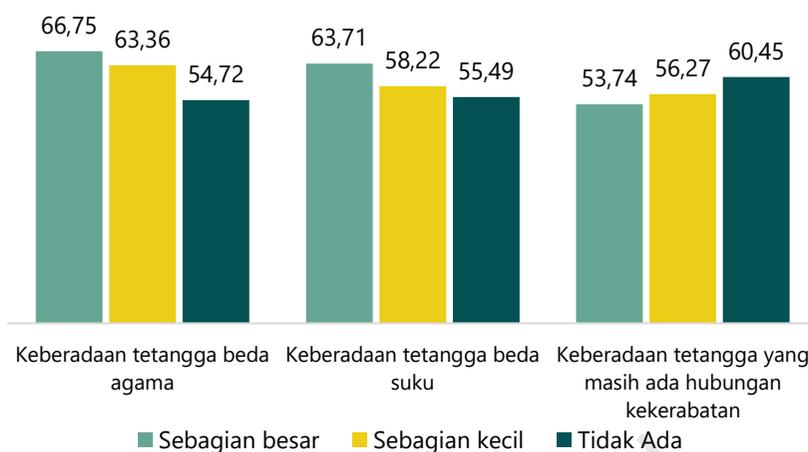
5.3. Persepsi Terhadap Pembangunan Sewajarnya Berpihak pada Kelompok Agama Mayoritas

Pembangunan merupakan proses multidimensional yang didalamnya ada faktor sosial yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Dalam pelaksanaannya pembangunan juga berarti memberikan hak bagi setiap warga masyarakat untuk mengambil peran yang sama keterlibatannya. Pembangunan seharusnya dilakukan secara menyeluruh, karena pembangunan yang tidak merata dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta akan menimbulkan unsur ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok atau golongan tertentu.



Gambar 5.3. Persepsi Terhadap Pembangunan Sewajarnya Berpihak pada Kelompok Agama Mayoritas menurut Klasifikasi Wilayah

Berdasarkan Gambar 5.3, dapat dilihat bahwa penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan juga memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk memiliki persepsi terhadap pembangunan sewajarnya berpihak pada kelompok agama mayoritas yaitu sebesar 57,81 dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan memiliki sikap toleransi keyakinan beragama yang lebih rendah dibandingkan penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan.



Gambar 5.4. Persepsi Terhadap Pembangunan Sewajarnya Berpihak pada Kelompok Agama Mayoritas menurut Keberagaman Tetangga

Berdasarkan persepsi terhadap pembangunan sewajarnya berpihak pada kelompok agama mayoritas pada Gambar 5.4, dapat dilihat bahwa adanya pola yang sama di antara persepsi tersebut menurut keberadaan tetangga berbeda agama dan keberadaan tetangga berbeda suku. Penduduk yang tinggal di wilayah yang sebagian besar keberadaannya tetangganya berbeda agama memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk memiliki persepsi terhadap pembangunan sewajarnya berpihak kepada kelompok agama mayoritas yaitu sebesar 66,75. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk berbeda agama (heterogen) yang tinggal di lingkungannya, semakin rendah sikap toleransi yang dimiliki penduduk tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, penduduk yang tinggal di wilayah yang sebagian besar keberadaannya tetangganya berbeda suku memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk memiliki persepsi terhadap pembangunan sewajarnya berpihak kepada kelompok agama mayoritas yaitu sebesar 63,71. Hal tersebut berarti bahwa semakin banyak tetangga yang berbeda suku di lingkungannya, semakin rendah sikap toleransi keyakinan beragama yang dimiliki penduduk tersebut. Padahal seharusnya dalam konteks sosial budaya dan agama, toleransi harus memiliki sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat, misalnya toleransi beragama dimana kelompok agama masyarakat yang mayoritas dalam suatu kelompok masyarakat seharusnya memberikan tempat bagi kelompok agama lain untuk hidup di lingkungannya (Bakar, 2015).

Berbanding terbalik dengan hal tersebut, penduduk yang tinggal di wilayah yang sebagian besar keberadaannya tetangganya masih ada hubungan kekerabatan memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk memiliki persepsi terhadap pembangunan sewajarnya berpihak kepada kelompok agama mayoritas yaitu sebesar 53,74. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak tetangga yang masih ada hubungan

kekerabatan di lingkungannya, semakin tinggi sikap toleransi yang dimiliki penduduk tersebut.

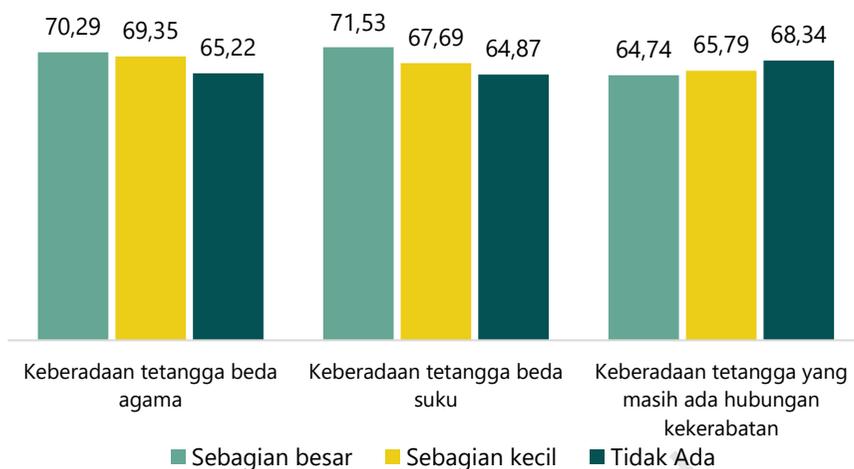
5.4. Persepsi Cenderung Hanya Berteman Baik Dengan Orang yang Satu Suku

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman yang luar biasa banyaknya. Keberagaman suku merupakan satu dari sekian banyak keragaman di Indonesia, dimana suku merupakan pengelompokan atau penggolongan orang-orang yang memiliki satu keturunan. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Oleh karena itu, hal tersebut dapat menjadi tantangan dan kewajiban warga masyarakat untuk memperkuat sikap toleransi dalam keberagaman yang ada.



Gambar 5.5. Persepsi Cenderung Hanya Berteman Baik dengan Orang yang Satu Suku menurut Klasifikasi Wilayah

Berdasarkan Gambar 5.5, dapat dilihat bahwa bahwa penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk memiliki persepsi terhadap kecenderungan hanya berteman baik dengan orang yang satu suku yaitu sebesar 66,87 dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan memiliki interaksi kehidupan sosial yang lebih rendah dibandingkan penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan.



Gambar 5.6. Persepsi Cenderung Hanya Berteman Baik dengan Orang yang Satu Suku menurut Keberagaman Tetangga

Berdasarkan persepsi cenderung hanya berteman baik dengan orang yang satu suku pada Gambar 5.6, dapat dilihat bahwa adanya pola yang sama di antara persepsi tersebut menurut keberadaan tetangga berbeda agama dan keberadaan tetangga berbeda suku. Penduduk yang tinggal di wilayah yang sebagian besar keberadaan tetangganya berbeda agama memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk memiliki persepsi terhadap kecenderungan hanya berteman baik dengan orang yang satu suku yaitu sebesar 70,29 dibandingkan dengan mereka yang tinggal di wilayah yang sebagian kecil atau tidak ada tetangganya yang berbeda agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk berbeda agama (heterogen) yang tinggal di lingkungannya, semakin rendah interaksi kehidupan sosial yang dimiliki penduduk tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, penduduk yang tinggal di wilayah yang sebagian besar keberadaan tetangganya berbeda suku memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk memiliki persepsi terhadap kecenderungan hanya berteman baik dengan orang yang satu suku yaitu sebesar 71,53 dibandingkan dengan mereka yang tinggal di wilayah yang sebagian kecil atau tidak ada tetangganya yang berbeda suku. Hal tersebut berarti bahwa semakin banyak tetangga yang berbeda suku di lingkungannya, semakin rendah sikap toleransi yang dimiliki penduduk tersebut.

Berbanding terbalik dengan hal tersebut, penduduk yang tinggal di wilayah yang sebagian besar keberadaan tetangganya masih ada hubungan kekerabatan memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk memiliki persepsi terhadap kecenderungan hanya berteman baik dengan orang yang satu suku yaitu sebesar 64,74 dibandingkan dengan mereka yang tinggal di wilayah yang sebagian kecil atau tidak ada tetangganya yang masih ada hubungan kekerabatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan di lingkungannya, semakin tinggi interaksi kehidupan sosial yang dimiliki penduduk tersebut.

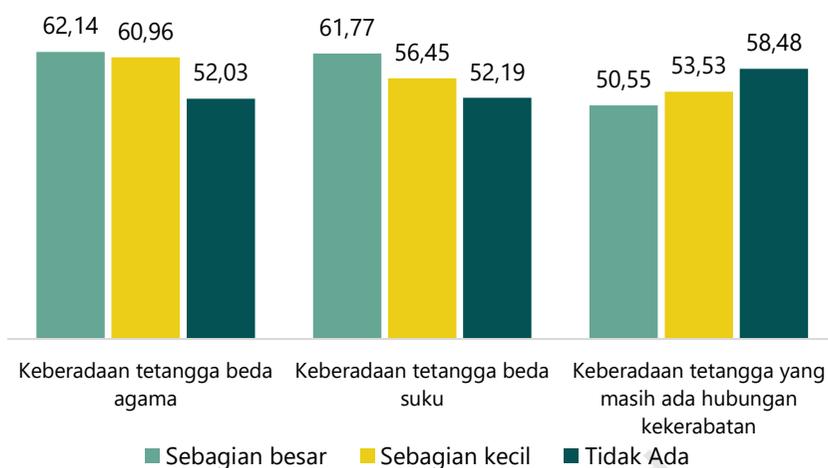
5.5. Persepsi Terhadap Pembangunan Sewajarnya Berpihak Pada Masyarakat Pribumi

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat, meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan seringkali dilakukan hanya pada masyarakat pribumi, dimana pembangunan yang tidak merata tersebut dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Persepsi terhadap pembangunan sewajarnya berpihak pada masyarakat pribumi dapat dibedakan menurut klasifikasi wilayah, ataupun keberagaman tetangganya



Gambar 5.7. Persepsi Terhadap Pembangunan Sewajarnya Berpihak pada Masyarakat Pribumi menurut Klasifikasi Wilayah

Berdasarkan Gambar 5.7, dapat dilihat bahwa penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan juga memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk memiliki persepsi terhadap pembangunan sewajarnya hanya berpihak pada masyarakat pribumi yaitu sebesar 55,16 dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan memiliki sikap toleransi yang lebih rendah dibandingkan penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan.



Gambar 5.8. Persepsi Terhadap Pembangunan Sewajarnya Berpihak pada Masyarakat Pribumi menurut Keberagaman Tetangga

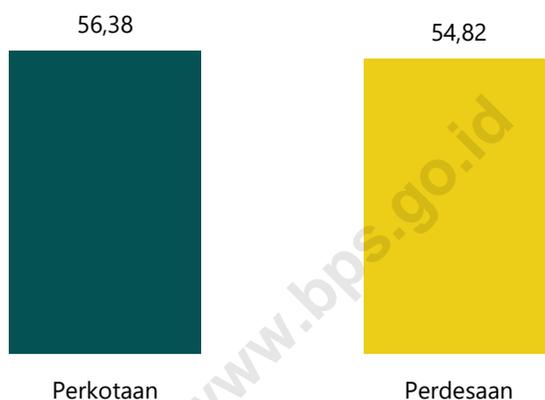
Berdasarkan persepsi terhadap pembangunan sewajarnya berpihak pada masyarakat pribumi pada Gambar 5.8, dapat dilihat bahwa adanya pola yang sama di antara persepsi tersebut menurut keberadaan tetangga berbeda agama dan keberadaan tetangga berbeda suku. Penduduk yang tinggal di wilayah yang sebagian besar keberadaannya berbeda agama memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk memiliki persepsi terhadap pembangunan sewajarnya hanya berpihak pada masyarakat pribumi yaitu sebesar 62,14 dibandingkan dengan mereka yang tinggal di wilayah yang sebagian kecil atau tidak ada tetangganya yang berbeda agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk berbeda agama (heterogen) yang tinggal di lingkungannya, semakin rendah sikap toleransi yang dimiliki penduduk tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, penduduk yang tinggal di wilayah yang sebagian besar keberadaannya berbeda suku memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk memiliki persepsi terhadap pembangunan sewajarnya hanya berpihak pada masyarakat pribumi yaitu sebesar 61,77 dibandingkan dengan mereka yang tinggal di wilayah yang sebagian kecil atau tidak ada tetangganya yang berbeda suku. Hal tersebut berarti bahwa semakin banyak tetangga yang berbeda suku di lingkungannya, semakin rendah sikap toleransi yang dimiliki penduduk tersebut.

Berbanding terbalik dengan hal tersebut, penduduk yang tinggal di wilayah yang sebagian besar keberadaannya masih ada hubungan kekerabatan memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk memiliki persepsi terhadap pembangunan sewajarnya hanya berpihak pada masyarakat pribumi yaitu sebesar 50,55 dibandingkan dengan mereka yang tinggal di wilayah yang sebagian kecil atau tidak ada tetangganya masih ada hubungan kekerabatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan di lingkungannya, semakin tinggi sikap toleransi yang dimiliki penduduk tersebut.

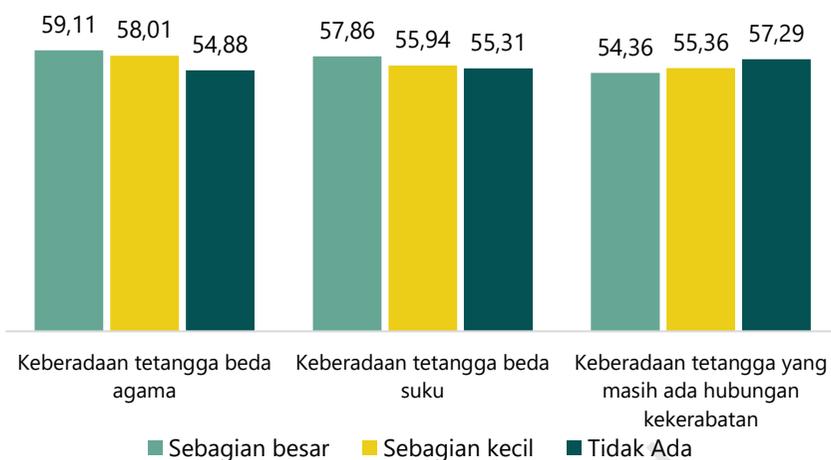
5.6. Persepsi Terhadap Kecenderungan Tidak Suka pada Orang yang Membantah Pendapat Responden

Toleransi diartikan sebagai rasa hormat seorang manusia terhadap manusia lain dengan tidak memadamkan suku, agama, ras ataupun golongan. Toleransi juga didefinisikan sebagai sikap modern yang menggambarkan saling menghargai dan menghormati perbedaan dan merupakan salah satu upaya dalam pencegahan konflik dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, sikap toleransi adalah sikap menahan ego dan berusaha mendengarkan pendapat orang lain, meskipun pendapat tersebut berbeda dengan kita.



Gambar 5.9. Persepsi Terhadap Kecenderungan Tidak Suka pada Orang yang Membantah Pendapat Responden menurut Klasifikasi Wilayah

Berdasarkan Gambar 5.9, dapat dilihat bahwa penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan juga memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk memiliki persepsi terhadap kecenderungan tidak suka pada orang yang membantah pendapat diri yaitu sebesar 56,38 dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahwa penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan memiliki sikap toleransi yang lebih rendah dibandingkan penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan.



Gambar 5.10. Persepsi Terhadap Kecenderungan Tidak Suka pada Orang yang Membantah Pendapat Responden menurut Keberagaman Tetangga

Berdasarkan persepsi terhadap kecenderungan tidak suka pada orang yang membantah pendapat pada Gambar 5.10, dapat dilihat bahwa adanya pola yang sama di antara persepsi tersebut menurut keberadaan tetangga berbeda agama dan keberadaan tetangga berbeda suku. Penduduk yang tinggal di wilayah yang sebagian besar keberadaan tetangganya berbeda agama juga memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk tidak suka pada orang yang membantah pendapatnya yaitu sebesar 59,11 dibandingkan dengan mereka yang tinggal di wilayah yang sebagian kecil atau tidak ada tetangganya yang berbeda agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk berbeda agama (heterogen) yang tinggal di lingkungannya, semakin rendah sikap toleransi yang dimiliki penduduk tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, penduduk yang tinggal di wilayah yang sebagian besar keberadaan tetangganya berbeda suku juga memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk tidak suka pada orang yang membantah pendapatnya yaitu sebesar 57,86. Hal tersebut berarti bahwa semakin banyak tetangga yang berbeda suku di lingkungannya, semakin rendah sikap toleransi yang dimiliki penduduk tersebut.

Berbanding terbalik dengan hal tersebut, penduduk yang tinggal di wilayah yang sebagian besar keberadaan tetangganya masih ada hubungan kekerabatan juga memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk tidak suka pada orang yang membantah pendapatnya yaitu sebesar 54,36 dibandingkan dengan mereka yang tinggal di wilayah yang sebagian kecil atau tidak ada tetangganya yang masih ada hubungan kekerabatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan di lingkungannya, semakin tinggi sikap toleransi yang dimiliki penduduk tersebut.

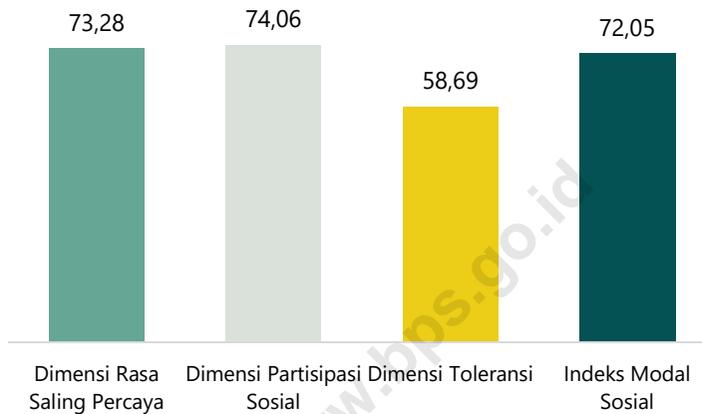
BAB VI

MODAL SOSIAL

PENDUDUK INDONESIA



Pengukuran modal sosial hasil tahun 2021 menggunakan tiga dimensi seperti yang sudah dijabarkan pada Bab 2 Metodologi, yaitu dimensi rasa saling percaya, dimensi partisipasi sosial dan dimensi toleransi. Pada dimensi rasa saling percaya dan partisipasi sosial, masing-masing terdiri dari 10 indikator yang dikelompokkan menjadi 2 level, yaitu, level lokal dan level global. Ruang lingkup level lokal memotret interaksi di tingkat hunian hingga cakupan wilayah kabupaten/kota, dan pada level global didefinisikan sebagai interaksi di level provinsi dan nasional. Sementara untuk dimensi toleransi terdiri dari 5 indikator.

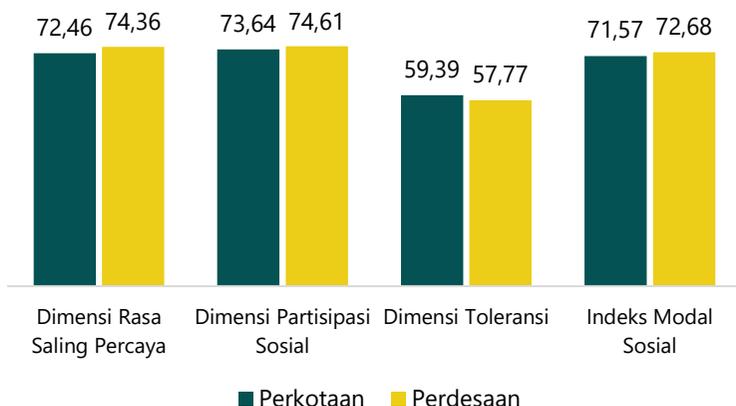


Gambar 6.1. Indeks Modal Sosial menurut Dimensi

Hasil pengukuran indeks Modal Sosial tahun 2021 diperoleh nilai indeks sebesar 72,05 dari skala 0-100. Gambar 6.1 menyajikan nilai-nilai dimensi penyusun indeks modal sosial. Dimensi partisipasi sosial nilai indeksnya tertinggi dibandingkan dua dimensi lainnya. Sementara dimensi terendah terdapat pada dimensi toleransi.

6.1. Indeks Modal Sosial Indonesia menurut Beberapa Karakteristik

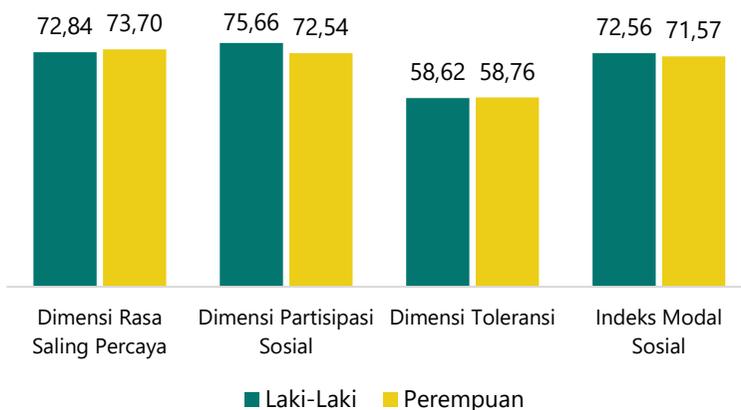
Hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan baik antara perorangan maupun kelompok. Suatu kelompok masyarakat dengan modal sosial tinggi memiliki kemungkinan menyelesaikan persoalan dengan lebih mudah. Sebab, telah terjalin kerjasama yang baik dengan sesama. Sedangkan kelompok masyarakat dengan modal sosial yang rendah akan lebih sulit menyelesaikan permasalahan. Perbedaan modal sosial yang ada biasanya bervariasi antar kelompok berdasarkan karakteristiknya. Karakteristik yang umum digunakan untuk pengelompokkan yakni klasifikasi wilayah, karakteristik demografi, dan status perekonomian. Klasifikasi wilayah itu sendiri dibedakan menjadi dua, yakni perdesaan dan perkotaan sedangkan karakteristik demografi yang digunakan ialah jenis kelamin, status perkawinan, kelompok umur, dan tingkat pendidikan. Selain itu, kondisi perekonomian dilihat dari kelompok pendapatan rumah tangga per bulan. Berikut ini merupakan hasil identifikasi variasi modal sosial yang dimiliki penduduk berdasarkan karakteristik yang telah disebutkan.



Gambar 6.2. Indeks Modal Sosial menurut Klasifikasi Wilayah

Modal sosial pada individu yang berasal dari interaksi kelompok pada dasarnya berlandaskan kepercayaan, hubungan timbal balik, dan kerjasama (Carpenter, 2004). Landasan inilah yang masih sering dijumpai di daerah perdesaan daripada daerah perkotaan yang mayoritas masyarakatnya hidup dalam lingkungan yang tidak begitu mengenal satu sama lain. Berdasarkan Gambar 6.2, penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perdesaan juga cenderung memiliki Indeks Modal Sosial yang lebih tinggi yakni sebesar 72,68, jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan yang indeks modal sosialnya sebesar 71,57.

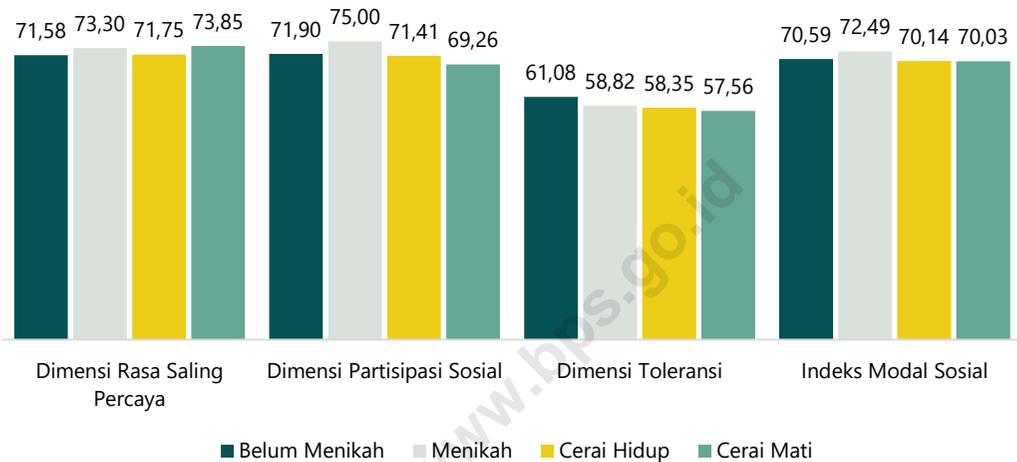
Hal tersebut sejalan pula dengan indeks dimensi rasa saling percaya dan partisipasi sosial dimana wilayah perdesaan nilai indeksnya lebih tinggi dibanding perkotaan. Sebaliknya untuk dimensi toleransi, penduduk yang tinggal di perkotaan indeks toleransinya lebih tinggi dibanding di wilayah perdesaan.



Gambar 6.3. Indeks Modal Sosial menurut Jenis Kelamin

Indeks modal sosial laki-laki lebih tinggi (72,56) jika dibandingkan dengan perempuan (71,57) seperti yang disajikan pada Gambar 6.3. Jika dilihat berdasarkan

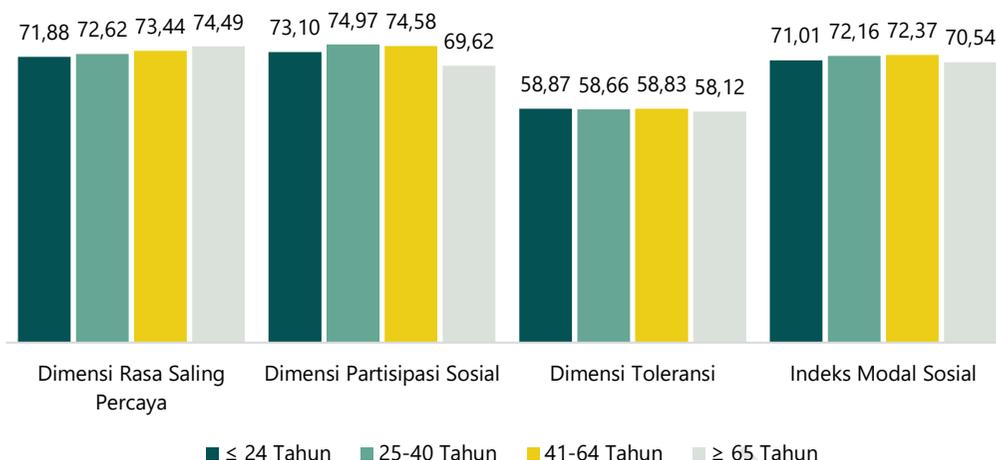
dimensi, indeks dimensi rasa saling percaya pada perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Demikian juga pada dimensi toleransi, nilai indeksnya untuk perempuan sedikit lebih tinggi dibanding laki-laki, sangat tipis perbedaannya. Pada dimensi partisipasi sosial berlaku sebaliknya, partisipasi laki-laki lebih tinggi dibandingkan partisipasi perempuan. Laki-laki lebih aktif untuk mengikuti kegiatan gotong royong, ikut serta dalam pertemuan warga, terlibat dalam kegiatan penggalangan dana, serta mendukung aksi solidaritas yang menyuarakan kepentingan publik dengan cara yang baik.



Gambar 6.4. Indeks Modal Sosial menurut Status Perkawinan

Keberlangsungan proses sosial mencerminkan kuatnya modal sosial yang dimiliki kelompok masyarakat. Modal sosial itu sendiri dapat tercermin dari hubungan sosial dan aktivitas sosial lainnya. Hubungan sosial dan aktivitas sosial ini dapat dibangun baik melalui ikatan darah maupun perkawinan. Dengan kata lain adanya ikatan perkawinan akan seseorang akan memiliki modal sosial yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan indeks modal sosial Indonesia tahun 2021 (Gambar 6.4) dimana penduduk yang sudah menikah memiliki indeks modal sosial paling tinggi, yakni sebesar 72,49. Indeks modal sosial penduduk yang sudah cerai, baik cerai hidup maupun cerai mati lebih rendah jika dibandingkan dengan penduduk yang belum menikah, yakni masing-masing sebesar 70,14 dan 70,03.

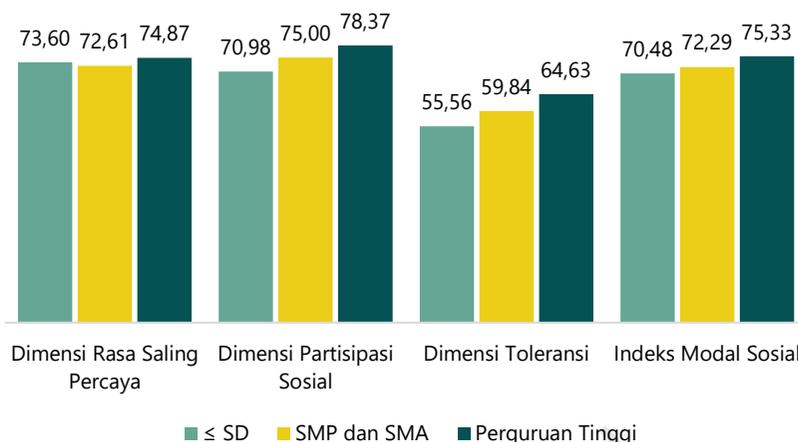
Jika diamati menurut indeks per dimensinya, nilai indeks menurut status perkawinan memiliki pola yang cukup berbeda. Pada dimensi rasa saling percaya nilai indeks tertinggi terdapat pada penduduk yang berstatus cerai mati, dan yang paling rendah pada status yang belum menikah. Sementara penduduk yang berstatus cerai mati pada dimensi partisipasi sosial dan dimensi toleransi terjadi sebaliknya, nilai indeks partisipasinya paling rendah, masing-masing sebesar 69,26 dan 57,56.



Gambar 6.5. Indeks Modal Sosial menurut Kelompok Umur

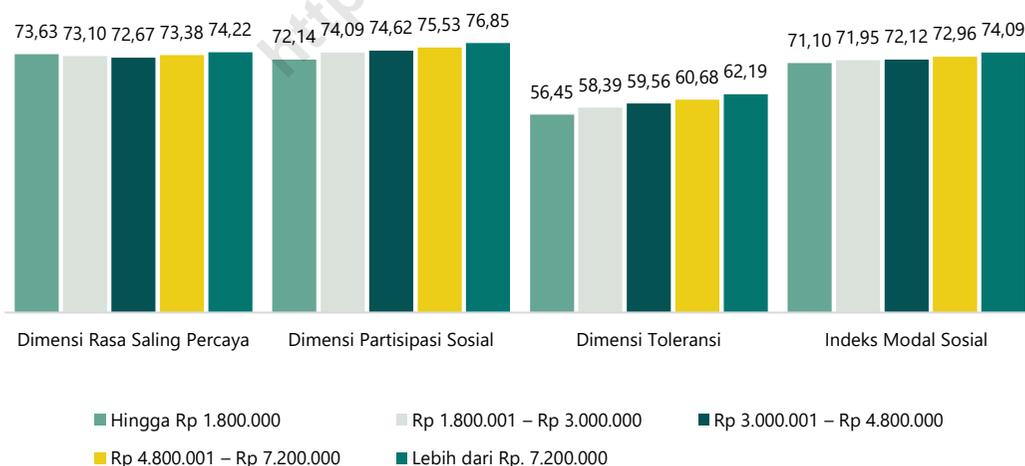
Penduduk yang berada pada kelompok umur 41-64 tahun memiliki modal sosial yang lebih besar (72,37). Penduduk yang berusia lebih dari atau sama dengan 65 tahun ke atas memiliki indeks modal sosial terendah yakni 70,54. Pola pada Gambar 6.6 menunjukkan nilai indeks modal sosial semakin meningkat seiring bertambahnya usia seseorang, semakin produktif akan semakin meningkat modal sosialnya. Tetapi nilai indeks sosial ini akan menurun di usia lansia. Modal sosial merupakan hasil akumulasi dari pengalaman seseorang selama hidupnya yang seiring dengan bertambahnya usia (Lambert dkk, 2006).

Pada dimensi rasa saling percaya, nilai indeks tertinggi terdapat pada penduduk lansia yang berusia 65 tahun ke atas. Semakin matang usianya, semakin tinggi tingkat kepercayaannya. Sementara pada dimensi partisipasi sosial, nilai indeks tertinggi terdapat pada penduduk usia produktif, di rentang usia 25-40 tahun dan 41-64 tahun. Hal yang menarik terdapat pada dimensi toleransi, dimana nilai indeks toleransi menurut kelompok umur hampir sama di angka 58 poin. Artinya modal sosial pada dimensi toleransi ini cukup merata pada setiap kelompok usia.



Gambar 6.6. Indeks Modal Sosial menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Variasi modal sosial juga ditunjukkan berdasarkan pengelompokan menurut tingkat pendidikan (lihat Gambar 6.6). Semakin tinggi pendidikan tertinggi yang ditamatkan, semakin tinggi pula modal sosialnya. Penduduk yang tamat perguruan tinggi memiliki indeks modal sosial paling tinggi yakni sebesar 75,33 sedangkan indeks modal sosial paling rendah sebesar 70,48 yakni penduduk dengan pendidikan SD ke bawah. Pola ini sejalan dengan dimensi partisipasi sosial dan toleransi, semakin tinggi pendidikan yang dicapai, akan meningkatkan nilai partisipasi sosial dan nilai toleransinya.



Gambar 6.7. Indeks Modal Sosial menurut Pendapatan Rumah Tangga

Penduduk yang berpenghasilan lebih dari Rp 7.200.000 memiliki indeks modal sosial paling tinggi jika dibandingkan dengan kelompok pendapatan lainnya yakni sebesar 74,09 (Gambar 6.7). Indeks modal sosial terendah terdapat pada penduduk

dengan pendapatan rumah tangga sebesar Rp 1.800.000 ke bawah (71,10). Indeks per dimensinya juga menunjukkan pola yang sama, nilai indeks tertinggi pada dimensi rasa saling percaya, partisipasi sosial dan toleransi terdapat pada kelompok pendapatan yang terbesar. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga, semakin tinggi pula nilai modal sosialnya.

6.2. Kontribusi Indikator Penyusun Indeks Modal Sosial

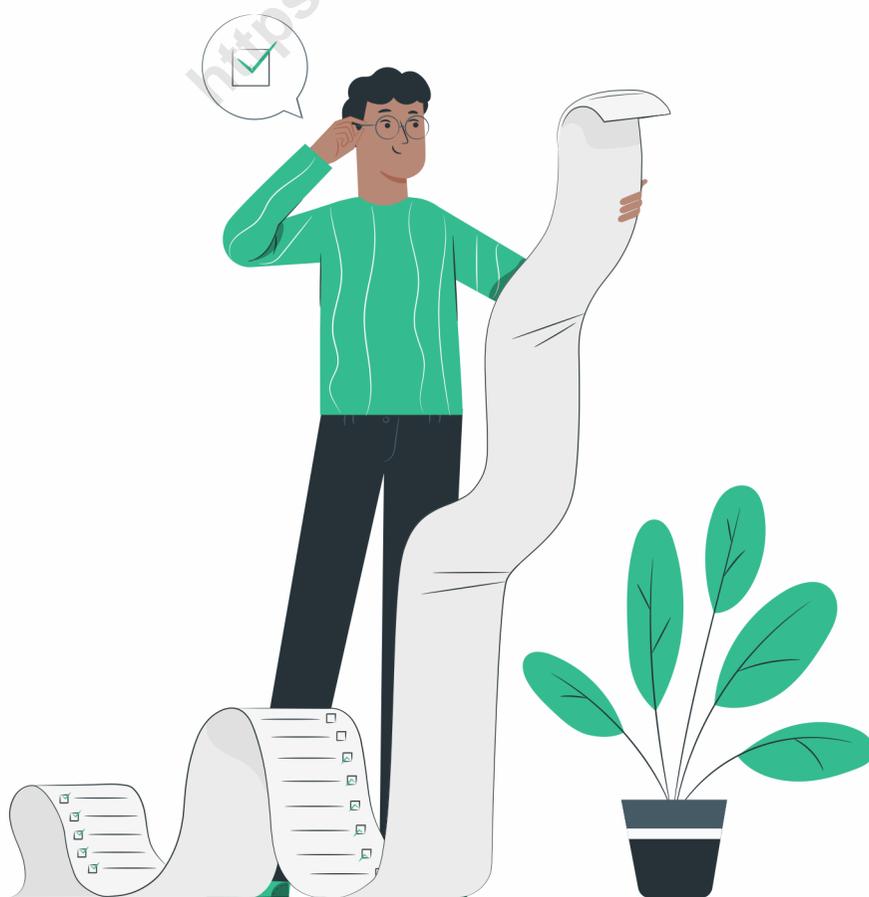
Setiap dimensi penyusun indeks modal sosial memiliki besaran kontribusi yang berbeda dalam menyusun indeks modal sosial. Dimensi yang berkontribusi terbesar dalam penyusunan indeks modal sosial adalah dimensi partisipasi sosial, yaitu sebesar 44,67 persen. Kontribusi dimensi rasa saling percaya sebesar 44,49 persen dalam penyusunan indeks modal sosial. Sementara itu, dimensi toleransi berkontribusi sebesar 10,83 persen. Setiap indikator memiliki kontribusi terhadap indeks modal sosial dengan besaran yang bervariasi. Variasi nilai ini terjadi karena penduduk memberikan penilaian dengan derajat yang beragam terhadap setiap indikator dalam konteks pengukuran indeks modal sosialnya. Besaran kontribusi suatu indikator menggambarkan derajat pentingnya indikator tersebut terhadap indeks modal sosial penduduk. Semakin besar kontribusi suatu indikator, maka semakin penting pula indikator tersebut bagi modal sosial penduduk.

Tabel 6.1. Besaran Kontribusi Indikator Terhadap Indeks Modal Sosial 2021

Dimensi	Indikator	Penimbang
(1)	(2)	(3)
Rasa Percaya (44,49)	Kepercayaan terhadap tetangga akan membantu jika terkena musibah	6,69
	Kepercayaan terhadap tetangga akan mengawasi jika rumah kosong	6,84
	Kepercayaan terhadap pengurus RT/Ketua Lingkungan Setempat	9,66
	Kepercayaan terhadap aparat desa/kelurahan	10,61
	Kepercayaan terhadap pemerintah kabupaten/kota	11,62
	Kepercayaan terhadap pemerintah provinsi	11,59
	Kepercayaan terhadap pemerintah pusat	11,11
	Kepercayaan terhadap hasil pemilu	10,57
	Kepercayaan terhadap hasil pejabat negara yang terpilih lewat pemilu	10,85
Partisipasi Sosial (44,67)	Kepercayaan terhadap aparat penegak hukum (Polri)	10,47
	Partisipasi dalam aktivitas kerja bakti/gotong royong di lingkungan tempat tinggal	11,84
	Partisipasi saat ada kejadian kematian di lingkungan tempat tinggal	11,15
	Partisipasi dalam pertemuan warga di lingkungan tempat tinggal	12,19
	Kesediaan ditunjuk dalam kepanitiaan acara di lingkungan setempat	9,26

Dimensi	Indikator	Penimbang
(1)	(2)	(3)
Partisipasi Sosial (44,67)	Kesediaan menghormati hasil musyawarah warga	9,65
	Kesediaan terlibat aktif dalam kegiatan penggalangan dana untuk korban bencana alam	10,95
	Kesediaan jika terpilih menjadi responden dalam sebuah survei pemerintah	10,22
	Dukungan terhadap aksi solidaritas yang menyuarakan kepentingan publik dengan cara yang baik	8,93
	Partisipasi dalam kegiatan Pemilu/Pilkada	9,50
	Dukungan terhadap program nasional vaksinasi Covid-19	6,30
Toleransi (10,83)	Persepsi terhadap pembatasan pelaksanaan ajaran agama orang lain yang minoritas	19,87
	Persepsi cenderung hanya berteman baik dengan orang yang satu suku	19,65
	Persepsi terhadap pembangunan sewajarnya berpihak pada kelompok agama mayoritas	21,97
	Persepsi terhadap pembangunan sewajarnya berpihak pada masyarakat pribumi	21,18
	Persepsi terhadap kecenderungan tidak suka pada orang yang membantah pendapat responden	17,33

DAFTAR PUSTAKA

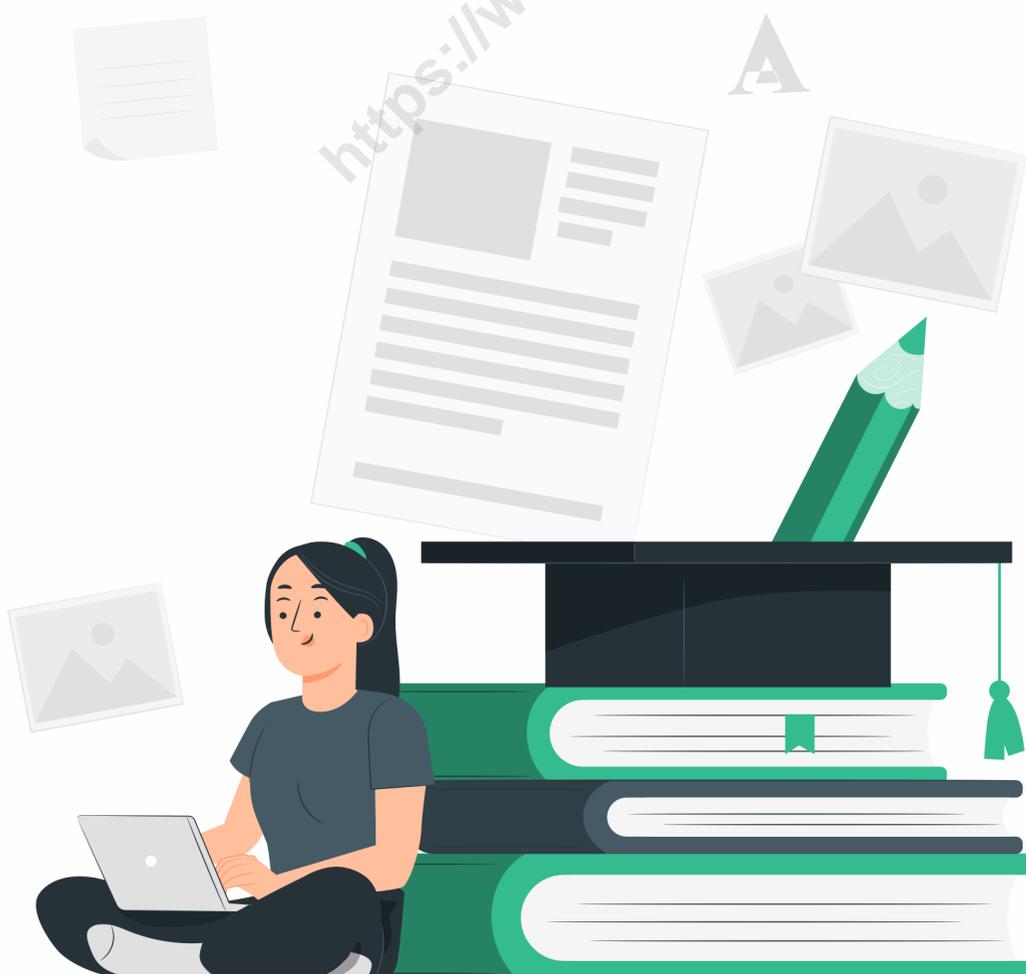


- Bakar, A. (2015). *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama. Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama.*
- Beugelsdijk, S., & Van Schaik, T. (2005). *Differences in social capital between 54 Western European regions.* *Regional Studies*, 39(8), 1053-1064.
- Casram. (2016). *Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural.* Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya.
- Castiglione, D., Deth, J. W., & Wolleb, G. (2008). *Social Capital.* United States: Oxford University Press.
- Deliarnov; Ratri Medya; Wisnu Chandra Kristiaji. (2006). *Ekonomi politik / Deliarnov; editor, Ratri Medya, Wisnu Chandra Kristiaji.* Jakarta : Erlangga.
- Edstrom, J. (2002). *Indonesia's Kecamatan Development Project: Is It Replicable?.* Social Development Project, The World Bank, Paper, 39.
- Cox, Eva. (1995). *A Truly Civil Society.* ABC Books. Sydney.
- Fathy, R. (2019). *Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat.* Jurnal Pemikiran Sosiologi.
- Field, J. (2008). *Social Capital.* New York: Routledge.
- Fioramonti, Lorenzoa (pengarang); Lita Soerjadinata (penerjemah). (2017; © Lorenzo Fioramonti, 2013). *Problem domestik bruto : sejarah dan realitas politik di balik angka pertumbuhan ekonomi / Lorenzo Fioramonti ; diterjemakan oleh Lita Soerjadinata. Tangerang Selatan.*
- Fukuyama, Francis. (1999). *Social Capital and Civil Society.* The Institute of Public Policy George Mason University.
- Grootaert, Christiaan; Van Bastelar, Thierry. (2002). *Understanding and Measuring Social Capital : A Multidisciplinary Tool for Practitioners.* Washington, DC: World Bank. Diakses dari <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14098>.
- Häuberer, J. (2011). *Social Capital Theory.* Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Harper, R., & Kelly, M. (2003). *Measuring Social Capital in The United Kingdom.* Office for National Statistics, 1-23.
- James A Caporaso dan David P Levine. (1996). *Teori-Teori Ekonomi Politik (Theories Of Political Economy), Terjemahan Suraji.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, ,h.125.
- M., B. J. S., Edelman, M., Kay, C., Yunuardy, D., & Septianty, V. T. (2010). *Gerakan-Gerakan Agraria Transnasional.* Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) : STPN Press etc.

- Mernissi, Fatema. (1997). *Social Capital in Action: The Case of the Ait Iktel Village Association*. Diakses dari <http://poverty.worldbank.org/library/topic/4294/5033> pada 30 September 2022.
- Midayanti, Nurma, Dkk. (2006). *Studi Modal Sosial*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Nasution, Saiful Anwar. (2011). *Pengembangan Pemeriksaan Kinerja Guna Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI.
- Ostrom, E. (1996). *Crossing the Great Divide: Coproduction, Synergy, and Development*. *World development*, 24(6), 1073-1087.
- Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schuster.
- Robison, L. J., Siles, M. E., & Schmid, A. A. (2002). *Social Capital and Poverty Reduction: Toward a Mature Paradigm*. Department of Agricultural Economics, Michigan State University: Research Report No. 13.
- Rosyidi, M. F. (2019). Madaniyah. *Konsep Toleransi dalam Islam dan Implementasinya di Masyarakat Indonesia*.
- Santoso, T. (2020). *Memahami Modal Sosial*. Surabaya: Pustaka Saga.
- Syahra, Rusydi. (2003). *Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi*. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol 5 (1): 1-22
- Selviana, Selviana. (2019). *Pengembangan Skala Modal Sosial Pada Remaja*. *Jurnal Psikologi Ulayat*. 6. 37-52. 10.24854/jpu02019-214.
- Tamboto, H. J., & Manongko, A. A. (2019). *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir*. Malang: Seribu Bintang.
- Van Beuningen, J., & Schmeets, H. (2013). *Developing a social capital index for the Netherlands*. *Social Indicators Research*, 113(3), 859-886.
- Wollebaek, D., & Selle, P. (2003). *Participation and Social Capital Formation: Norway in a Comparative Perspective*. *Scandinavian Political Studies*, 26(1), 67-91.

LAMPIRAN

<https://www.bps.go.id>



Lampiran 1. Indikator Rasa Percaya di Ranah Kewargaan (Lokal) menurut Karakteristik, 2021

Karakteristik	Kepercayaan terhadap tetangga akan membantu jika terkena musibah	Kepercayaan terhadap tetangga akan mengawasi jika rumah kosong	Kepercayaan terhadap pengurus RT/Ketua Lingkungan Setempat	Kepercayaan terhadap aparat desa/kelurahan	Kepercayaan terhadap pemerintah kabupaten/kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Klasifikasi Wilayah:					
Perkotaan	80,47	77,28	76,47	74,22	72,58
Perdesaan	82,83	79,60	76,70	75,95	74,04
Jenis Kelamin:					
Laki-Laki	81,54	78,36	76,42	74,53	72,66
Perempuan	81,44	78,21	76,71	75,39	73,73
Status Perkawinan:					
Belum Menikah	79,07	75,95	75,35	73,74	72,29
Menikah	81,62	78,40	76,63	74,99	73,26
Cerai Hidup	79,98	76,53	74,84	73,11	71,81
Cerai Mati	81,43	78,35	76,87	75,51	73,44
Kelompok Umur:					
≤ 24 Tahun	79,30	75,29	75,71	74,07	72,63
25-40 Tahun	81,23	77,92	76,10	74,40	72,69
41-64 Tahun	81,61	78,45	76,73	75,05	73,33
≥ 65 Tahun	82,00	79,00	77,17	76,19	74,07
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan:					
≤ SD	81,80	78,69	76,33	75,26	73,19
SMP dan SMA	81,08	77,82	76,21	74,37	72,64
Perguruan Tinggi	82,73	79,35	78,65	76,36	75,78
Pendapatan Rumah Tangga:					
Hingga Rp 1.800.000	81,60	78,28	76,26	75,20	73,28
Rp 1.800.001 – Rp 3.000.000	81,32	78,06	76,32	74,87	72,97
Rp 3.000.001 – Rp 4.800.000	81,09	78,09	76,38	74,46	72,63
Rp 4.800.001 – Rp 7.200.000	81,63	78,45	76,90	74,96	73,68
Lebih dari Rp. 7.200.000	82,57	79,37	78,52	75,88	74,68
Indonesia	81,49	78,28	76,57	74,97	73,21

Lampiran 2. Indikator Rasa Percaya di Ranah Institusional (Global) menurut Karakteristik, 2021

Karakteristik	Kepercayaan terhadap pemerintah provinsi	Kepercayaan terhadap pemerintah pusat	Kepercayaan terhadap hasil pemilu	Kepercayaan terhadap hasil pejabat negara yang terpilih lewat pemilu	Kepercayaan terhadap aparat penegak hukum (POLRI)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Klasifikasi Wilayah:					
Perkotaan	71,73	71,46	68,58	66,67	70,39
Perdesaan	72,94	73,60	71,22	69,38	72,85
Jenis Kelamin:					
Laki-Laki	71,63	71,92	69,18	67,07	70,88
Perempuan	72,85	72,83	70,22	68,57	72,00
Status Perkawinan:					
Belum Menikah	71,44	71,14	67,45	65,37	68,75
Menikah	72,31	72,42	69,64	67,74	71,42
Cerai Hidup	70,95	70,78	68,20	66,39	70,13
Cerai Mati	72,38	72,80	70,95	69,28	72,41
Kelompok Umur:					
≤ 24 Tahun	71,59	71,29	67,53	66,00	69,72
25-40 Tahun	71,87	71,65	68,70	66,70	70,57
41-64 Tahun	72,33	72,56	69,94	68,06	71,66
≥ 65 Tahun	72,99	73,63	71,67	70,07	73,00
Pendidikan Tertinggi yang Damatkan:					
≤ SD	72,04	72,55	70,55	69,04	71,99
SMP dan SMA	71,76	71,71	68,68	66,68	70,62
Perguruan Tinggi	74,85	74,17	70,59	68,64	72,50
Pendapatan Rumah Tangga:					
Hingga Rp 1.800.000	72,32	72,84	70,56	68,85	72,25
Rp 1.800.001 – Rp 3.000.000	72,02	72,22	69,64	67,71	71,21
Rp 3.000.001 – Rp 4.800.000	71,69	71,65	68,83	66,90	70,61
Rp 4.800.001 – Rp 7.200.000	72,76	72,49	69,43	67,39	71,43
Lebih dari Rp. 7.200.000	73,64	73,23	69,88	68,01	71,87
Indonesia	72,25	72,38	69,72	67,84	71,45

Lampiran 3. Indikator Rasa Percaya di Ranah Kewargaan (Lokal) menurut Karakteristik, 2021 (lanjutan)

Karakteristik	Kepercayaan terhadap tetangga akan membantu jika terkena musibah	Kepercayaan terhadap tetangga akan mengawasi jika rumah kosong	Kepercayaan terhadap pengurus RT/Ketua Lingkungan Setempat	Kepercayaan terhadap aparat desa/kelurahan	Kepercayaan terhadap pemerintah kabupaten/kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Keberadaan tetangga beda agama:					
Sebagian besar	79,89	76,99	75,28	73,69	72,16
Sebagian kecil	80,58	77,37	76,95	74,60	73,33
Tidak Ada	81,87	78,60	76,42	75,11	73,20
Keberadaan tetangga beda suku:					
Sebagian besar	80,00	76,76	75,75	73,17	71,77
Sebagian kecil	81,23	78,14	76,60	74,56	72,96
Tidak Ada	81,88	78,68	76,66	75,43	73,55
Keberadaan tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan:					
Sebagian besar	84,06	80,87	76,93	75,36	73,42
Sebagian kecil	81,59	78,34	76,51	75,12	73,26
Tidak Ada	79,67	76,44	76,59	74,48	73,06
Indonesia	81,49	78,28	76,57	74,97	73,21

Lampiran 4. Indikator Rasa Percaya di Ranah Institusional (Global) menurut Karakteristik, 2021 (lanjutan)

Karakteristik	Kepercayaan terhadap pemerintah provinsi	Kepercayaan terhadap pemerintah pusat	Kepercayaan terhadap hasil pemilu	Kepercayaan terhadap hasil pejabat negara yang terpilih lewat pemilu	Kepercayaan terhadap aparat penegak hukum (POLRI)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Keberadaan tetangga beda agama:					
Sebagian besar	71,39	73,49	70,44	68,48	70,96
Sebagian kecil	72,54	73,01	69,65	67,40	71,20
Tidak Ada	72,18	72,21	69,81	68,01	71,61
Keberadaan tetangga beda suku:					
Sebagian besar	70,73	71,23	67,56	65,53	69,79
Sebagian kecil	71,97	71,96	68,71	66,84	70,56
Tidak Ada	72,61	72,79	70,64	68,79	72,22
Keberadaan tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan:					
Sebagian besar	72,28	72,48	69,81	68,08	71,39
Sebagian kecil	72,24	72,45	69,78	67,86	71,53
Tidak Ada	72,37	72,29	69,52	67,63	71,31
Indonesia	72,25	72,38	69,72	67,84	71,45

Lampiran 5. Indikator Partisipasi Sosial di Ranah Kewargaan (Lokal) menurut Karakteristik, 2021

Karakteristik	Partisipasi dalam aktivitas kerja bakti/gotong royong di lingkungan tempat tinggal	Partisipasi saat ada kejadian kematian di lingkungan tempat tinggal	Partisipasi dalam pertemuan warga di lingkungan tempat tinggal	Kesediaan ditunjuk dalam kepanitiaan acara di lingkungan setempat	Kesediaan menghormati hasil musyawarah warga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Klasifikasi Wilayah:					
Perkotaan	75,67	80,78	72,04	59,94	74,37
Perdesaan	78,60	83,95	74,04	59,48	74,25
Jenis Kelamin:					
Laki-Laki	79,94	82,58	75,87	63,86	75,06
Perempuan	74,08	81,74	70,08	55,83	73,62
Status Perkawinan:					
Belum Menikah	73,19	75,67	67,40	59,50	73,26
Menikah	78,28	82,81	74,28	61,56	74,70
Cerai Hidup	73,04	80,10	68,45	55,67	72,70
Cerai Mati	70,14	79,61	66,32	49,44	72,53
Kelompok Umur:					
≤ 24 Tahun	74,31	78,21	68,29	60,47	73,98
25-40 Tahun	77,61	81,91	73,39	62,68	74,41
41-64 Tahun	77,84	83,10	74,03	60,40	74,57
≥ 65 Tahun	71,63	79,19	67,48	49,27	73,01
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan:					
≤ SD	74,80	81,98	69,72	51,62	72,88
SMP dan SMA	77,30	81,78	73,73	63,30	74,55
Perguruan Tinggi	78,11	81,51	75,90	68,95	79,05
Pendapatan Rumah Tangga:					
Hingga Rp 1.800.000	75,56	81,92	70,96	54,19	73,18
Rp 1.800.001 – Rp 3.000.000	77,57	82,52	73,18	59,93	73,93
Rp 3.000.001 – Rp 4.800.000	77,24	82,18	73,50	61,83	74,67
Rp 4.800.001 – Rp 7.200.000	77,21	81,65	74,08	64,19	75,52
Lebih dari Rp. 7.200.000	77,93	82,11	75,14	65,87	76,98
Indonesia	76,93	82,15	72,90	59,74	74,32

Lampiran 6. Indikator Partisipasi Sosial di Ranah Institusional (Global) menurut Karakteristik, 2021

Karakteristik	Kesediaan terlibat aktif dalam kegiatan penggalangan dana untuk korban bencana alam	Kesediaan jika terpilih menjadi responden dalam sebuah survei pemerintah	Dukungan terhadap aksi solidaritas yang menyuarakan kepentingan publik dengan cara yang baik	Partisipasi dalam kegiatan Pemilu/Pilkada	Dukungan terhadap program nasional vaksinasi Covid-19
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Klasifikasi Wilayah:					
Perkotaan	67,36	78,24	69,02	82,30	76,29
Perdesaan	66,84	80,03	68,94	83,99	73,15
Jenis Kelamin:					
Laki-Laki	69,19	79,10	70,16	83,09	75,49
Perempuan	65,18	78,93	67,87	82,97	74,40
Status Perkawinan:					
Belum Menikah	67,65	77,00	70,08	80,34	76,64
Menikah	68,55	79,45	69,67	83,44	75,39
Cerai Hidup	64,00	77,73	67,20	81,51	73,16
Cerai Mati	59,01	76,93	65,04	81,29	72,29
Kelompok Umur:					
≤ 24 Tahun	69,72	79,71	71,21	81,27	73,82
25-40 Tahun	69,73	79,55	70,73	83,10	75,08
41-64 Tahun	67,48	79,06	68,81	83,38	75,34
≥ 65 Tahun	58,60	77,32	65,03	81,57	72,93
Pendidikan Tertinggi yang Damatkan:					
≤ SD	61,16	77,63	65,78	81,95	69,38
SMP dan SMA	69,45	79,21	70,17	82,95	76,69
Perguruan Tinggi	75,70	81,62	74,13	85,80	85,09
Pendapatan Rumah Tangga:					
Hingga Rp 1.800.000	63,25	78,43	67,26	82,89	71,40
Rp 1.800.001 – Rp 3.000.000	66,85	79,13	68,69	82,80	74,41
Rp 3.000.001 – Rp 4.800.000	68,49	78,82	69,55	82,91	75,76
Rp 4.800.001 – Rp 7.200.000	70,32	79,38	70,77	83,34	78,79
Lebih dari Rp. 7.200.000	73,15	80,49	71,91	84,20	81,15
Indonesia	67,14	79,01	68,99	83,03	74,93

Lampiran 7. Indikator Partisipasi Sosial di Ranah Kewargaan (Lokal) menurut Karakteristik, 2021 (lanjutan)

Karakteristik	Partisipasi dalam aktivitas kerja bakti/gotong royong di lingkungan tempat tinggal	Partisipasi saat ada kejadian kematian di lingkungan tempat tinggal	Partisipasi dalam pertemuan warga di lingkungan tempat tinggal	Kesediaan ditunjuk dalam kepanitiaian acara di lingkungan setempat	Kesediaan menghormati hasil musyawarah warga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Keberadaan tetangga beda agama:					
Sebagian besar	75,59	79,77	71,72	59,79	73,96
Sebagian kecil	76,41	80,54	73,43	62,71	74,90
Tidak Ada	77,17	82,78	72,75	58,68	74,14
Keberadaan tetangga beda suku:					
Sebagian besar	74,89	80,17	71,36	60,71	74,32
Sebagian kecil	76,57	81,41	72,74	62,17	74,63
Tidak Ada	77,55	82,93	73,35	58,04	74,27
Keberadaan tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan:					
Sebagian besar	78,75	84,48	74,60	60,70	74,38
Sebagian kecil	77,00	82,38	72,69	59,07	74,10
Tidak Ada	75,85	80,17	72,45	61,06	75,03
Indonesia	76,93	82,15	72,90	59,74	74,32

Lampiran 8. Indikator Partisipasi Sosial di Ranah Institusional (Global) menurut Karakteristik, 2021 (lanjutan)

Karakteristik	Kesediaan terlibat aktif dalam kegiatan penggalangan dana untuk korban bencana alam	Kesediaan jika terpilih menjadi responden dalam sebuah survei pemerintah	Dukungan terhadap aksi solidaritas yang menyuarakan kepentingan publik dengan cara yang baik	Partisipasi dalam kegiatan Pemilu/Pilkada	Dukungan terhadap program nasional vaksinasi Covid-19
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Keberadaan tetangga beda agama:					
Sebagian besar	67,58	78,82	69,54	83,04	78,57
Sebagian kecil	69,68	78,60	70,42	82,65	79,49
Tidak Ada	66,25	79,11	68,49	83,15	73,32
Keberadaan tetangga beda suku:					
Sebagian besar	68,66	78,38	70,20	82,54	76,99
Sebagian kecil	68,69	78,94	70,14	83,13	77,09
Tidak Ada	66,03	79,18	68,05	83,08	73,29
Keberadaan tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan:					
Sebagian besar	67,85	80,19	69,50	84,24	72,39
Sebagian kecil	66,45	78,95	68,44	83,07	74,33
Tidak Ada	68,81	78,53	70,13	82,33	78,04
Indonesia	67,14	79,01	68,99	83,03	74,93

Lampiran 9. Indikator Toleransi menurut Karakteristik, 2021

Karakteristik	Persepsi terhadap pembatasan pelaksanaan ajaran agama orang lain yang minoritas	Persepsi cenderung hanya berteman baik dengan orang yang satu suku	Persepsi terhadap pembangunan sewajarnya berpihak pada kelompok agama mayoritas	Persepsi terhadap pembangunan sewajarnya berpihak pada masyarakat pribumi	Persepsi terhadap kecenderungan tidak suka pada orang yang membantah pendapat responden
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Klasifikasi Wilayah:					
Perkotaan	60,87	66,87	57,81	55,16	56,38
Perdesaan	59,62	65,61	55,81	53,21	54,82
Jenis Kelamin:					
Laki-Laki	59,88	66,49	56,94	54,25	55,71
Perempuan	60,75	66,16	56,96	54,38	55,70
Status Perkawinan:					
Belum Menikah	63,77	67,40	59,93	57,65	56,45
Menikah	60,31	66,60	57,09	54,49	55,77
Cerai Hidup	60,80	65,98	56,15	53,81	55,24
Cerai Mati	59,73	64,49	55,77	52,83	55,29
Kelompok Umur:					
≤ 24 Tahun	60,19	66,28	58,38	54,47	54,94
25-40 Tahun	60,25	66,41	57,05	54,20	55,53
41-64 Tahun	60,49	66,56	56,98	54,49	55,79
≥ 65 Tahun	59,84	65,04	56,30	53,81	55,87
Pendidikan Tertinggi yang Damatkan:					
≤ SD	57,66	62,98	53,41	50,19	54,00
SMP dan SMA	61,21	67,58	58,38	55,95	56,12
Perguruan Tinggi	65,70	72,17	63,40	61,06	60,79
Pendapatan Rumah Tangga:					
Hingga Rp 1.800.000	58,65	64,01	54,31	51,20	54,49
Rp 1.800.001 – Rp 3.000.000	59,80	66,25	56,57	54,10	55,42
Rp 3.000.001 – Rp 4.800.000	61,03	67,17	58,02	55,54	56,12
Rp 4.800.001 – Rp 7.200.000	62,18	68,00	59,38	56,89	56,94
Lebih dari Rp. 7.200.000	63,44	69,73	60,98	58,70	57,99
Indonesia	60,33	66,32	56,95	54,32	55,70

Lampiran 9. Indikator Toleransi menurut Karakteristik, 2021 (lanjutan)

Karakteristik	Persepsi terhadap pembatasan pelaksanaan ajaran agama orang lain yang minoritas	Persepsi cenderung hanya berteman baik dengan orang yang satu suku	Persepsi terhadap pembangunan sewajarnya berpihak pada kelompok agama mayoritas	Persepsi terhadap pembangunan sewajarnya berpihak pada masyarakat pribumi	Persepsi terhadap kecenderungan tidak suka pada orang yang membantah pendapat responden
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Keberadaan tetangga beda agama:					
Sebagian besar	67,23	70,29	66,75	62,14	59,11
Sebagian kecil	64,89	69,35	63,36	60,96	58,01
Tidak Ada	58,72	65,22	54,72	52,03	54,88
Keberadaan tetangga beda suku:					
Sebagian besar	65,58	71,53	63,71	61,77	57,86
Sebagian kecil	60,90	67,69	58,22	56,45	55,94
Tidak Ada	59,40	64,87	55,49	52,19	55,31
Keberadaan tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan:					
Sebagian besar	57,54	64,74	53,74	50,55	54,36
Sebagian kecil	59,68	65,79	56,27	53,53	55,36
Tidak Ada	63,55	68,34	60,45	58,48	57,29
Indonesia	60,33	66,32	56,95	54,32	55,70

Lampiran 10. Indikator Rasa Percaya di Ranah Kewargaan (Lokal) menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Kepercayaan terhadap tetangga akan membantu jika terkena musibah	Kepercayaan terhadap tetangga akan mengawasi jika rumah kosong	Kepercayaan terhadap pengurus RT/ Ketua Lingkungan Setempat	Kepercayaan terhadap aparat desa/kelurahan	Kepercayaan terhadap pemerintah kabupaten/kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	85,13	80,68	75,76	75,07	70,53
Sumatera Utara	81,30	78,23	73,16	72,41	71,04
Sumatera Barat	80,92	76,99	73,42	73,11	72,64
Riau	81,60	78,95	76,29	74,48	72,31
Jambi	81,53	77,70	77,45	75,98	74,11
Sumatera Selatan	82,59	79,14	75,57	75,09	74,30
Bengkulu	80,69	76,76	72,07	70,31	68,26
Lampung	82,71	79,73	76,20	75,76	73,14
Kep. Bangka Belitung	79,53	75,74	74,55	73,45	73,23
Kepulauan Riau	79,97	76,10	78,51	75,05	75,62
DKI Jakarta	77,83	74,31	77,51	73,84	71,66
Jawa Barat	79,88	77,06	76,23	73,85	71,65
Jawa Tengah	82,62	79,94	78,86	77,40	75,85
DI Yogyakarta	83,01	78,33	78,39	75,70	73,84
Jawa Timur	82,72	78,77	77,10	75,64	73,22
Banten	76,91	73,11	74,64	70,60	68,10
Bali	80,28	79,08	76,70	75,77	75,05
Nusa Tenggara Barat	82,33	80,36	76,14	74,28	72,79
Nusa Tenggara Timur	83,66	79,65	77,61	76,60	77,33
Kalimantan Barat	82,25	78,58	77,02	75,48	74,59
Kalimantan Tengah	81,25	77,75	75,36	75,01	75,15
Kalimantan Selatan	80,40	77,83	74,92	73,38	72,44
Kalimantan Timur	80,58	77,37	76,93	75,19	72,85
Kalimantan Utara	85,18	80,86	82,51	82,22	80,14
Sulawesi Utara	85,35	81,94	80,63	80,22	80,56
Sulawesi Tengah	84,75	81,23	78,19	78,81	79,55
Sulawesi Selatan	82,31	80,33	77,07	77,75	75,86
Sulawesi Tenggara	83,96	80,79	78,34	77,31	76,07
Gorontalo	84,59	83,08	80,67	82,02	82,24
Sulawesi Barat	84,56	82,43	75,64	76,13	75,62
Maluku	85,96	82,94	76,87	76,71	77,25
Maluku Utara	85,01	82,70	74,56	74,51	76,56
Papua Barat	83,51	80,48	74,13	73,31	73,32
Papua	80,46	75,88	69,62	68,72	67,44
Indonesia	81,49	78,28	76,57	74,97	73,21

Lampiran 11. Indikator Rasa Percaya di Ranah Institusional (Global) menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Kepercayaan terhadap pemerintah provinsi	Kepercayaan terhadap pemerintah pusat	Kepercayaan terhadap hasil pemilu	Kepercayaan terhadap hasil pejabat negara yang terpilih lewat pemilu	Kepercayaan terhadap aparat penegak hukum (POLRI)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	68,95	67,04	64,05	62,40	69,41
Sumatera Utara	70,18	72,58	68,81	67,18	68,44
Sumatera Barat	72,87	69,74	67,70	67,26	70,60
Riau	70,67	70,22	67,38	66,22	68,85
Jambi	72,74	72,95	70,96	68,75	72,24
Sumatera Selatan	73,43	73,73	69,04	67,64	69,79
Bengkulu	68,02	70,40	66,05	64,03	68,41
Lampung	71,15	73,57	70,43	67,47	70,76
Kep. Bangka Belitung	72,55	72,96	70,54	68,25	71,76
Kepulauan Riau	74,31	74,75	70,77	68,51	70,55
DKI Jakarta	72,11	71,31	65,87	63,97	68,22
Jawa Barat	70,86	70,12	67,89	65,87	70,38
Jawa Tengah	75,46	75,60	73,72	71,58	73,71
DI Yogyakarta	73,90	73,18	70,53	68,06	71,88
Jawa Timur	71,80	71,88	69,81	67,68	71,39
Banten	66,72	66,59	63,88	61,72	64,50
Bali	73,72	75,76	73,10	70,97	75,63
Nusa Tenggara Barat	71,03	71,17	70,94	68,54	72,02
Nusa Tenggara Timur	77,15	80,82	76,70	74,46	78,31
Kalimantan Barat	74,00	73,37	70,06	68,73	73,64
Kalimantan Tengah	74,67	75,89	72,03	70,51	73,84
Kalimantan Selatan	70,94	70,58	66,40	66,23	70,43
Kalimantan Timur	70,84	71,01	69,02	66,28	71,19
Kalimantan Utara	78,58	78,82	75,95	73,96	80,83
Sulawesi Utara	79,96	81,49	79,52	78,25	81,70
Sulawesi Tengah	79,30	80,64	80,00	78,07	80,44
Sulawesi Selatan	73,34	72,49	70,58	69,71	75,78
Sulawesi Tenggara	73,97	74,86	71,27	70,23	76,69
Gorontalo	82,96	80,92	76,17	76,29	78,65
Sulawesi Barat	74,98	77,64	74,51	74,01	76,32
Maluku	77,75	80,40	73,45	73,70	78,74
Maluku Utara	76,14	79,74	74,91	74,56	80,65
Papua Barat	73,50	76,57	71,51	70,19	75,28
Papua	65,77	66,80	63,70	62,72	66,54
Indonesia	72,25	72,38	69,72	67,84	71,45

Lampiran 12. Indikator Partisipasi Sosial di Ranah Kewargaan (Lokal) menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Partisipasi dalam aktivitas kerja bakti/ gotong royong di lingkungan tempat tinggal	Partisipasi saat ada kejadian kematian di lingkungan tempat tinggal	Partisipasi dalam pertemuan warga di lingkungan tempat tinggal	Kesediaan ditunjuk dalam kepanitiaan acara di lingkungan setempat	Kesediaan menghormati hasil musyawarah warga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	75,14	84,28	74,33	61,74	73,13
Sumatera Utara	74,15	81,67	71,34	60,00	72,81
Sumatera Barat	76,37	82,79	73,33	60,67	72,91
Riau	75,49	82,81	73,72	59,08	74,72
Jambi	77,35	83,99	74,03	65,29	75,08
Sumatera Selatan	78,85	83,46	74,16	69,96	74,31
Bengkulu	74,60	78,59	72,24	64,89	70,46
Lampung	78,50	82,37	73,48	66,44	75,12
Kep. Bangka Belitung	72,55	81,95	68,35	55,35	72,94
Kepulauan Riau	77,90	81,05	75,45	64,59	77,01
DKI Jakarta	71,64	74,95	67,73	59,60	72,86
Jawa Barat	76,04	80,43	70,75	58,28	73,70
Jawa Tengah	79,19	83,37	76,48	57,79	77,39
DI Yogyakarta	80,45	82,32	78,37	60,91	76,04
Jawa Timur	77,17	83,60	72,77	57,50	73,94
Banten	72,07	76,48	67,39	56,92	71,71
Bali	78,92	81,80	75,53	62,65	75,76
Nusa Tenggara Barat	78,12	85,34	73,05	57,89	75,52
Nusa Tenggara Timur	81,58	86,50	78,95	65,46	73,89
Kalimantan Barat	77,79	82,75	74,07	61,09	73,68
Kalimantan Tengah	76,99	83,15	73,10	58,52	73,34
Kalimantan Selatan	75,71	81,12	71,91	58,66	73,02
Kalimantan Timur	76,90	80,93	74,28	62,04	74,10
Kalimantan Utara	80,63	85,95	77,73	61,14	74,72
Sulawesi Utara	82,24	87,63	78,72	69,06	76,60
Sulawesi Tengah	83,41	88,02	77,38	59,97	78,13
Sulawesi Selatan	75,94	83,24	68,51	56,56	71,71
Sulawesi Tenggara	78,78	87,20	74,47	61,29	75,15
Gorontalo	82,02	89,06	79,93	53,98	75,59
Sulawesi Barat	78,87	87,99	70,82	57,27	73,80
Maluku	82,81	86,91	80,16	70,50	78,15
Maluku Utara	83,40	87,53	78,39	66,95	74,23
Papua Barat	81,09	85,20	77,83	68,67	77,64
Papua	76,70	79,32	73,74	67,12	72,86
Indonesia	76,93	82,15	72,90	59,74	74,32

Lampiran 13. Indikator Partisipasi Sosial di Ranah Institusional (Global) menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Kesediaan terlibat aktif dalam kegiatan penggalangan dana untuk korban bencana alam	Kesediaan jika terpilih menjadi responden dalam sebuah survei pemerintah	Dukungan terhadap aksi solidaritas yang menyuarakan kepentingan publik dengan cara yang baik	Partisipasi dalam kegiatan Pemilu/Pilkada	Dukungan terhadap program nasional vaksinasi Covid-19
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	64,52	80,68	70,71	82,17	60,39
Sumatera Utara	67,90	78,40	70,20	83,26	74,88
Sumatera Barat	65,97	78,26	68,55	82,93	61,40
Riau	67,72	78,16	70,99	82,69	72,32
Jambi	69,60	80,30	70,41	84,32	77,65
Sumatera Selatan	69,24	80,36	69,43	83,51	77,75
Bengkulu	66,61	78,13	69,36	79,43	72,24
Lampung	67,80	80,37	67,58	83,83	75,63
Kep. Bangka Belitung	61,86	76,37	67,97	84,15	74,22
Kepulauan Riau	74,64	80,60	74,96	85,85	82,07
DKI Jakarta	66,63	73,61	68,97	80,23	81,58
Jawa Barat	66,23	78,17	68,74	81,81	76,59
Jawa Tengah	67,05	79,43	67,89	83,99	77,43
DI Yogyakarta	70,36	80,26	67,29	84,56	79,58
Jawa Timur	64,49	79,64	65,97	82,52	71,32
Banten	63,46	73,42	67,21	79,70	70,82
Bali	71,02	80,64	70,62	80,76	85,15
Nusa Tenggara Barat	67,91	79,28	70,68	84,13	71,37
Nusa Tenggara Timur	71,80	83,39	73,07	89,18	84,05
Kalimantan Barat	67,19	79,24	70,95	84,41	75,07
Kalimantan Tengah	69,69	79,29	70,17	84,19	79,09
Kalimantan Selatan	68,47	78,61	68,71	82,39	71,48
Kalimantan Timur	70,95	78,37	70,46	82,02	78,74
Kalimantan Utara	75,61	85,64	77,70	86,92	79,90
Sulawesi Utara	76,73	82,87	75,78	87,80	85,41
Sulawesi Tengah	73,47	87,05	74,66	90,23	80,42
Sulawesi Selatan	65,98	81,41	71,97	85,08	71,17
Sulawesi Tenggara	70,66	84,32	72,77	89,55	74,46
Gorontalo	70,11	82,91	67,42	88,67	68,81
Sulawesi Barat	70,20	84,94	76,30	88,48	77,75
Maluku	77,07	84,51	77,62	88,14	71,31
Maluku Utara	74,49	84,67	74,99	87,64	70,93
Papua Barat	77,66	82,00	77,15	86,72	71,52
Papua	69,58	73,79	71,69	76,02	65,27
Indonesia	67,14	79,01	68,99	83,03	74,93

Lampiran 14. Indikator Toleransi menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Persepsi terhadap pembatasan pelaksanaan ajaran agama orang lain yang minoritas	Persepsi cenderung hanya berteman baik dengan orang yang satu suku	Persepsi terhadap pembangunan sewajarnya berpihak pada kelompok agama mayoritas	Persepsi terhadap pembangunan sewajarnya berpihak pada masyarakat pribumi	Persepsi terhadap kecenderungan tidak suka pada orang yang membantah pendapat responden
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	46,06	56,92	41,90	41,83	49,29
Sumatera Utara	62,78	67,86	60,82	54,41	55,34
Sumatera Barat	54,14	60,30	49,41	47,83	50,68
Riau	59,08	69,35	55,24	58,13	56,42
Jambi	55,91	65,13	50,75	52,82	55,27
Sumatera Selatan	59,70	65,70	56,32	55,09	54,95
Bengkulu	62,13	67,96	55,87	56,20	54,98
Lampung	57,29	65,21	56,40	59,76	53,78
Kep. Bangka Belitung	64,73	64,65	59,16	56,49	53,57
Kepulauan Riau	64,65	69,99	60,53	57,90	57,06
DKI Jakarta	60,45	65,37	61,33	60,38	55,30
Jawa Barat	57,47	65,03	53,92	51,49	56,49
Jawa Tengah	64,26	68,66	60,14	57,77	58,05
DI Yogyakarta	65,59	71,29	65,19	59,68	59,71
Jawa Timur	60,44	66,62	55,77	51,17	54,85
Banten	55,43	62,14	53,33	50,89	53,80
Bali	62,77	68,93	62,36	59,47	59,58
Nusa Tenggara Barat	54,64	58,64	47,61	46,75	50,35
Nusa Tenggara Timur	72,03	75,35	72,42	69,12	61,07
Kalimantan Barat	67,70	71,58	64,82	60,39	58,93
Kalimantan Tengah	65,06	68,63	64,41	60,67	57,69
Kalimantan Selatan	60,28	65,00	55,84	54,75	54,89
Kalimantan Timur	67,01	70,28	63,56	58,96	55,99
Kalimantan Utara	78,60	79,42	79,02	76,88	70,35
Sulawesi Utara	64,16	67,31	66,24	62,91	55,87
Sulawesi Tengah	69,09	75,67	66,81	65,70	56,87
Sulawesi Selatan	57,29	63,50	51,43	48,66	53,09
Sulawesi Tenggara	63,18	69,71	62,18	60,58	53,33
Gorontalo	62,51	65,84	49,48	47,69	51,38
Sulawesi Barat	61,43	67,82	57,88	57,34	55,64
Maluku	69,07	72,37	66,63	63,77	61,47
Maluku Utara	55,72	66,35	55,54	53,21	51,02
Papua Barat	67,26	67,79	63,50	53,90	56,56
Papua	56,32	56,99	50,46	39,38	51,78
Indonesia	60,33	66,32	56,95	54,32	55,70

Lampiran 15. Indeks Modal Sosial dan Indeks Dimensi Penyusun Indeks Modal Sosial menurut Karakteristik, 2021

Karakteristik	Indeks Modal Sosial	Dimensi Penyusun Indeks Modal Sosial		
		Indeks Dimensi Rasa Percaya	Indeks Dimensi Partisipasi Sosial	Indeks Dimensi Toleransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Klasifikasi Wilayah:				
Perkotaan	71,57	72,46	73,64	59,39
Perdesaan	72,68	74,36	74,61	57,77
Jenis Kelamin:				
Laki-Laki	72,56	72,84	75,66	58,62
Perempuan	71,57	73,70	72,54	58,76
Status Perkawinan:				
Belum Menikah	70,59	71,58	71,90	61,08
Menikah	72,49	73,30	75,00	58,82
Cerai Hidup	70,14	71,75	71,41	58,35
Cerai Mati	70,03	73,85	69,26	57,56
Kelompok Umur:				
≤ 24 Tahun	71,01	71,88	73,10	58,87
25-40 Tahun	72,16	72,62	74,97	58,66
41-64 Tahun	72,37	73,44	74,58	58,83
≥ 65 Tahun	70,54	74,49	69,62	58,12
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan:				
≤ SD	70,48	73,60	70,98	55,56
SMP dan SMA	72,29	72,61	75,00	59,84
Perguruan Tinggi	75,33	74,87	78,37	64,63
Pendapatan Rumah Tangga:				
Hingga Rp 1.800.000	71,10	73,63	72,14	56,45
Rp 1.800.001 – Rp 3.000.000	71,95	73,10	74,09	58,39
Rp 3.000.001 – Rp 4.800.000	72,12	72,67	74,62	59,56
Rp 4.800.001 – Rp 7.200.000	72,96	73,38	75,53	60,68
Lebih dari Rp. 7.200.000	74,09	74,22	76,85	62,19
Keberadaan tetangga beda agama:				
Sebagian besar	72,43	72,82	73,77	65,24
Sebagian kecil	72,86	73,19	74,83	63,41
Tidak Ada	71,78	73,35	73,81	57,04
Keberadaan tetangga beda suku:				
Sebagian besar	71,82	71,69	73,80	64,20
Sebagian kecil	72,19	72,79	74,58	59,84
Tidak Ada	72,03	73,80	73,83	57,38
Keberadaan tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan:				
Sebagian besar	72,42	73,78	75,04	56,09
Sebagian kecil	71,90	73,33	73,82	58,08
Tidak Ada	72,27	72,91	74,21	61,65
Indonesia	72,05	73,28	74,06	58,69

Lampiran 16. Indeks Modal Sosial dan Indeks Dimensi Penyusun Indeks Modal Sosial menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Indeks Modal Sosial	Dimensi Penyusun Indeks Modal Sosial		
		Indeks Dimensi Rasa Percaya	Indeks Dimensi Partisipasi Sosial	Indeks Dimensi Toleransi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	69,42	70,93	73,37	46,95
Sumatera Utara	71,28	71,71	73,52	60,29
Sumatera Barat	70,30	72,00	72,96	52,38
Riau	71,56	72,03	74,00	59,59
Jambi	72,85	73,97	75,87	55,82
Sumatera Selatan	73,04	73,48	76,17	58,34
Bengkulu	70,00	69,79	72,79	59,40
Lampung	72,65	73,47	75,25	58,57
Kep. Bangka Belitung	70,87	72,89	71,55	59,81
Kepulauan Riau	74,23	74,10	77,31	62,05
DKI Jakarta	70,18	71,26	71,39	60,70
Jawa Barat	70,76	71,83	73,09	56,74
Jawa Tengah	74,12	76,05	75,20	61,77
DI Yogyakarta	74,01	74,15	76,20	64,35
Jawa Timur	71,62	73,40	73,22	57,70
Banten	67,51	68,09	69,96	55,04
Bali	74,29	75,25	76,15	62,64
Nusa Tenggara Barat	71,55	73,31	74,66	51,47
Nusa Tenggara Timur	77,50	77,95	78,80	70,25
Kalimantan Barat	73,47	74,29	74,78	64,76
Kalimantan Tengah	73,56	74,80	74,78	63,41
Kalimantan Selatan	70,96	71,78	73,26	58,13
Kalimantan Timur	72,62	72,59	74,91	63,28
Kalimantan Utara	78,95	79,61	78,74	77,06
Sulawesi Utara	78,66	80,74	80,26	63,53
Sulawesi Tengah	78,30	79,88	79,47	67,04
Sulawesi Selatan	72,06	75,01	73,33	54,67
Sulawesi Tenggara	74,90	75,82	77,12	61,99
Gorontalo	76,05	80,55	76,61	55,23
Sulawesi Barat	74,88	76,67	76,70	60,03
Maluku	77,73	77,90	80,22	66,74
Maluku Utara	75,81	77,48	78,86	56,42
Papua Barat	75,18	74,63	78,97	61,85
Papua	68,38	67,97	73,06	50,79
Indonesia	72,05	73,28	74,06	58,69

Lampiran 17. Perkiraan Kesalahan Sampling Indeks Modal Sosial menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Indeks Modal Sosial (R)	SE	Jumlah Observasi		Design Effect	Relative Standard Error (%) (SE/R)	Selang Kepercayaan	
			Tak Tertimbang	Tertimbang			R-2SE	R+2SE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	69,42	0,55	2 904	1 295 879	4,37	0,79	68,34	70,50
Sumatera Utara	71,28	0,38	4 734	3 492 186	6,86	0,54	70,53	72,03
Sumatera Barat	70,30	0,43	2 548	1 332 233	3,70	0,61	69,46	71,15
Riau	71,56	0,59	1 902	1 699 164	6,98	0,82	70,41	72,72
Jambi	72,85	0,54	1 570	906 625	3,96	0,74	71,79	73,91
Sumatera Selatan	73,04	0,53	2 450	2 118 074	7,34	0,73	71,99	74,09
Bengkulu	70,00	0,57	1 279	508 357	2,56	0,81	68,89	71,12
Lampung	72,65	0,44	2 329	2 181 994	5,61	0,61	71,78	73,52
Kep. Bangka Belitung	70,87	0,57	900	379 700	1,65	0,80	69,76	71,98
Kepulauan Riau	74,23	1,19	875	632 043	9,25	1,60	71,89	76,56
DKI Jakarta	70,18	0,53	1 258	2 783 325	11,43	0,75	69,14	71,21
Jawa Barat	70,76	0,40	5 972	13 287 160	25,38	0,56	69,97	71,54
Jawa Tengah	74,12	0,22	6 877	9 360 773	7,58	0,30	73,69	74,56
DI Yogyakarta	74,01	0,59	913	1 195 559	6,26	0,79	72,85	75,16
Jawa Timur	71,62	0,29	7 471	11 076 605	12,29	0,41	71,04	72,19
Banten	67,51	0,63	1 652	3 209 913	18,38	0,93	66,28	68,74
Bali	74,29	1,61	1 439	1 186 934	39,68	2,17	71,12	77,45
Nusa Tenggara Barat	71,55	0,75	1 580	1 471 589	8,02	1,05	70,08	73,02
Nusa Tenggara Timur	77,50	0,41	2 714	1 211 384	2,25	0,53	76,69	78,31
Kalimantan Barat	73,47	0,43	2 010	1 201 357	2,93	0,59	72,63	74,32
Kalimantan Tengah	73,56	0,52	1 725	706 986	2,26	0,70	72,55	74,57
Kalimantan Selatan	70,96	0,42	1 878	1 161 260	3,10	0,59	70,14	71,78
Kalimantan Timur	72,62	0,51	1 300	923 063	3,90	0,70	71,62	73,62
Kalimantan Utara	78,95	1,25	520	162 705	2,63	1,58	76,49	81,40
Sulawesi Utara	78,66	0,51	1 850	647 028	2,17	0,65	77,66	79,67
Sulawesi Tengah	78,30	0,62	1 548	735 470	3,38	0,80	77,08	79,53
Sulawesi Selatan	72,06	0,34	3 458	2 053 809	3,61	0,47	71,39	72,72
Sulawesi Tenggara	74,90	0,53	1 539	618 542	2,03	0,71	73,86	75,93
Gorontalo	76,05	0,57	757	281 107	1,23	0,75	74,94	77,16
Sulawesi Barat	74,88	0,96	740	312 811	3,33	1,29	72,99	76,77
Maluku	77,73	0,73	1 238	375 554	2,10	0,94	76,29	79,17
Maluku Utara	75,81	0,72	1 035	262 483	1,35	0,95	74,40	77,23
Papua Barat	75,18	0,64	979	223 321	1,04	0,85	73,93	76,43
Papua	68,38	0,61	2 740	799 436	2,83	0,89	67,18	69,58
Indonesia	72,05	0,12	74 684	69 794 429	11,67	0,16	71,82	72,28

Lampiran 18. Perkiraan Kesalahan Sampling Indeks Dimensi Rasa Percaya menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Indeks Dimensi Rasa Percaya (R)	SE	Jumlah Observasi		Design Effect	Relative Standard Error (%) (SE/R)	Selang Kepercayaan	
			Tak Tertimbang	Tertimbang			R-2SE	R+2SE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	70,93	0,76	2 904	1 295 879	4,54	1,08	69,43	72,43
Sumatera Utara	71,71	0,48	4 734	3 492 186	6,10	0,67	70,78	72,65
Sumatera Barat	72,00	0,47	2 548	1 332 233	2,81	0,66	71,07	72,93
Riau	72,03	0,71	1 902	1 699 164	5,90	0,98	70,65	73,42
Jambi	73,97	0,64	1 570	906 625	3,61	0,87	72,72	75,23
Sumatera Selatan	73,48	0,57	2 450	2 118 074	5,31	0,77	72,37	74,59
Bengkulu	69,79	0,68	1 279	508 357	2,24	0,97	68,47	71,12
Lampung	73,47	0,54	2 329	2 181 994	5,08	0,73	72,42	74,53
Kep. Bangka Belitung	72,89	0,66	900	379 700	1,43	0,90	71,60	74,17
Kepulauan Riau	74,10	1,61	875	632 043	9,85	2,17	70,94	77,26
DKI Jakarta	71,26	0,65	1 258	2 783 325	11,77	0,92	69,98	72,54
Jawa Barat	71,83	0,47	5 972	13 287 160	22,40	0,66	70,90	72,75
Jawa Tengah	76,05	0,25	6 877	9 360 773	6,54	0,33	75,56	76,55
DI Yogyakarta	74,15	0,73	913	1 195 559	5,23	0,98	72,73	75,57
Jawa Timur	73,40	0,38	7 471	11 076 605	12,62	0,52	72,65	74,15
Banten	68,09	0,73	1 652	3 209 913	16,42	1,08	66,65	69,52
Bali	75,25	1,37	1 439	1 186 934	22,90	1,83	72,55	77,94
Nusa Tenggara Barat	73,31	0,93	1 580	1 471 589	7,96	1,27	71,48	75,13
Nusa Tenggara Timur	77,95	0,49	2 714	1 211 384	2,06	0,63	76,99	78,91
Kalimantan Barat	74,29	0,51	2 010	1 201 357	2,65	0,69	73,28	75,29
Kalimantan Tengah	74,80	0,63	1 725	706 986	2,22	0,84	73,56	76,04
Kalimantan Selatan	71,78	0,44	1 878	1 161 260	2,05	0,61	70,92	72,63
Kalimantan Timur	72,59	0,59	1 300	923 063	3,03	0,82	71,43	73,75
Kalimantan Utara	79,61	1,53	520	162 705	2,38	1,92	76,62	82,60
Sulawesi Utara	80,74	0,56	1 850	647 028	1,98	0,70	79,64	81,84
Sulawesi Tengah	79,88	0,70	1 548	735 470	2,84	0,87	78,51	81,24
Sulawesi Selatan	75,01	0,44	3 458	2 053 809	3,84	0,58	74,16	75,87
Sulawesi Tenggara	75,82	0,58	1 539	618 542	1,46	0,76	74,69	76,95
Gorontalo	80,55	0,74	757	281 107	1,16	0,92	79,10	82,01
Sulawesi Barat	76,67	1,19	740	312 811	2,98	1,55	74,35	79,00
Maluku	77,90	0,77	1 238	375 554	1,32	0,99	76,40	79,41
Maluku Utara	77,48	0,88	1 035	262 483	1,13	1,13	75,75	79,20
Papua Barat	74,63	0,83	979	223 321	0,93	1,11	73,01	76,25
Papua	67,97	0,72	2 740	799 436	2,44	1,06	66,55	69,38
Indonesia	73,28	0,14	74 684	69 794 429	10,44	0,19	73,01	73,55

Lampiran 19. Perkiraan Kesalahan Sampling Indeks Dimensi Partisipasi Sosial menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Indeks Dimensi Partisipasi Sosial (R)	SE	Jumlah Observasi		Design Effect	Relative Standard Error (%) (SE/R)	Selang Kepercayaan	
			Tak Tertimbang	Tertimbang			R-2SE	R+2SE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	73,37	0,59	2 904	1 295 879	3,12	0,80	72,22	74,52
Sumatera Utara	73,52	0,42	4 734	3 492 186	5,85	0,58	72,68	74,35
Sumatera Barat	72,96	0,53	2 548	1 332 233	3,33	0,72	71,93	74,00
Riau	74,00	0,67	1 902	1 699 164	5,64	0,91	72,68	75,32
Jambi	75,87	0,53	1 570	906 625	2,80	0,70	74,83	76,91
Sumatera Selatan	76,17	0,56	2 450	2 118 074	6,04	0,73	75,08	77,26
Bengkulu	72,79	0,61	1 279	508 357	2,04	0,84	71,58	73,99
Lampung	75,25	0,55	2 329	2 181 994	5,77	0,73	74,17	76,32
Kep. Bangka Belitung	71,55	0,80	900	379 700	1,74	1,11	69,99	73,11
Kepulauan Riau	77,31	1,20	875	632 043	6,64	1,55	74,96	79,67
DKI Jakarta	71,39	0,66	1 258	2 783 325	10,81	0,93	70,09	72,69
Jawa Barat	73,09	0,42	5 972	13 287 160	19,93	0,57	72,27	73,91
Jawa Tengah	75,20	0,26	6 877	9 360 773	6,22	0,35	74,69	75,71
DI Yogyakarta	76,20	0,66	913	1 195 559	5,45	0,87	74,91	77,50
Jawa Timur	73,22	0,33	7 471	11 076 605	9,96	0,45	72,57	73,87
Banten	69,96	0,73	1 652	3 209 913	15,10	1,04	68,54	71,39
Bali	76,15	1,34	1 439	1 186 934	23,25	1,76	73,53	78,78
Nusa Tenggara Barat	74,66	0,90	1 580	1 471 589	7,59	1,21	72,90	76,43
Nusa Tenggara Timur	78,80	0,45	2 714	1 211 384	1,88	0,57	77,92	79,68
Kalimantan Barat	74,78	0,49	2 010	1 201 357	2,40	0,66	73,81	75,75
Kalimantan Tengah	74,78	0,64	1 725	706 986	2,17	0,86	73,53	76,04
Kalimantan Selatan	73,26	0,48	1 878	1 161 260	2,72	0,66	72,31	74,20
Kalimantan Timur	74,91	0,54	1 300	923 063	3,21	0,73	73,84	75,97
Kalimantan Utara	78,74	1,29	520	162 705	2,08	1,64	76,21	81,28
Sulawesi Utara	80,26	0,66	1 850	647 028	2,35	0,82	78,97	81,55
Sulawesi Tengah	79,47	0,68	1 548	735 470	2,83	0,86	78,13	80,81
Sulawesi Selatan	73,33	0,46	3 458	2 053 809	3,78	0,63	72,42	74,23
Sulawesi Tenggara	77,12	0,61	1 539	618 542	1,83	0,79	75,93	78,30
Gorontalo	76,61	0,58	757	281 107	0,81	0,75	75,48	77,75
Sulawesi Barat	76,70	0,89	740	312 811	2,17	1,16	74,95	78,45
Maluku	80,22	0,79	1 238	375 554	1,92	0,98	78,67	81,77
Maluku Utara	78,86	0,91	1 035	262 483	1,53	1,16	77,07	80,66
Papua Barat	78,97	0,73	979	223 321	1,01	0,92	77,54	80,39
Papua	73,06	0,67	2 740	799 436	2,64	0,92	71,74	74,38
Indonesia	74,06	0,13	74 684	69 794 429	9,29	0,17	73,82	74,31

Lampiran 20. Perkiraan Kesalahan Sampling Indeks Dimensi Toleransi menurut Provinsi, 2021

Provinsi	Indeks Dimensi Toleransi (R)	SE	Jumlah Observasi		Design Effect	Relative Standard Error (%) (SE/R)	Selang Kepercayaan	
			Tak Tertimbang	Tertimbang			R-2SE	R+2SE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	46,95	1,05	2 904	1 295 879	4,57	2,23	44,89	49,00
Sumatera Utara	60,29	0,90	4 734	3 492 186	7,40	1,49	58,53	62,05
Sumatera Barat	52,38	0,96	2 548	1 332 233	4,09	1,82	50,50	54,25
Riau	59,59	1,36	1 902	1 699 164	7,86	2,29	56,92	62,27
Jambi	55,82	1,12	1 570	906 625	3,35	2,00	53,64	58,01
Sumatera Selatan	58,34	1,17	2 450	2 118 074	8,23	2,00	56,05	60,63
Bengkulu	59,40	1,20	1 279	508 357	3,14	2,02	57,06	61,75
Lampung	58,57	1,05	2 329	2 181 994	7,75	1,79	56,51	60,62
Kep. Bangka Belitung	59,81	1,18	900	379 700	1,65	1,98	57,49	62,13
Kepulauan Riau	62,05	2,07	875	632 043	7,11	3,33	58,00	66,10
DKI Jakarta	60,70	1,31	1 258	2 783 325	17,56	2,15	58,14	63,27
Jawa Barat	56,74	0,83	5 972	13 287 160	25,52	1,46	55,11	58,36
Jawa Tengah	61,77	0,63	6 877	9 360 773	9,88	1,02	60,54	63,00
DI Yogyakarta	64,35	1,10	913	1 195 559	7,28	1,71	62,20	66,51
Jawa Timur	57,70	0,70	7 471	11 076 605	14,46	1,21	56,33	59,07
Banten	55,04	1,23	1 652	3 209 913	16,61	2,24	52,62	57,46
Bali	62,64	4,06	1 439	1 186 934	43,98	6,47	54,69	70,59
Nusa Tenggara Barat	51,47	1,36	1 580	1 471 589	7,67	2,64	48,81	54,13
Nusa Tenggara Timur	70,25	0,88	2 714	1 211 384	2,73	1,26	68,52	71,98
Kalimantan Barat	64,76	1,03	2 010	1 201 357	4,20	1,58	62,75	66,77
Kalimantan Tengah	63,41	1,23	1 725	706 986	3,02	1,93	61,01	65,81
Kalimantan Selatan	58,13	1,18	1 878	1 161 260	4,75	2,02	55,82	60,43
Kalimantan Timur	63,28	1,53	1 300	923 063	7,19	2,41	60,29	66,27
Kalimantan Utara	77,06	2,84	520	162 705	3,52	3,68	71,50	82,62
Sulawesi Utara	63,53	1,38	1 850	647 028	2,69	2,17	60,83	66,24
Sulawesi Tengah	67,04	1,59	1 548	735 470	4,29	2,37	63,93	70,16
Sulawesi Selatan	54,67	0,89	3 458	2 053 809	4,43	1,63	52,93	56,41
Sulawesi Tenggara	61,99	1,16	1 539	618 542	2,41	1,87	59,71	64,26
Gorontalo	55,23	1,60	757	281 107	1,87	2,89	52,10	58,36
Sulawesi Barat	60,03	2,43	740	312 811	3,85	4,05	55,27	64,80
Maluku	66,74	1,53	1 238	375 554	2,02	2,30	63,73	69,75
Maluku Utara	56,42	1,88	1 035	262 483	2,25	3,33	52,73	60,11
Papua Barat	61,85	1,32	979	223 321	1,06	2,14	59,26	64,45
Papua	50,79	1,22	2 740	799 436	3,10	2,41	48,39	53,18
Indonesia	58,69	0,26	74 684	69 794 429	12,81	0,44	58,18	59,20

Lampiran 21. Perkiraan Kesalahan Sampling Indeks Modal Sosial menurut Karakteristik, 2021

Karakteristik	Indeks Modal Sosial (R)	SE	Jumlah Observasi		Design Effect	Relative Standard Error (%) (SE/R)	Selang Kepercayaan	
			Tak Tertimbang	Tertimbang			R-2SE	R+2SE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Klasifikasi Wilayah:								
Perkotaan	71,57	0,18	32 182	39 671 679	15,72	0,25	71,22	71,93
Perdesaan	72,68	0,13	42 502	30 122 750	6,18	0,17	72,43	72,93
Jenis Kelamin:								
Laki-Laki	72,56	0,15	36 540	33 989 173	8,82	0,20	72,27	72,85
Perempuan	71,57	0,12	38 144	35 805 256	6,94	0,17	71,32	71,81
Status Perkawinan:								
Belum Menikah	70,59	0,34	1 810	1 460 820	2,01	0,49	69,92	71,26
Menikah	72,49	0,12	60 685	56 860 483	10,32	0,17	72,25	72,72
Cerai Hidup	70,14	0,28	2 481	2 406 997	2,34	0,40	69,59	70,70
Cerai Mati	70,03	0,18	9 708	9 066 128	3,47	0,26	69,68	70,39
Kelompok Umur:								
≤ 24 Tahun	71,01	0,34	1 776	1 594 999	2,26	0,47	70,35	71,67
25-40 Tahun	72,16	0,14	23 494	21 311 629	5,15	0,19	71,89	72,43
41-64 Tahun	72,37	0,13	40 607	38 370 096	7,92	0,18	72,12	72,62
≥ 65 Tahun	70,54	0,18	8 807	8 517 706	3,28	0,25	70,19	70,89
Pendidikan Tertinggi yang Ditatamkan:								
≤ SD	70,48	0,13	36 052	34 218 540	7,03	0,18	70,22	70,74
SMP dan SMA	72,29	0,15	31 154	29 292 373	7,77	0,20	72,00	72,58
Perguruan Tinggi	75,33	0,23	7 478	6 283 517	4,20	0,30	74,87	75,79
Pendapatan Rumah Tangga:								
Hingga Rp 1.800.000	71,10	0,15	21 289	19 240 146	5,32	0,22	70,80	71,41
Rp 1.800.001 – Rp 3.000.000	71,95	0,15	23 427	21 814 615	6,03	0,20	71,66	72,24
Rp 3.000.001 – Rp 4.800.000	72,12	0,17	15 175	14 913 453	5,79	0,24	71,78	72,46
Rp 4.800.001 – Rp 7.200.000	72,96	0,22	8 287	7 934 709	4,71	0,30	72,54	73,39
Lebih dari Rp. 7.200.000	74,09	0,35	6 506	5 891 505	8,96	0,47	73,40	74,78
Keberadaan tetangga beda agama:								
Sebagian besar	72,43	0,35	2 722	2 110 169	3,24	0,49	71,73	73,12
Sebagian kecil	72,86	0,23	18 826	17 344 030	11,06	0,31	72,40	73,32
Tidak Ada	71,78	0,13	53 136	50 340 230	10,36	0,18	71,53	72,04
Keberadaan tetangga beda suku:								
Sebagian besar	71,82	0,31	5 726	4 539 100	5,08	0,44	71,20	72,43
Sebagian kecil	72,19	0,18	31 601	28 170 062	11,51	0,25	71,83	72,55
Tidak Ada	72,03	0,15	37 357	37 085 267	9,85	0,20	71,75	72,32
Keberadaan tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan:								
Sebagian besar	72,42	0,22	16 860	12 473 207	6,82	0,30	72,00	72,85
Sebagian kecil	71,90	0,13	41 653	41 544 601	9,47	0,18	71,63	72,17
Tidak Ada	72,27	0,23	16 171	15 776 621	9,51	0,31	71,83	72,72

Lampiran 22. Perkiraan Kesalahan Sampling Indeks Dimensi Rasa Percaya menurut Karakteristik, 2021

Karakteristik	Indeks Dimensi Rasa Percaya (R)	SE	Jumlah Observasi		Design Effect	Relative Standard Error (%) (SE/R)	Selang Kepercayaan	
			Tak Tertimbang	Tertimbang			R-2SE	R+2SE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Klasifikasi Wilayah:								
Perkotaan	72,46	0,21	32 182	39 671 679	13,62	0,29	72,05	72,87
Perdesaan	74,36	0,16	42 502	30 122 750	6,28	0,22	74,05	74,68
Jenis Kelamin:								
Laki-Laki	72,84	0,18	36 540	33 989 173	7,90	0,24	72,50	73,19
Perempuan	73,70	0,15	38 144	35 805 256	6,18	0,20	73,42	73,98
Status Perkawinan:								
Belum Menikah	71,58	0,45	1 810	1 460 820	2,04	0,63	70,69	72,47
Menikah	73,30	0,14	60 685	56 860 483	9,17	0,20	73,02	73,58
Cerai Hidup	71,75	0,36	2 481	2 406 997	2,32	0,50	71,04	72,46
Cerai Mati	73,85	0,22	9 708	9 066 128	3,50	0,30	73,41	74,28
Kelompok Umur:								
≤ 24 Tahun	71,88	0,44	1 776	1 594 999	2,24	0,61	71,01	72,74
25-40 Tahun	72,62	0,17	23 494	21 311 629	4,81	0,24	72,29	72,96
41-64 Tahun	73,44	0,15	40 607	38 370 096	7,19	0,21	73,14	73,74
≥ 65 Tahun	74,49	0,22	8 807	8 517 706	3,34	0,29	74,06	74,91
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan:								
≤ SD	73,60	0,16	36 052	34 218 540	7,11	0,22	73,28	73,92
SMP dan SMA	72,61	0,17	31 154	29 292 373	6,91	0,24	72,26	72,96
Perguruan Tinggi	74,87	0,25	7 478	6 283 517	3,16	0,33	74,38	75,36
Pendapatan Rumah Tangga:								
Hingga Rp 1.800.000	73,63	0,19	21 289	19 240 146	5,20	0,26	73,26	74,01
Rp 1.800.001 – Rp 3.000.000	73,10	0,18	23 427	21 814 615	5,60	0,24	72,75	73,45
Rp 3.000.001 – Rp 4.800.000	72,67	0,22	15 175	14 913 453	5,65	0,30	72,25	73,10
Rp 4.800.001 – Rp 7.200.000	73,38	0,26	8 287	7 934 709	4,21	0,35	72,87	73,88
Lebih dari Rp. 7.200.000	74,22	0,38	6 506	5 891 505	6,86	0,51	73,47	74,97
Keberadaan tetangga beda agama:								
Sebagian besar	72,82	0,41	2 722	2 110 169	2,75	0,56	72,03	73,62
Sebagian kecil	73,19	0,26	18 826	17 344 030	9,57	0,36	72,66	73,72
Tidak Ada	73,35	0,16	53 136	50 340 230	9,79	0,22	73,04	73,66
Keberadaan tetangga beda suku:								
Sebagian besar	71,69	0,39	5 726	4 539 100	4,79	0,54	70,92	72,45
Sebagian kecil	72,79	0,21	31 601	28 170 062	10,30	0,29	72,36	73,22
Tidak Ada	73,80	0,18	37 357	37 085 267	9,43	0,24	73,45	74,15
Keberadaan tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan:								
Sebagian besar	73,78	0,26	16 860	12 473 207	6,22	0,35	73,26	74,29
Sebagian kecil	73,33	0,16	41 653	41 544 601	9,15	0,22	73,00	73,66
Tidak Ada	72,91	0,25	16 171	15 776 621	7,24	0,34	72,43	73,40

Lampiran 23. Perkiraan Kesalahan Sampling Indeks Dimensi Partisipasi Sosial menurut Karakteristik, 2021

Karakteristik	Indeks Dimensi Partisipasi Sosial (R)	SE	Jumlah Observasi		Design Effect	Relative Standard Error (%) (SE/R)	Selang Kepercayaan	
			Tak Tertimbang	Tertimbang			R-2SE	R+2SE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Klasifikasi Wilayah:								
Perkotaan	73,64	0,19	32 182	39 671 679	12,25	0,26	73,26	74,02
Perdesaan	74,61	0,14	42 502	30 122 750	5,34	0,19	74,33	74,90
Jenis Kelamin:								
Laki-Laki	75,66	0,15	36 540	33 989 173	7,24	0,20	75,36	75,96
Perempuan	72,54	0,14	38 144	35 805 256	6,01	0,20	72,26	72,83
Status Perkawinan:								
Belum Menikah	71,90	0,41	1 810	1 460 820	1,90	0,57	71,10	72,70
Menikah	75,00	0,13	60 685	56 860 483	8,40	0,17	74,75	75,25
Cerai Hidup	71,41	0,32	2 481	2 406 997	2,08	0,45	70,78	72,03
Cerai Mati	69,26	0,22	9 708	9 066 128	3,01	0,32	68,82	69,69
Kelompok Umur:								
≤ 24 Tahun	73,10	0,39	1 776	1 594 999	2,15	0,54	72,33	73,87
25-40 Tahun	74,97	0,15	23 494	21 311 629	4,61	0,20	74,67	75,27
41-64 Tahun	74,58	0,14	40 607	38 370 096	6,54	0,19	74,31	74,86
≥ 65 Tahun	69,62	0,22	8 807	8 517 706	2,80	0,32	69,18	70,06
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan:								
≤ SD	70,98	0,15	36 052	34 218 540	5,94	0,21	70,69	71,27
SMP dan SMA	75,00	0,16	31 154	29 292 373	6,43	0,21	74,69	75,31
Perguruan Tinggi	78,37	0,25	7 478	6 283 517	3,63	0,32	77,87	78,87
Pendapatan Rumah Tangga:								
Hingga Rp 1.800.000	72,14	0,18	21 289	19 240 146	4,48	0,25	71,78	72,49
Rp 1.800.001 – Rp 3.000.000	74,09	0,16	23 427	21 814 615	5,22	0,22	73,78	74,41
Rp 3.000.001 – Rp 4.800.000	74,62	0,19	15 175	14 913 453	5,00	0,25	74,25	74,99
Rp 4.800.001 – Rp 7.200.000	75,53	0,23	8 287	7 934 709	4,01	0,31	75,07	75,99
Lebih dari Rp. 7.200.000	76,85	0,38	6 506	5 891 505	7,40	0,50	76,10	77,59
Keberadaan tetangga beda agama:								
Sebagian besar	73,77	0,42	2 722	2 110 169	2,94	0,57	72,95	74,59
Sebagian kecil	74,83	0,23	18 826	17 344 030	8,15	0,31	74,36	75,30
Tidak Ada	73,81	0,14	53 136	50 340 230	8,64	0,19	73,52	74,09
Keberadaan tetangga beda suku:								
Sebagian besar	73,80	0,37	5 726	4 539 100	4,66	0,50	73,08	74,51
Sebagian kecil	74,58	0,19	31 601	28 170 062	8,80	0,26	74,20	74,96
Tidak Ada	73,83	0,16	37 357	37 085 267	8,16	0,22	73,51	74,15
Keberadaan tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan:								
Sebagian besar	75,04	0,24	16 860	12 473 207	5,93	0,32	74,56	75,52
Sebagian kecil	73,82	0,15	41 653	41 544 601	7,73	0,20	73,53	74,11
Tidak Ada	74,21	0,24	16 171	15 776 621	7,27	0,32	73,75	74,68

Lampiran 24. Perkiraan Kesalahan Sampling Indeks Dimensi Toleransi menurut Karakteristik, 2021

Karakteristik	Indeks Dimensi Toleransi (R)	SE	Jumlah Observasi		Design Effect	Relative Standard Error (%) (SE/R)	Selang Kepercayaan	
			Tak Tertimbang	Tertimbang			R-2SE	R+2SE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Klasifikasi Wilayah:								
Perkotaan	59,39	0,39	32 182	39 671 679	16,81	0,65	58,63	60,15
Perdesaan	57,77	0,32	42 502	30 122 750	7,87	0,55	57,15	58,39
Jenis Kelamin:								
Laki-Laki	58,62	0,31	36 540	33 989 173	8,79	0,53	58,00	59,23
Perempuan	58,76	0,28	38 144	35 805 256	8,04	0,48	58,20	59,31
Status Perkawinan:								
Belum Menikah	61,08	0,74	1 810	1 460 820	2,10	1,21	59,63	62,52
Menikah	58,82	0,27	60 685	56 860 483	11,45	0,47	58,28	59,36
Cerai Hidup	58,35	0,57	2 481	2 406 997	2,30	0,98	57,23	59,48
Cerai Mati	57,56	0,35	9 708	9 066 128	3,30	0,61	56,87	58,26
Kelompok Umur:								
≤ 24 Tahun	58,87	0,78	1 776	1 594 999	2,63	1,33	57,33	60,40
25-40 Tahun	58,66	0,31	23 494	21 311 629	5,72	0,54	58,04	59,27
41-64 Tahun	58,83	0,28	40 607	38 370 096	8,09	0,47	58,28	59,37
≥ 65 Tahun	58,12	0,37	8 807	8 517 706	3,29	0,64	57,38	58,85
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan:								
≤ SD	55,56	0,29	36 052	34 218 540	8,14	0,52	54,97	56,14
SMP dan SMA	59,84	0,30	31 154	29 292 373	7,52	0,51	59,23	60,45
Perguruan Tinggi	64,63	0,59	7 478	6 283 517	5,26	0,91	63,46	65,80
Pendapatan Rumah Tangga:								
Hingga Rp 1.800.000	56,45	0,33	21 289	19 240 146	5,89	0,59	55,80	57,11
Rp 1.800.001 – Rp 3.000.000	58,39	0,31	23 427	21 814 615	5,80	0,52	57,80	58,99
Rp 3.000.001 – Rp 4.800.000	59,56	0,38	15 175	14 913 453	5,89	0,64	58,82	60,31
Rp 4.800.001 – Rp 7.200.000	60,68	0,49	8 287	7 934 709	5,06	0,81	59,71	61,65
Lebih dari Rp. 7.200.000	62,19	0,68	6 506	5 891 505	6,69	1,09	60,86	63,52
Keberadaan tetangga beda agama:								
Sebagian besar	65,24	0,82	2 722	2 110 169	3,83	1,25	63,64	66,84
Sebagian kecil	63,41	0,49	18 826	17 344 030	11,69	0,78	62,42	64,40
Tidak Ada	57,04	0,28	53 136	50 340 230	11,09	0,49	56,48	57,59
Keberadaan tetangga beda suku:								
Sebagian besar	64,20	0,64	5 726	4 539 100	5,44	0,99	62,94	65,45
Sebagian kecil	59,84	0,39	31 601	28 170 062	12,15	0,66	59,06	60,62
Tidak Ada	57,38	0,33	37 357	37 085 267	11,08	0,58	56,72	58,03
Keberadaan tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan:								
Sebagian besar	56,09	0,46	16 860	12 473 207	6,67	0,81	55,20	56,98
Sebagian kecil	58,08	0,29	41 653	41 544 601	9,96	0,50	57,49	58,67
Tidak Ada	61,65	0,51	16 171	15 776 621	11,30	0,83	60,65	62,65

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4 Fax 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> Email: bpshq@bps.go.id